

**MASTERPLAN
PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS
KOMODITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2016**

Kerjasama antara
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
dengan
Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya



EXECUTIVE SUMMARY

Indonesia sebagai penghasil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan produksi *crude palm oil* (CPO) terbesar di dunia, luas areal dan produksi kelapa sawit berdasarkan publikasi dari data statistik Direktorat Jenderal Perkebunan adalah seluas 10.465.020,00 Ha dengan produksi 27.782.004,00 Ton pada tahun 2013 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, penyebaran paling banyak adalah di daerah Sumatera dan Kalimantan. Sekitar 10,50% luas lahan perkebunan kelapa sawit dan 11,25% produksi kelapa sawit di Indonesia terletak di provinsi ini, share lahan dan produksi mencapai 7,92%. Diperkirakan dengan adanya rencana pemerintah membangun 850 km perkebunan kelapa sawit di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia maka pada tahun 2020 diprediksikan terjadi peningkatan share lahan dan produksi kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

Luas areal perkebunan dan produksi kelapa sawit di Kalimantan Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sentra produksi kelapa sawit dengan kontribusi produksi sebesar 23,28% dan produktivitas tertinggi 5,04 ton/ha (CPO) dibandingkan kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. Berdasarkan beberapa hasil kajian bahwa baik di tingkat provinsi Kalimantan Tengah maupun di Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa kelapa sawit merupakan komoditas unggulan daerah, serta sesuai Permentan Nomor: 46 Tahun 2015 bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan menjadi daerah pengembangan kawasan berbasis perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah (Pusdatin Ditjenbun, 2014).

Peran strategis perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), nilai investasi yang tinggi dalam pembangunan perekonomian nasional, berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar, penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal, pengentasan kemiskinan, penyedia bahan bakar nabati dan bioenergy yang bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidakaidah konservasi (Renstra Ditjenbun, 2015-2019). Menyikapi peran strategis ini maka diperlukan model pengembangan kawasan berbasis perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi, terpadu dan terukur melalui tahapan perencanaan yang terangkum dalam Dokumen Masterplan.

Metode yang digunakan dalam penyusunan dokumen masterplan ini adalah dengan pendekatan analisis kebijakan, analisis biofisik sumberdaya lahan, analisis sub-sistem, analisis linkage system, FGD, over lay peta, diagram venn dan Qualitative Strategic Planning Matrix (QSPM).

Dokumen Masterplan dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Berbasis Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat secara ringkas memuat urutan proses produksi kelapa sawit dari hulu sampai hilir dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut :



1. Secara aktual lahan di 4 kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk cukup sesuai dan kriteria kandungan hara cukup tinggi untuk budidaya kelapa sawit, hal ini di tunjukkan dengan relatif tingginya produktivitas ton/ha CPO. Khusus untuk perkebunan rakyat relatif rendahnya produktivitas disebabkan karena tidak menerapkan GAP, benih asal/tidak bersertifikat, tanaman memasuki umur peremajaan, industri hilir belum berkembang (produk hanya dalam bentuk TBS).
2. Ada potensi perluasan areal perkebunan rakyat/swadaya dengan peluang model usaha integrasi dan diversifikasi kelapa sawit - sapi, kelapa sawit - ikan dan kelapa sawit - tanaman sela melalui kelembagaan KUD yang sudah mapan di Kecamatan Pangkalan Lada yang bisa dijadikan pionir untuk pengembangan model usaha lainnya dengan sistem bergulir.
3. Mengacu pada Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor : 13 Tahun 2010, pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan untuk dilakukan dengan pendekatan Industri Klaster (terintegrasi) dari industri hulu (TBS, CPO dan PKO) yang merupakan kelompok industri yang menyediakan bahan baku bagi kelompok industri antara yaitu olein, stearin, dan oleokimia dasar (*fatty acid, methyl ester, fatty amines, dll*) yang merupakan kelompok industri yang menyediakan bahan baku bagi kelompok industri hilir. Kelompok industri dengan fokus produk akhir berupa produk hilir kelapa sawit baik produk pangan maupun non-pangan. Produk akhir kelapa sawit antara lain minyak goreng, shortening, CBS, sabun, vanaspati, biodiesel, surfaktan dan lain lain yang merupakan kelompok industri yang terintegrasi dengan industri pada sektor lain yang sangat beragam.
4. Untuk menunjang pengembangan kawasan berbasis kelapa sawit hulu sampai hilir tersebut di atas sangat diperlukan infrastruktur penunjang sektor perkebunan kelapa sawit yang berkualitas melalui rehabilitasi dan pengadaan jalan dan irigasi, pembuatan sarana industri antara dan pemberian fasilitas melalui insentif perijinan.



KATA PENGANTAR

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu sentra produksi kelapa sawit di Kalimantan Tengah, dengan kontribusi produksi sebesar 23,28% dari total produksi kelapa sawit Kalimantan Tengah. Pada tahun 2015 sesuai dengan Permentan Nomor : 46 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit, yang dalam hal ini Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi daerah pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu untuk mengembangkan potensi sektor perkebunan, disusun kerangka kerja yang terencana, terarah, dan terukur serta berkelanjutan yang tertuang dalam ***Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016***.

Kegiatan ini dapat terlaksana atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perkebunan dengan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya. Kepada semua pihak, khususnya masyarakat petani/pekebun/peternak dan dinas/instanti/*stakeholders* terkait yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan diucapkan terima kasih. Besar harapan kami semoga *Masterplan* ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi pembangunan sektor perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada saat ini dan pada saat yang akan datang.

Terimakasih.

Palangka Raya, Oktober 2016

Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala,

Fakultas Pertanian
Universitas Palangka Raya
Dekan,

Ir. Rawing Rambang, M.P.
NIP. 19601004 199003 1 004

Ir. Cakra Birawa, M.P.
NIP. 19640212 199002 1 002



DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	4
1.2.1 Tujuan	4
1.2.2 Sasaran.....	5
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah	5
1.3.2 Ruang Lingkup Pembahasan	7
1.4 Hasil yang Diharapkan.....	7
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	8
2.1 Komoditas dan Calon Lokasi.....	8
2.2 Visi dan Misi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.....	10
2.2.1 Visi dan Misi Pemerintah Pusat.....	10
2.2.2 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi	11
2.2.3 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten.....	12
2.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Komoditas dan Kawasan Perkebunan.....	13
2.3.1 Tujuan	13
2.3.2 Sasaran.....	14
BAB III. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
3.1 Pengembangan Komoditas Unggulan dan Kawasan Perkebunan ...	17
3.2 Hasil-hasil Kegiatan Terdahulu.....	18
3.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016	18
3.2.2 Rencana Pengembangan Perkebunan pada System Integrasi Sawit-Sapi di Provinsi Kalimantan Tengah	19
3.3 Tantangan dan Permasalahan Pembangunan Perkebunan	20
3.3.1 Permasalahan Terkait Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit.....	21
3.3.2 Tantangan Terkait Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit.....	21



3.4	Teori Pengembangan Komoditas Unggulan dan Kawasan Pertanian.....	22
3.4.1	Komoditas Unggulan	22
3.4.2	Pengembangan Berbasis Kawasan	23
3.4.3	Model Pengembangan Wilayah	23
3.5	Kerangka Pelaksanaan dan Kerangka Pemikiran Master Plan	26
BAB IV.	METODOLOGI.....	28
4.1	Jenis dan Sumber Data.....	28
4.2	Metode Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data	29
4.2.1	Analisis Kebijakan	29
4.2.2	Analisis Biofisik Sumberdaya Lahan	30
4.2.3	Analisis Sub System (Potensi Masalah).....	31
4.2.4	Analisis <i>Linkage System</i>	32
4.2.5	<i>Forum Group Discussion</i> (FGD)	33
4.2.6	<i>Overlay</i> Peta.....	33
4.2.7	Diagram Venn.....	36
4.2.8	<i>Qualitative Strategic Planning Matrix</i> (QSPM).....	36
BAB V.	POTENSI WILAYAH KOMODITAS UNGGULAN DAN KAWASAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	38
5.1	Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Kalimantan Tengah	38
5.1.1	Luas Wilayah dan Letak Geografis	38
5.1.2	Batas Wilayah Administrasi.....	38
5.1.3	Kondisi Biofisik dan Iklim Wilayah.....	38
5.1.4	Kependudukan.....	40
5.2	Perkebunan Kelapa Sawit.....	41
5.2.1	Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit	41
5.2.2	Perkembangan Produksi Kelapa Sawit	43
5.2.3	Perkembangan Produktivitas Kelapa Sawit	44
5.2.4	Sentra Produksi Kelapa Sawit.....	44
5.2.5	Pengembangan Industri Pengolahan TBS Kelapa Sawit/Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Pemasaran Hasil....	47
5.3	Aspek Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	48
5.3.1	Letak Administrasi dan Geografis	48
5.3.2	Batas Wilayah.....	48
5.3.3	Administrasi Pemerintahan.....	49
5.3.4	Jenis Tanah	51
5.3.5	Kawasan Hutan.....	51
5.3.6	Sistem Lahan.....	54



5.4	Ekonomi dan Perekonomian.....	52
5.5	Kependudukan dan Sosial Budaya.....	55
5.6	Aspek Sarana dan Prasarana Penunjang.....	56
5.7	Aspek Pengolahan, Perdagangan, dan Konsumsi Hasil	59
5.8	Aspek Kebijakan.....	60
5.9	Aspek Perkebunan	62
5.10	Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.....	67
5.10.1	KUD Tani Subur	67
5.10.2	Pelaku Perkebunan	71
BAB VI.	ANALISIS PERENCANAAN	72
6.1.	Analisa Biofisik Sumberdaya Lahan	72
6.1.1	Analisa Kesesuaian Lahan Aktual Komoditi Kelapa Sawit.	72
6.1.2	Analisa Kesesuaian Lahan Potensial Komoditi Kelapa Sawit	76
6.1.3	Analisa Ketersediaan Lahan	77
6.2	Analisa Ekonomi dan Perekonomian.....	89
6.3	Analisa Sarana dan Prasarana Penunjang.....	90
6.3.1	Sub Sistem Hulu.....	90
6.3.2	Sub Proses (<i>on farm</i>)	91
6.3.3	Sub Sistem Hilir	92
6.4	Analisa Pengolahan, Perdagangan, dan Konsumsi Perdagangan Hasil Perkebunan.....	94
6.4.1	<i>Linkage Backward</i>	95
6.4.2	<i>Linkage Onward</i>	96
6.5	Analisa Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Pelaku Sektoral..	97
6.6	Teknis Perkebunan	100
6.7	Model dan Desain Pengembangan	101
6.7.1	Pilihan dan Penetapan Model	101
6.7.2	Pilihan Komoditas dan Produk Akhir	102
6.8	Analisis Kebijakan dan Pembiayaan.....	103
6.9	Sumber Pembiayaan.....	104
6.10	<i>Qualitative Strategic Planning Matrix (QSPM)</i>	105
BAB VII.	RENCANA AKSI	106
7.1	Strategi Pengembangan	106
7.1.1	Visi Pengembangan.....	106
7.1.2	Misi Pengembangan.....	106
7.2	Program Pengembangan	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No.	Teks	Hal.
1.1.	Luas Areal Tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2015.....	3
2.1.	Komoditas Andalan Nasional.....	8
2.2.	Target Produksi Komoditas Perkebunan 2019	14
2.3.	Kerangka Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit.....	14
3.1.	Muatan RPJM Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Terkait Pengembangan Komoditas dan Kawasan Perkebunan	18
4.1.	Contoh Analisa QSPM.....	37
5.1.	Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Kalimantan Tengah Berdasarkan Status Pengusahaan Tahun 1998-2015	42
5.2.	Perkembangan Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit Kalimantan Tengah Tahun 1998-2015.....	43
5.3.	Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah Tahun 2015.....	45
5.4.	Jumlah Perusahaan dan Jumlah Pabrik Kelapa Sawit per Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2012	48
5.5.	Distribusi Luasan Berdasarkan Administrasi Kecamatan dan Desa di Wilayah Kajian <i>Master Plan</i> Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit.....	49
5.6.	Distribusi Luasan Berdasarkan Jenis Tanah dan Kecamatan di Wilayah Kajian <i>Master Plan</i> Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit	51
5.7.	Distribusi Luasan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan dan Kecamatan di Wilayah Kajian <i>Master Plan</i> Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit.....	52
5.8.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Kotawaringin Barat	53
5.9.	Luas Lahan dan Hasil Produksi Masing-masing Komoditi Sektor Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	54
5.10.	Luas Lahan dan Hasil Produksi Komoditi Kelapa Sawit per Kecamatan	54
5.11.	Indikator Kependudukan	55
5.12.	Statistik Kemiskinan.....	56
5.13.	Delineasi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap <i>Master Plan</i>	60
5.14.	Delineasi RPJM Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap <i>Master Plan</i>	62
5.15.	SPUP-B Kabupaten Kotawaringin Barat	63



5.16.	Perusahaan Besar Swasta di Kabupaten Kotawaringin Barat	66
5.17.	Aset dan Inventaris KUD Tani Subur	67
5.18.	Pelaku Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	71
6.1.	Kriteria Kesesuaian Lahan Aktual untuk Tanaman Kelapa Sawit	72
6.2.	Hasil Analisis Lahan Aktual untuk Tanaman Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	73
6.3.	Hasil Analisis Kimia Tanah di Kotawaringin Barat	75
6.4.	Beberapa Kriteria untuk Peta Kesesuaian Lahan Potensial.....	76
6.5.	Tindak Lanjut Pengembangan Lahan	77
6.6.	Arahan Pengembangan dan Perluasan Komoditas Kelapa Sawit Berdasarkan Kecamatan dalam Kajian <i>Master Plan</i> Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.....	84
6.7.	Arahan Pengembangan dan Perluasan Komoditas Kelapa Sawit Berdasarkan Kecamatan dan Desa dalam Kajian <i>Master Plan</i> Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit Kalimantan Tengah	85
6.8.	Arahan Pengembangan dan Perluasan Komoditas Kelapa Sawit Berdasarkan Kecamatan di Kebun Swadaya dalam Kajian <i>Master Plan</i> Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit Kalimantan Tengah	87
6.9.	Arahan Pengembangan dan Perluasan Komoditas Kelapa Sawit Berdasarkan Kecamatan dan Desa di Kebun Swadaya dalam Kajian <i>Master Plan</i> Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit Kalimantan Tengah	87
6.10.	Analisa Sub Sistem Hulu	90
6.11.	Analisa Sub Sistem Proses.....	92
6.12.	Analisa Sub Sistem Hilir	92
6.13.	Analisa Sub Sistem Penunjang.....	93
6.14.	Peluang Tanaman Sela Kelapa Sawit Berdasarkan Besaran B/C Ratio	95
6.15.	Tujuan Penanganan untuk Setiap Pelaku/Lembaga.....	98
6.16.	Pertimbangan Penggunaan Sistem Peremajaan.....	100
6.17.	Pilihan Komoditas dan Produk Akhir	102
6.18.	Arahan Pengembangan dan Perluasan Komoditas Kelapa Sawit Berdasarkan Kecamatan di Kebun Swadaya dalam Kajian <i>Master Plan</i> Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit Kalimantan Tengah	103
6.19.	Hasil Analisa QSPM	105



7.1.	Program Pengembangan	107
7.2.	Rencana Awal.....	109



DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Hal.
1.1.	Wilayah Studi	6
2.1.	Tema Pengembangan Wilayah Indonesia 2015-2019	9
3.1.	Contoh Bagan Interaksi Sawit-Sapi	20
3.2.	Kerangka Pengembangan Berbasis Wilayah	26
3.3.	Kerangka Interaksi Antar Wilayah	27
3.4.	Kerangka Pemikiran <i>Master Plan</i>	27
4.1.	Analisis Sub Sistem	32
4.2.	Ilustrasi Kerangka Keterkaitan Fungsional antar Sektor Analisis Spasial	33
4.3.	Bagan Alir Analisis Spasial Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016	35
5.1.	Kabupaten Sentra Produksi Minyak Sawit/CPO di Kalimantan Tengah Tahun 2015.....	46
5.2.	Kondisi dan Inventaris KUD Tani Subur (A)	69
5.3.	Kondisi dan Inventaris KUD Tani Subur (B)	69
5.4.	Kondisi dan Inventaris KUD Tani Subur (C)	70
5.5.	Kondisi dan Inventaris KUD Tani Subur (D)	70
5.6.	Kondisi dan Inventaris KUD Tani Subur (E)	71
6.1.	Ketersediaan Lahan Kecamatan Arut Utara (A)	78
6.2.	Ketersediaan Lahan Kecamatan Arut Utara (B)	78
6.3.	Ketersediaan Lahan Kecamatan Kotawaringin Lama (A).....	79
6.4.	Ketersediaan Lahan Kecamatan Kotawaringin Lama (B).....	79
6.5.	Ketersediaan Lahan Kecamatan Kotawaringin Lama (C)	80
6.6.	Ketersediaan Lahan Kecamatan Kotawaringin Lama (D).....	80
6.7.	Ketersediaan Lahan Kecamatan Kumai (A)	81
6.8.	Ketersediaan Lahan Kecamatan Kumai (B).....	81
6.9.	Ketersediaan Lahan Kecamatan Kumai (C)	82
6.10.	Ketersediaan Lahan Kecamatan Kumai (D)	82
6.11.	Ketersediaan Lahan Kecamatan Kumai (E).....	83
6.12.	Ketersediaan Lahan Kecamatan Kumai (F)	83
6.13.	Ketersediaan Lahan Kecamatan Pangkalan Lada	84



6.14.	Kondisi Eksisting Infrastruktur Jalan Kec. Pangkalan Lada.....	94
6.15.	Diversifikasi Kelapa Sawit-Sapi Tanaman Sela.....	96
6.16.	<i>Linkage Onward</i> Industri Hilir Kelapa Sawit.....	96
6.17.	Diagram Venn Pelaku Sektor Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit	97



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2015-2019, Sub-sektor perkebunan masih menjadi sub sektor penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Peran strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), nilai investasi yang tinggi dalam pembangunan perekonomian nasional, berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar, penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal, pengentasan kemiskinan, penyedia bahan bakar nabati dan *bio-energy* yang bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi (Renstra Ditjenbun, 2015-2019).

Kawasan pengembangan perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan. Hasil restrukturisasi program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 bertujuan meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, penanganan pascapanen dan pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan, fokus kepada 15 komoditas strategis unggulan nasional yaitu: Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada, Jambu Mete, Teh, Cengkeh, Jarak Pagar, Kemiri Sunan, Tebu, Kapas, Tembakau, dan Nilam (UU Nomor : 18/2004).



Indonesia sebagai penghasil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan produksi *crude palm oil* (CPO) terbesar di dunia, luas areal dan produksi kelapa sawit berdasarkan publikasi dari data statistik Direktorat Jenderal Perkebunan adalah seluas 10.465.020,00 ha dengan produksi 27.782.004,00 ton pada tahun 2013 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, penyebaran paling banyak adalah di daerah Sumatera dan Kalimantan. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu dari 7 (tujuh) provinsi sentra produksi kelapa sawit di Indonesia dan menempati urutan ke-4 (empat) setelah Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Selatan. Sekitar 10,50% luas perkebunan kelapa sawit dan 11,25% produksi kelapa sawit di Indonesia terletak di provinsi ini, *share* lahan dan produksi mencapai 7,92%. Diperkirakan dengan adanya rencana pemerintah membangun sepanjang 850 km perkebunan kelapa sawit di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia maka pada tahun 2020 diprediksikan terjadi peningkatan *share* lahan dan produksi kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Berbagai kemajuan pesat sekarang ini telah diperoleh Provinsi Kalimantan Tengah dari pengembangan perkebunan kelapa sawit, diantaranya kontribusinya dalam PDRB dan pendapatan asli daerah provinsi dan kabupaten, terutama kontribusi dari PBB/BPHTP/Retribusi dan berkembangnya sektor jasa (seperti perdagangan, transportasi dan telekomunikasi), pemanfaatan lahan serta membuka isolasi daerah. Luas areal perkebunan sawit di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2015 mencapai 1.411.018,41 ha, terdiri dari perkebunan rakyat (PR) seluas 146.276,52 ha dan perkebunan besar swasta (PBS) seluas 1.264.741,90 ha, jika dibandingkan dengan tanaman pesaingnya, pada periode yang sama sekitar 3,15 kali luas perkebunan karet (448.493,82 ha) atau 46,37 kali luas perkebunan kelapa (30.431,81 ha) atau mencapai 74,84% dari total luas lahan perkebunan, tersaji pada **Tabel 1.1**.



Tabel 1.1. Luas areal Tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.

No.	Komoditi	Luas Areal (ha)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Karet	491.949,33	565.741,35	455.896,60	450.090,51	446.943,41	439.659,35
2	Kelapa	85.577,00	98.413,55	73.415,22	32.492,49	32.340,70	30.431,81
3	Cengkeh	37,69	43,35	24,35	5,35	5,49	5,31
4	Kopi	7.267,83	8.358,00	4.433,55	2.051,53	1.752,90	1.537,35
5	Lada	4.336,77	2.369,00	1.954,57	781,83	921,61	639,75
6	Kakao	1.105,20	809,00	931,66	929,16	987,16	1.317,66
7	Jambu mete	1.294,34	1.231,00	1.337,34	795,20	626,90	306,44
8	Kelapa sawit	1.087.950,38	1.256.444,00	1.164.009,41	1.156.301,51	1.297.886,17	1.411.018,41
9	Pinang	470,43	541,00	556,15	151,50	133,78	101,59
10	Kemiri	1.348,44	1.550,706	1.033,44	267,50	157,16	121,14
11	Aren	250,70	283,20	223,14	90,99	206,46	280,47
12	Kapuk	23,08	34,58	25,18	4,73	16,25	6,35
	Total	1.681.611,19	1.933.852,87	1.703.840,31	1.643.962,30	1.781.977,99	1.885.425,63

Sumber : Statistik Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, 2016.

Sedangkan produksi kelapa sawit pada tahun 2015 mencapai 16.543.815,50 ton atau dengan peningkatan produksi sebesar 29,64 % dari tahun 2014 serta produktivitas sebesar 11,72 ton/ha, lebih dibandingkn produktivitas nasional, yakni mencapai 15 ton/ha. Peningkatan luas areal dan produksi tersebut terutama terjadi pada kegiatan perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) dan perkebunan rakyat (uraian rinci disajikan pada **Bab V**).

Luas areal perkebunan dan produksi kelapa sawit di Kalimantan Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sentra produksi kelapa sawit (produksi tertinggi dibandingkan kabupaten/kota se Kalimantan Tengah), dengan kontribusi produksi sebesar 65,44% dari total produksi kelapa sawit Kalimantan Tengah. Dan sesuai Permentan Nomor : 46 Tahun 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan menjadi daerah pengembangan kawasan berbasis perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah (Pusdatin Ditjenbun, 2014).

Permasalahan umum yang dihadapi dalam pengembangan komoditas kelapa sawit adalah (1) Rendahnya produktivitas khususnya Perkebunan Rakyat (PR) : (a) tidak menerapkan GAP; (b) benih asal/tidak bersertifikat;



(c) Perkebunan Rakyat sudah memasuki umur peremajaan, (2) Infrastruktur terbatas (jalan kebun, jalan produksi, pelabuhan) sehingga memerlukan waktu lebih dari 24 jam TBS sampai PKS, (3) Biaya investasi cukup besar, sedangkan perbankan belum cukup mendukung, (4) Industri hilir belum berkembang (nilai tambah rendah), (5) Issue pembangunan berkelanjutan (alih fungsi lahan, *CO₂ emission*, pemanasan global, berkurangnya satwa langka, terpinggirkannya masyarakat lokal dan lain-lain).

Potensi tanaman kelapa sawit yang sangat strategis harus ditunjang oleh rencana pengembangan yang komprehensif. Agar rencana pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kelapa sawit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat menjadi acuan bersama pemerintah dan masyarakat/*stakeholder*, maka dibutuhkan dokumen perencanaan pengembangan dalam bentuk langkah-langkah strategis dan operasional secara bertahap dan berkelanjutan (*master plan*).

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

Penyusunan master plan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kelapa sawit Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah secara umum bertujuan sebagai pedoman dalam mensinergikan program dan rencana aksi antar sub sektor. Secara spesifik bertujuan untuk :

- a. Menganalisa potensi kawasan perkebunan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 46/Kpts/PD.300/1/2015 Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Nasional.
- b. Menyiapkan program pengembangan kawasan perkebunan secara terarah, terpadu dan terukur dengan lintas sektoral yang didukung sarana prasarana yang diperlukan.



- c. Menetapkan sasaran dan waktu pencapaian masing-masing program.
- d. Mengembangkan dan mendorong agroindustri berkelanjutan.
- e. Meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi kawasan.

1.2.2 Sasaran

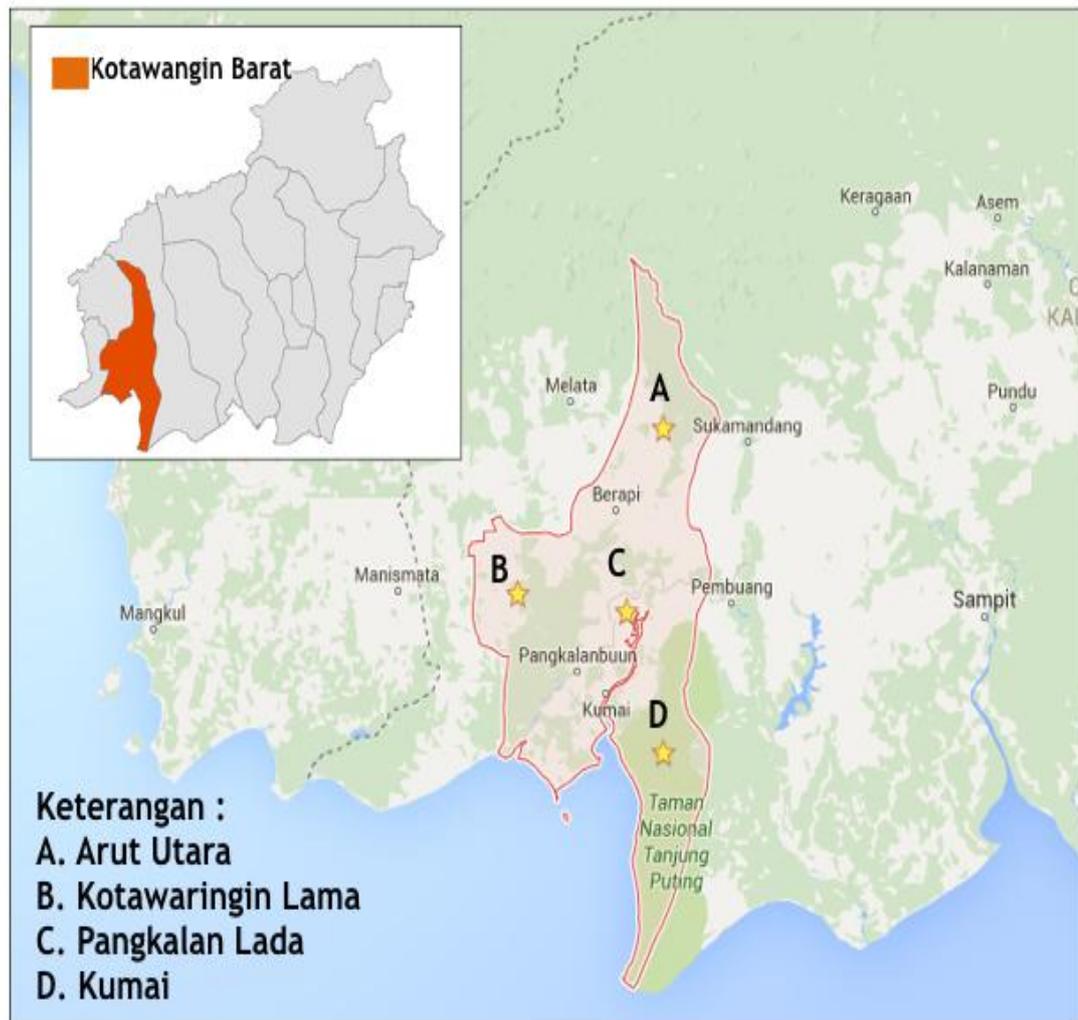
Sasaran penyusunan master plan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kelapa sawit kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- a. Tersusunnya master plan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kelapa sawit 5 (lima) tahunan (2016-2020), serta penjabaran Rencana Aksi per tahun.
- b. Terbangunnya Kawasan Perkebunan.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup pelaksanaan penyusunan master plan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah adalah pada 4 (empat) kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Lada, dan Kecamatan Kumai. Secara administratif dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1. Wilayah Studi.



1.3.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan penyusunan master plan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan pembahasan berdasarkan atas 5 (lima) poin penting, yaitu :

- a. Studi/review kebijakan dan regulasi yang relevan;
- b. Pengumpulan data sekunder dan data primer di lapangan;
- c. Analisa data sekunder dan data primer;
- d. Penyusunan Laporan/Dokumen Master Plan;
- e. *Focus Group Discussion* (FGD).

1.4 Hasil yang Diharapkan

Keluaran utama dari kegiatan ini adalah Master Plan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit, yang didalamnya memuat berbagai aspek yang menjadi maksud dan tujuan seperti yang telah disampaikan diatas. Laporan yang dimaksudkan dalam hal ini berupa:

- a) Laporan Pendahuluan;
- b) Laporan Akhir/Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit selama jangka waktu 20 Tahun yang terdiri dari perencanaan jangka pendek 5 Tahun (2016-2020), rencana jangka menengah 5 Tahun (2021-2025) dan rencana jangka panjang 10 Tahun (2026-2036) Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- c) *Executive Summary*, berisikan ringkasan atau intisari dari kegiatan penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- d) Peta-peta terkait kegiatan ini;
- e) Lampiran data dan hasil analisis tanah.



BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKEBUNAN

2.1 Komoditas dan Calon Lokasi

Upaya pemerintah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, diterjemahkan melalui 10 (sepuluh) program. Berkaitan dengan perekonomian atau program ke-8 (delapan), yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dicapai melalui kegiatan, yaitu : (1) peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; (2) akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (3) akselerasi pertumbuhan pariwisata; (4) akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; dan (5) peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Poin pertama berkaitan dengan peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang menekankan pada 3 (tiga) sasaran utama yaitu:

- A. Meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan (**Tabel 2.1**) ekspor dan komoditas prospektif;
- B. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor;
- C. Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan.

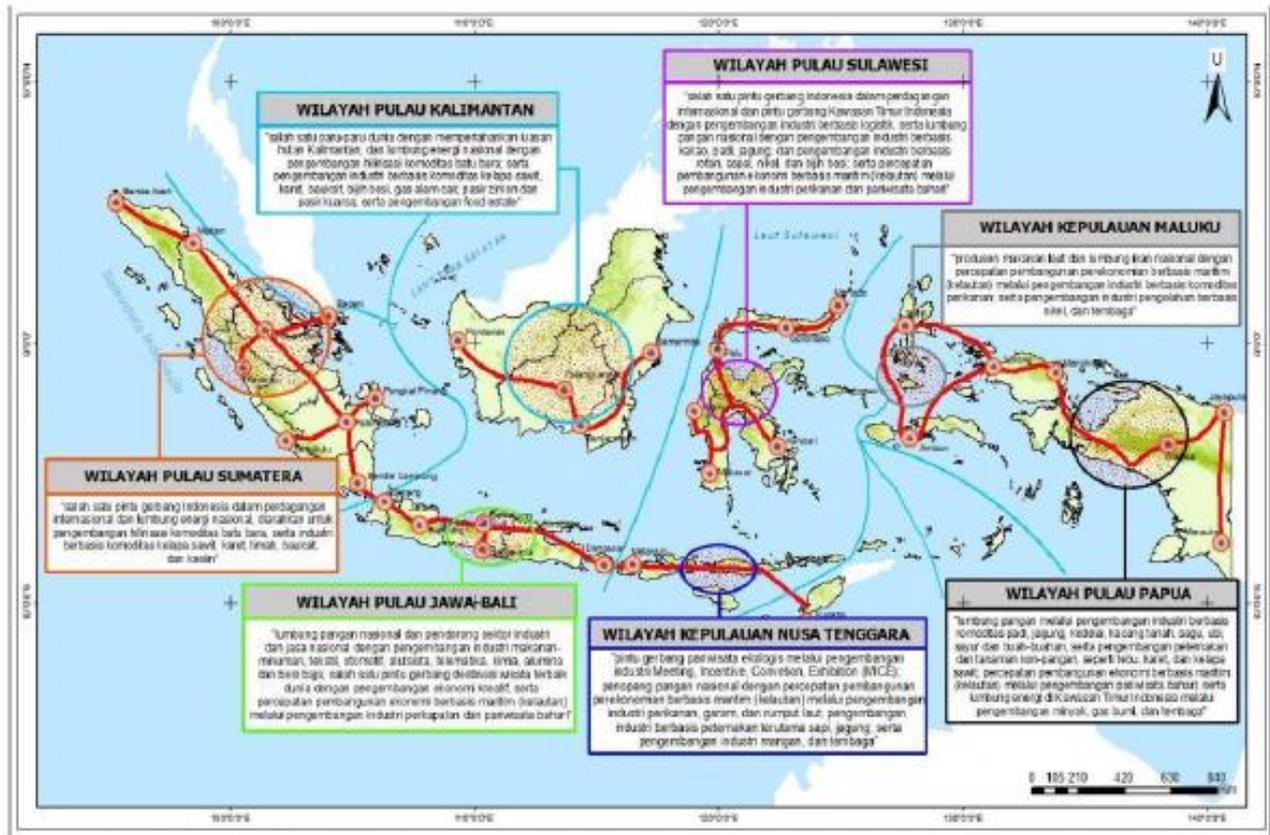
Tabel 2.1. Komoditas Andalan Nasional.

No.	Komoditi	2014 (Baseline)	2019 (Goal)	Pertumbuhan
1	PDB Industri Pengolahan (%)	2,4	2,6	2,6
2	Produksi Perkebunan (ribu ton)			
	Kelapa Sawit	29.513	36.420	4,3
	Karet	3.204	3.810	3,5
	Kakao	817	913	2,3
	Teh	148	163	2,0
	Kopi	711	778	1,8
	Kelapa	3.263	3.491	1,4
3	Hortikultura (ribu ton)			
	Mangga	2.447	2.947	3,8
	Nenas	2.125	2.762	5,4
	Manggis	156	204	5,6
	Salak	1.058	1.206	2,7
	Kentang	1.122	1.190	1,2

Berdasarkan tema pengembangan wilayah RPJMN 2015-2016, pengembangan di Pulau Kalimantan diarahkan pada 3 (tiga) tema besar yaitu:

- A. Sebagai paru-paru dunia.
- B. Sebagai lumbung energi nasional.
- C. Sebagai sentra pengembangan industri berbasis komoditas.

Pada poin ke-3 industrialisasi diarahkan pada komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, serta pengembangan *food estate*.



Gambar 2.1. Tema Pengembangan Wilayah Indonesia 2015-2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas serta pertimbangan potensi wilayah (akan dibahas pada **Bab V**), maka *Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah* akan berorientasi pada komoditi kelapa sawit. Lokasi diarahkan untuk dilaksanakan pada sentra



komoditi kelapa sawit Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor : 46 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit yaitu : pada Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2 Visi dan Misi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota

2.2.1 Visi dan Misi Pemerintah Pusat

A. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan

Visi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkokoh pondasi sistem pertanian *bio-industry* berkelanjutan, dalam rangka mendukung Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu mewujudkan sistem pertanian *bio-industry* berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

B. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian, misi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah:

1. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan umum, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas; melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas;
2. Mendorong upaya peningkatan produyksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan;



3. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi petani/pekebun dalam penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal/wilayah setempat; serta mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani;
4. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penanganan dampak perubahan iklim;
5. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan;
6. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dan lain-lain;
7. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

2.2.2 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi

A. Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Visi pembangunan sub sektor perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu **“Perkebunan Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Adil”**. Visi tersebut juga selaras dengan visi agribisnis sub sektor perkebunan Kalimantan Tengah yaitu **“Agribisnis Perkebunan Terpadu Berkelanjutan menjadi Tulang Punggung Perekonomian Kalimantan Tengah”**.

B. Misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam mencapai tujuan pembangunan sub sektor perkebunan, misi yang ingin dicapai yaitu Mengembangkan sistem dan usaha agribisnis perkebunan terpadu berkelanjutan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan ekonomi daerah. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:



1. Kebijakan program prioritas ekonomi kerakyatan untuk pembangunan sub sektor perkebunan;
2. Kerjasama pelaksanaan pengembangan sub sektor perkebunan dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS);
3. Peningkatan pengolahan hasil perkebunan menjadi produk-produk hilir siap ekspor.

2.2.3 *Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten*

A. Visi Dinas Perkebunan dan Kabupaten Kotawaringin Barat

Pembangunan sub sektor perkebunan mengemban visi Dinas Perkebunan Kotawaringin Barat yaitu **“Perkebunan Berbasis Kerakyatan yang Tangguh dan Bermartabat”**.

B. Misi Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat

Penterjemahan visi agar dapat terlaksana tertuang dalam misi pembangunan sub sektor perkebunan yaitu:

1. Mewujudkan SDM Perkebunan yang Profesional berbasis Pelayan Prima dengan Lingkungan Kerja yang Kondusif dan sistem Pengawasan yang Efektif;
2. Memfasilitasi Pengembangan dan Perluasan perkebunan, serta upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman unggulan dan pengembangan komoditi perkebunan lainnya untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan;
3. Memfasilitasi Pengembangan benih unggul bermutu, dan pengawalan dan pengawasan terhadap peredaran benih, serta penanganan perlindungan tanaman dari GUP dan HPT;
4. Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pekebun yang merupakan basis ekonomi pedesaan, melalui penerapan manajemen, teknologi dan permodalan secara profesional;
5. Mengembangkan sistem agroindustri terpadu melalui keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran/informasi



pasar, promosi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah produk perkebunan secara adil dan professional.

2.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Komoditas dan Kawasan Perkebunan

2.3.1 Tujuan

Tujuan pengembangan komoditi berbasis kawasan berdasarkan peruntukan dan kriteria kawasan pertanian (termasuk kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) adalah:

- A. Peningkatan daya dukung lahan baik kawasan pertanian yang telah ada maupun melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pendayagunaan investasi;
- B. Peningkatan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;
- C. Peningkatan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian dan Pengendalian alih fungsi lahan dan pertanian ke non pertanian agar ketersediaan lahan tetap berkelanjutan;
- D. Memberikan kemudahan dalam mengukur kinerja program dan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian;
- E. Mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir dan/atau mendorong pengembangan sumber energi terbarukan, dan meningkatkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan;
- F. Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, melestarikan nilai sosial budaya dan daya tank kawasan perdesaan sebagai kawasan agropolitan dan agrowisata.



2.3.2 Sasaran

Perumusan agenda prioritas NAWACITA yang menjadi tupoksi Ditjen Perkebunan adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Selain itu terkait akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan agroindustry berbasis komoditas perkebunan, sasaran produksi per komoditi tahun 2019 dapat dilihat pada **Tabel 2.2.**

Tabel 2. 2. Target Produksi Komoditas Perkebunan 2019.

No.	Komoditi	Target produksi
1	Kelapa sawit	36,42 juta ton (CPO)
2	Karet	3,81 juta ton (Karet kering)
3	Kakao	961 ribu ton (biji kering)
4	Teh	162,7 ribu ton (daun kering)
5	Kopi	778 ribu ton
6	Kelapa	3,49 juta ton (setara kopra)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Road Map Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit menghasilkan kerangka pengembangan yang mencakup pembangunan jangka menengah dan panjang. Kerangka pengembangan dapat dilihat pada **Tabel 2.3.**

Tabel 2.3. Kerangka Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit.

Industri inti	Industri pendukung	Industri terkait
Olein, Stearin dan PFAD	Industri minyak goreng kemasan, minyak, salad, mayonaise, margarine, CBS, Shortening, vanaspati, vegetable ghee, es krim, industri makanan, industri pastry, Vit A, Vit E, sabun dan deterjen, pakan ternak	Industri asam fosfat, bahan pemucat, asam sitrat, NaOH, industri aditif, industri pewarna, lesitin, garam, emulsifier, potasium sorbat, asam sitrat, susu skim bubuk, industri mesin dan peralatan, industri kemasan
Industri fatty acid	Industri soap chips, food emulsifier, metalic soap, surfaktan, pelumas,	Industri katalis ZnO, industri mesin dan peralatan, industri kemasan



	CBS, industri karet, personal care product, industri gliserol, farmasi	
Industri fatty alcohol	Industri surfaktan, industri kosmetika, personal care product	Industri methanol, gas hidrogen, katalis Ni, katalis copper chromite, asam sulfat, industri mesin dan peralatan, industri kemasan
Industri Biodiesel	Industri surfaktan, jasa transportasi, pembangkit listrik, industri gliserol	Industri methanol, NaOH, KOH, H ₂ SO ₄ , Sodium Metilat, industri mesin dan peralatan.

<p>Sasaran jangka menengah 2010-2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya kluster industri hilir kelapa sawit di Sumut, Riau dan Kaltim; - Iklim usaha dan investasi yang kondusif; - Infrastruktur yang berdaya saing 	<p>Sasaran jangka panjang 2015-2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperluas jenis produk hilir sampai dengan 70 jenis pada tahun 2020 - Penguasaan pasar domestik dan internasional; - Pemantapan industri berwawasan lingkungan; - Pengembangan strategi <i>global production network</i> - Terintegrasinya industri hilir kelapa sawit di, Kalbar, Kalteng dan Papua
<p>Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sektor : Diversifikasi produk industri hilir kelapa sawit untuk industri dalam negeri dan ekspansi ekspor. - Ekspor minyak sawit mentah mencapai hanya 50 % pada tahun 2015 - Peningkatan promosi dan kampanye minyak kelapa sawit berkelanjutan - Teknologi : Pengembangan teknologi industri hilir kelapa sawit dengan lisensi dan atau mendorong kemampuan pengembangan R&D dalam negeri - Infrastruktur : Pengembangan dan pembangunan infrastruktur di daerah kluster industri hilir kelapa sawit yang berdaya saing - Insentif : Penciptaan insentif baik fiskal maupun non fiskal untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit 	
<p>Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjalin kerjasama di antara industri hilir kelapa sawit dengan industri/institusi pendukung/terkait; - Integrasi industri hilir kelapa sawit di Sumut, Riau , dan Kaltim; - Meningkatkan kerjasama R&D antara 	<p>Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2015 – 2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diversifikasi produk industri hilir kelapa sawit yang bernilai tambah tinggi; - Inovasi produk dan teknologi melalui peningkatan R & D; - Pemberian insentif bagi pelaku R&D



<p>lembaga penelitian, perguruan tinggi dan industri;</p> <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas produk sesuai SNI;- Mengembangkan industri mesin peralatan;- Mengembangkan industri bahan penolong;- Meningkatkan kualitas SDM melalui penyusunan dan penerapan SKKNI industri kimia berbasis kelapa sawit;- Mendorong peran lembaga keuangan dalam penyediaan layanan kredit dan permodalan dengan suku bunga rendah;- Mendorong peran lembaga terkait dalam pemasaran.- Promosi investasi;- Pengembangan infrastruktur;- Peningkatan koordinasi dan sinergi instansi terkait dalam penetapan kebijakan;- Kebijakan insentif mendukung pengembangan industri;- Penghapusan Perda yang menghambat pengembangan industry.	<p>pengembangan produk industri hilir</p> <ul style="list-style-type: none">- kelapa sawit- Pemenuhan pasar di dalam negeri dan perluasan pasar ekspor;- Penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran;;- Pembangunan industri hilir kelapa sawit Indonesia di negara tujuan ekspor (<i>Global Production Network</i>)- Penerapan manajemen penanganan Dampak Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L) di lingkungan industri kimia;- berbasis kelapa sawit.
--	---



BAB III TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pengembangan Komoditas Unggulan dan Kawasan Perkebunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perencanaan perkebunan mencakup 8 (delapan) aspek, yaitu : wilayah, tanaman perkebunan, sumber daya manusia, kelembagaan, kawasan perkebunan, keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir, sarana prasarana, serta pembiayaan. Kemudian dalam undang-undang yang sama, perencanaan perkebunan dilakukan berdasarkan pada rencana pembangunan nasional; rencana tata ruang wilayah; kesesuaian tanah, iklim, serta ketersediaan lahan; daya dukung dan daya tampung lingkungan; kinerja pembangunan; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kondisi pasar dan tuntutan global; dan aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga membahas pengembangan perkebunan dalam bentuk kawasan dilakukan secara terpadu. Terpadu berarti adanya integrasi antara lokasi, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia. selain itu, harus terdapat keterkaitan fungsional antara kawasan perkebunan dengan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 13 Tahun 2010 tentang peta panduan pengembangan klaster industri hilir kelapa sawit menetapkan sasaran jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan komoditi kelapa sawit. Poin-poinnya yaitu:

Jangka Menengah (2010 -2014)

- Berkembangnya klaster industri hilir di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Kalimantan Timur;
- Iklim usaha dan investasi yang kondusif dan infrastruktur yang berdaya saing.



Jangka Panjang (2015-2025)

- Memperluas pengembangan produk akhir;
- Terbentuknya *centre of excellence* industri hilir kelapa sawit;
- Penguasaan pasar domestik dan internasional serta Pementapan industri berwawasan lingkungan;
- Terintegrasinya industri turunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Papua.

3.2 Hasil-Hasil Kegiatan Terdahulu

3.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Muatan yang berkaitan dengan pengembangan komoditas dan kawasan perkebunan dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1. Muatan RPJM Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terkait Pengembangan Komoditas dan Kawasan Perkebunan.

No.	Muatan
1	Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas 1.075.900 ha , cadangan lahan perkebunan seluas 212.671 ha , terdiri dari perkebunan besar kelapa sawit, karet, lada, kelapa, dan lain lain tersebar di 6 Kecamatan di kabupaten Kotawaringin Barat. Target total capaian lahan komoditi kelapa sawit hingga 2016 adalah 209.909 ha.
2	Langkah yang ditempuh pemerintah untuk memacu usaha disektor perkebunan, khususnya kelapa sawit telah dapat meningkatkan produktivitas yang mampu menembus pasar dalam negeri maupun ekspor dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO), RPB Palm Stearin, RPB Palm Olein, Palm Fatty Acid Distillate, PKO, minyak goreng.
3	Secara umum kondisi industri di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berkembang secara optimal . Kecilnya peranan sektor industri ini dimungkinkan oleh sedikitnya jumlah usaha industri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Disamping itu, industri yang ada pada umumnya merupakan industri dengan skala kecil. Hanya beberapa industri yang berskala menengah ke atas seperti industri kayu lapis dan kelapa sawit.
4	Berdasarkan analisis ZOPP dalam dokumen Kajian Produk Unggulan Daerah, telah ditetapkan sejumlah kriteria penilaian komoditas unggulan dari masing-masing sektor ekonomi yang berkembang di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dipaparkan



No.	Muatan
	berikut ini: Ketersediaan sumberdaya alam, Ketersediaan sumberdaya buatan, Ketersediaan sumberdaya manusia, Kontribusi terhadap perekonomian kawasan, Kemungkinan dikembangkan dalam skala ekonomi/industri, Penyerapan tenaga kerja, Dampak pengembangan spasial, Potensi pasar lokal/regional, Jumlah produksi, Potensi pasar ekspor, Hambatan biaya, teknologi dan kelembagaan, Dampak negatif terhadap lingkungan. 5 (lima) komoditas unggulan, yaitu: Kelapa sawit, Karet, Ayam buras, Udang putih, dan Ikan lais.
5	Kegiatan-kegiatan lain yang cukup berpotensi menimbulkan dampak pencemaran adalah kegiatan industri dibidang Pengolahan limbah Kelapa Sawit yang harus selalu mendapatkan pengawasan secara keseluruhan dan pembinaan yang baik guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.2.2 Rencana Pengembangan Perkebunan pada Sistem Integrasi Sawit-Sapi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembangunan kebun kelapa sawit yang dilaksanakan oleh para pengusaha perkebunan atau investor dalam bentuk Perkebunan Besar (PB) termasuk kebun plasma melalui Pola PIR dan juga kebun swadaya masyarakat di Kalimantan Tengah pada kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang sangat pesat sekali dalam hal luas areal, produksi, penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap PDRB, ekspor dan pembukaan atau pengembangan sentra-sentra produksi atau wilayah.

Kelapa sawit menggunakan lahan yang cukup luas dan kerapatan tanaman per hektar sedikit sekali, sehingga memungkinkan cabang usaha tani termasuk sapi dapat diterapkan atau digalakkan baik dengan pola penggembalaan di lahan sela-sela tanaman maupun dengan sistem kandang. Limbah panen kelapa sawit seperti pelepah, daun dan tandan kosong serta limbah pengolahan tandan buah segar menjadi CPO dalam bentuk "Solid" atau padat-konsentrat, bungkil inti sawit mempunyai potensi untuk sumber pakan ternak sapi. Pengujian dan pengetrapan di lapangan untuk penggembalaan di lahan sawit dan pakan tambahan berupa "Solid" sudah dilakukan, dan memberikan harapan yang sangat prospektif sekali. Integrasi sawit-sapi sangat mendukung untuk pemberdayaan petani atau masyarakat sekitar perusahaan perkebunan,



kebutuhan pasar nasional dan global terhadap produk hasilnya menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditi perkebunan andalan yang harus dikembangkan. Tentunya dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit terdapat banyak sekali tantangan terutama pada era globalisasi dimana negara-negara di dunia dituntut untuk berhaluan pada pengembangan secara berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

3.3.1 Permasalahan Terkait Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit

Secara ekonomi, pembangunan sub sektor perkebunan komoditi kelapa sawit sangat menguntungkan, namun terdapat beberapa permasalahan dari aspek sosial dan lingkungan (Perbatakusuma *et al.*, 2009), yaitu:

- A. Perubahan bentang alam dan tata guna lahan melalui kegiatan deforestasi, pengeringan hutan rawa, pembakaran hutan.
- B. Pencemaran air, erosi tanah, pencemaran kimia dari pupuk dan pestisida.
- C. Peningkatan pelepasan Gas Rumah Kaca CO₂ dan N₂O sebagai konsekuensi penggalan tanah, konversi ekosistem menjadi lahan pertanian, penggunaan pupuk nitrogen, penggunaan mesin dan alat transportasi.
- D. Dampak produksi tanaman terhadap keamanan pangan, baik berupa pengadaan, distribusi dan akses.
- E. Perubahan lahan pertanian tradisional menjadi perkebunan.
- F. Dampak keamanan pangan akibat model perkebunan kelapa sawit monokultur.
- G. Produksi perkebunan skala besar versus skala kecil.

3.3.2 Tantangan Terkait Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit

Selain permasalahan terkait aspek sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh pengembangan sub sektor perkebunan komoditi kelapa sawit, terdapat pula potensi pengembangan kelapa sawit yang dapat mendukung pembangunan



berkelanjutan. Tanaman kelapa sawit merupakan sumber bahan baku yang paling siap dalam memasok bahan BBN, khususnya untuk pengadaan Biodisel. Pengembangan produksi tanaman BBN yang bersumber dari perkebunan kelapa sawit memiliki konsekuensi terhadap lingkungan, masalah sosial dan keamanan pangan. Konsekuensi positif apabila perkebunan kelapa sawit melaksanakan praktek-praktek terbaik dalam pengelolaannya dan sebaliknya.

Pengembangan BBN bersumber tanaman kelapa sawit akan dapat dikurangi dampak negatifnya apabila didorong tersedianya perangkat standar pengelolaan lingkungan dan sosial dalam mengembangkan bahan bakar nabati yang berkelanjutan. Standar ini harus diakui oleh para pihak, mengikat secara hukum, mendatori, dan dipatuhi. Hal ini akan menjadi tantangan untuk mendukung terciptanya pengembangan sub sektor perkebunan komoditi kelapa sawit yang berkelanjutan.

3.4 Teori Pengembangan Komoditas Unggulan dan Kawasan Pertanian

3.4.1 Komoditas Unggulan

Penentuan komoditas unggulan (nasional atau daerah) merupakan langkah awal menuju pembangunan sektor yang efisien serta berpijak pada keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi perekonomian global. Pada sisi penawaran, komoditi unggulan memiliki ciri superioritas pertumbuhan, sesuai secara biofisik, teknologi, dan kondisi sosial wilayah. Pada sisi permintaan, komoditi unggulan memiliki ciri kuatnya permintaan pada pasar domestik maupun internasional. Komoditi unggulan adalah komoditas suatu daerah yang berkembang dengan baik dan tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah/PDRB secara optimal (Hendayana, 2003; Kuncoro *dalam* Ningsih, 2010).



3.4.2 Pengembangan Berbasis Kawasan

Berdasarkan undang-undang Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsurterkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kegiatan pembangunan ekonomi bertumpu pada kawasan budidaya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, terdapat kesamaan visi pembangunan nasional, yaitu:

- A. Berlandaskan pada azas ekonomis, efisien, efektif dan transparan;
- B. Berbasis kinerja yang berorientasi outcome;
- C. Berhorizon pengeluaran jangka menengah;
- D. Berdimensi wilayah (kawasan secara spesifik);**
- E. Dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah;
- F. Dirancang dengan mengakomodasi pendekatan politik, *top-down policy* dan *bottom-up planning*; dan
- G. Disusun secara teknokratis dan berbasis pada penataan ruang.

3.4.3 Model Pengembangan Wilayah

Berbagai konsep pembangunan berdimensi wilayah yang telah berkembang dan diterapkan di Indonesia (Setyanto dan Irawan, 2016), yaitu:

A. Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Karakter Sumber Daya.

Sampai saat ini upaya pengembangan suatu wilayah dilakukan dengan cara pengembangan berbasis karakteristik sumber daya menghasilkan sejumlah pilihan strategi, sebagai berikut : (a) Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya manusia; (b) Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya alam; (c) Pengembangan wilayah berbasis sumber daya modal dan manajemen; dan (d) Pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan keindahan alam.



B. Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Penataan Ruang

Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang (*spasial*) merupakan konsep pembangunan wilayah dengan menggunakan pendekatan penataan ruang wilayah. Di Indonesia, pendekatan ini diimplementasikan dalam bentuk penyusunan penataan ruang nasional yang dirinci kedalam wilayah provinsi dan kabupaten. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, membagi wilayah ke dalam: (1) pusat pertumbuhan; (2) integrasi fungsional; (3) desentralisasi. Ketiga hal ini menjadi dasar pengembangan wilayah berbasis penataan ruang.

C. Konsep Pengembangan Wilayah Terpadu

Konsep ini menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal. Daerah atau wilayah yang tertinggal adalah daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah atau wilayah lain dalam skala nasional. Untuk menentukan daerah-daerah yang tertinggal, terdapat berbagai indikator yang digunakan. Kementerian PDT menggunakan 5 (lima) indikator sebagai dasar penentuan daerah tertinggal di Indonesia, antara lain : (1) Perekonomian masyarakat; (2) Sumber daya manusia; (3) Kemampuan finansial; (4) Aksesibilitas; dan (5) Karakteristik geografis. Berdasarkan indikator tersebut, setidaknya terdapat 199 daerah yang tergolong kepada daerah tertinggal di Indonesia (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2004).

D. Konsep Pengembangan Wilayah Berdasarkan Klaster

Konsep klaster sebagai salah satu strategi pengembangan wilayah telah banyak dikembangkan di beberapa negara. Klaster diartikan sebagai konsentrasi dari suatu kelompok kerjasama bisnis atau unit-unit usaha dan lembaga-lembaga, yang bersaing, bekerjasama, dan saling tergantung satu sama lain, terkonsentrasi dalam satu wilayah tertentu, dalam bidang aspek unggulan

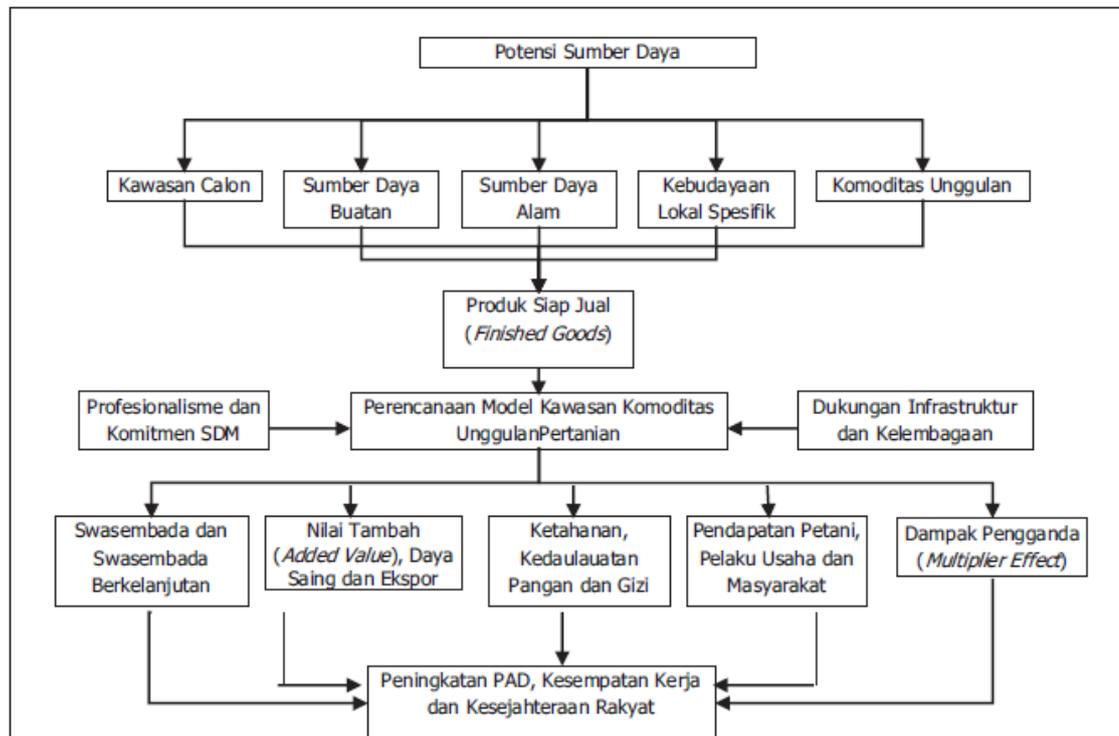


tertentu. Pengembangan wilayah berbasis kluster memberikan fokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku-pelaku dalam suatu jaringan kerja produksi, sampai kepada jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya.

Pada umumnya motor penggerak dalam pengembangan wilayah berdasarkan kluster adalah sektor industri. Adapun tujuan dari pengembangan wilayah berbasis kluster adalah : (1) memperoleh manfaat kesejahteraan, kesempatan kerja, dan ekspor; (2) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan inovasi dan perdagangan melalui jaringan kerja yang kuat; (3) berkembangnya pasar dan jaringan kerja internasional; (4) berkembangnya infrastruktur pendukung; (5) berkembangnya budaya baru dalam upaya-upaya kerjasama, dengan biaya transaksi yang rendah; (6) tumbuhnya generasi pengusaha-pengusaha lokal baru yang memiliki sendiri usaha bisnisnya; (7) berkembangnya kemitraan dengan pemerintah yang didasarkan atas rasa saling ketergantungan (Nusantoro, 2011).

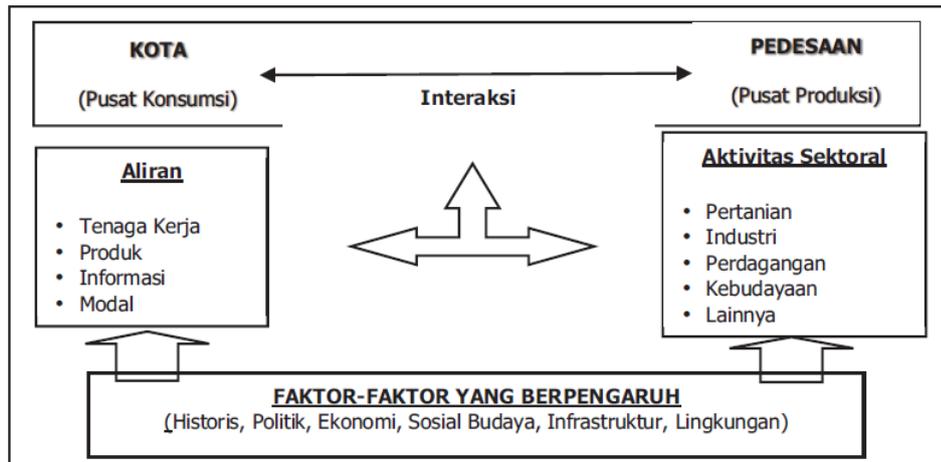
3.5 Kerangka Pelaksanaan dan Kerangka Pemikiran *Master plan*

Model dan strategi pengembangan berbasis wilayah atau kawasan memiliki arah dan tujuan tertentu sehingga maksimalisasi faktor-faktor internal dan eksternalnya dapat menciptakan nilai tambah maupun dampak pengganda untuk meningkatkan pendapatan daerah, kesempatan kerja maupun kesejahteraan rakyat. Kerangka pengembangan berbasis wilayah dapat dilihat pada **Gambar 3.2** dan **Gambar 3.3**.



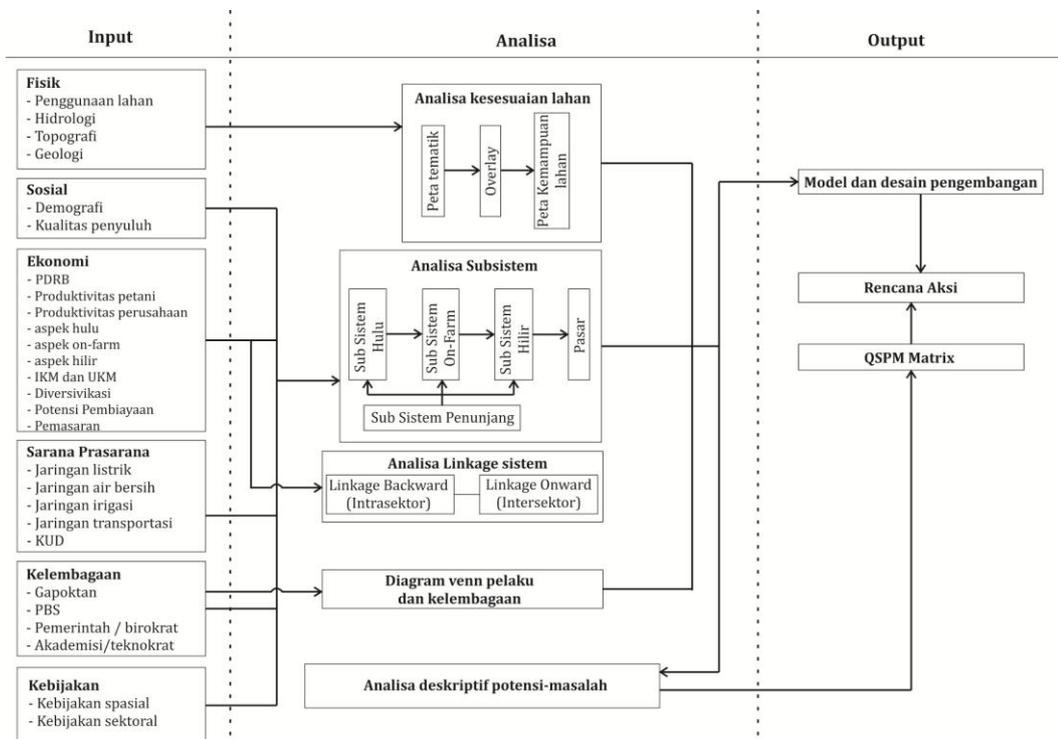
Gambar 3.2. Kerangka Pengembangan Berbasis Wilayah.

Sumber : Setyanto dan Irawan, 2016.



Gambar 3.3. Kerangka Interaksi Antar Wilayah.
Sumber : Setyanto dan Irawan, 2016.

Kerangka penyusunan masterplan yang menggambarkan kebutuhan data, proses analisa, hingga menghasilkan output berupa model desain pengembangan dan rencana aksi dapat dilihat pada **Gambar 3.4.**



Gambar 3.4. Kerangka Pemikiran *Master plan*.



BAB IV METODOLOGI

4.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, baik yang berkenaan dengan kebijakan dan regulasi maupun yang berkenaan dengan teori akademis. Beberapa kebijakan dan regulasi yang penting untuk dipelajari diantaranya :

- A. Kebijakan dan regulasi yang berkenaan dengan sistem perencanaan pembangunan perkebunan;
- B. Kebijakan dan regulasi yang berkenaan dengan pemerintahan daerah (Analisis kebijakan dan pembiayaan, analisis pelaku dan pemangku kepentingan);
- C. Kebijakan dan regulasi yang berkenaan dengan penataan ruang, dan lain sebagainya.

Beberapa teori akademis yang juga perlu dipelajari dan berkaitan dengan kegiatan ini diantaranya :

- A. Teori tentang pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan teori tentang ekonomi wilayah/ekonomi regional;
- B. Teori tentang perkebunan, khusus tanaman kelapa sawit;
- C. Data pendukung berupa data sekunder meliputi data Kalimantan Tengah Dalam Angka, Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, data PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat, data perkebunan kelapa sawit (PBS dan Perkebunan Rakyat).

Berbagai data primer dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan ini, diantaranya :

- A. Kondisi Existing (aspek kondisi umum wilayah, aspek kondisi agroekologis dan lingkungan, aspek gangguan produksi dan aspek pertanian) komoditas kelapa sawit pada lokasi studi.



- B. Potensi (luas areal existing dan luas areal pengembangan, produksi, produktivitas, tenaga kerja (SDM), aspek penduduk dan sosial budaya, aspek sarana dan prasarana, aspek kelembagaan, aspek pengolahan, perdagangan dan konsumsi perdagangan hasil perkebunan) tanaman kelapa sawit yang ada pada lokasi studi.
- C. Aspek Teknis.

4.2 Metode Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data

Studi literatur data dari berbagai referensi dilakukan untuk memperoleh data sekunder sedangkan survei lapangan dilakukan untuk mengumpulkan berbagai data primer yang dibutuhkan. Pada tahapan ini, dilakukan pemilahan jenis – jenis data yang telah diperoleh dari lapangan untuk kemudian dilakukan rekapitulasi dan selanjutnya dilakukan analisis.

4.2.1 Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan yaitu suatu metode untuk mengkaji substansi dan konsistensi dari suatu kebijakan, program, dan/atau perangkat hukum tertentu yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu. Dalam hal ini, analisis isi difokuskan untuk menganalisis berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang tertuang dalam berbagai dokumen pembangunan daerah dan peraturan-perundangan yang berlaku. Melakukan (*review*) terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah. Kajian dalam studi ini dilihat dari kebijakan spasial yang dilakukan terhadap semua dokumen kebijakan, strategi, dan program yang telah dimiliki dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah (RTRW, RDTR, RPJM, RPJP).

Analisis kebijakan bertujuan untuk melihat kesesuaian secara horizontal dan vertikal tentang informasi yang berkaitan dalam peraturan pemerintah. Dalam penyusunan master plan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kelapa sawit ini, analisis kebijakan digunakan untuk mengetahui peraturan-pemerintah (pusat dan daerah) serta isi di dalamnya yang terkait dengan penyusunan *master plan* ini.



Informasi yang didapatkan akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan master plan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kelapa sawit yang berkesesuaian dengan peraturan pemerintah. Analisis kebijakan dilakukan dengan perbandingan peraturan-peraturan secara horizontal (peraturan pemerintah dengan struktur pemerintahan sejajar) dan perbandingan peraturan-peraturan secara vertikal (peraturan pemerintah dengan struktur *top-down*).

4.2.2 Analisis Biofisik Sumberdaya Lahan

Analisis biofisik dan lingkungan mencakup analisis kesesuaian lahan, analisis kualitas air, analisis agroklimatologi, aksesibilitas, regional konteks, fisiografi, geologi, geomorfologi, topografi dan analisis potensi resiko bencana untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Analisis yang digunakan untuk mengetahui kelas kesesuaian lahan yang nantinya akan dikembangkan untuk perkebunan kelapa sawit adalah: menggunakan metode evaluasi kesesuaian lahan berdasarkan data sifat fisik tanah atau sumberdaya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala dari sifat-sifat tanahnya. Sebagai suatu ekosistem alam, lahan pertanian/perkebunan mempunyai komponen-komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Dalam perencanaan evaluasi lahan, terdapat beberapa kelompok parameter biofisik yang utama yang langsung dapat direpresentasikan dalam bentuk kekurangan untuk pengambilan keputusan berbasis ruang (*spatial decision making*), selain aspek ekonomi dan sosial budaya. Parameter tersebut meliputi:

1. Ketersediaan ruang (*space availability*), ini sudah termasuk luas, bentuk, jarak, potensi konflik fungsi dan status kawasan, dan lain-lain.
2. Kesesuaian ruang (*space suitability*), atau disebut sebagai kesesuaian lahan (*land suitability*). Dalam konteks perencanaan tata guna lahan secara luas, istilah tersebut bisa dalam konteks kesesuaian lahan, penggunaan/aktivitas pada tubuh air (misal untuk pengembangan kawasan wisata danau), atau zonasi pada wilayah pesisir dan laut, seperti zona alur (pelayaran atau

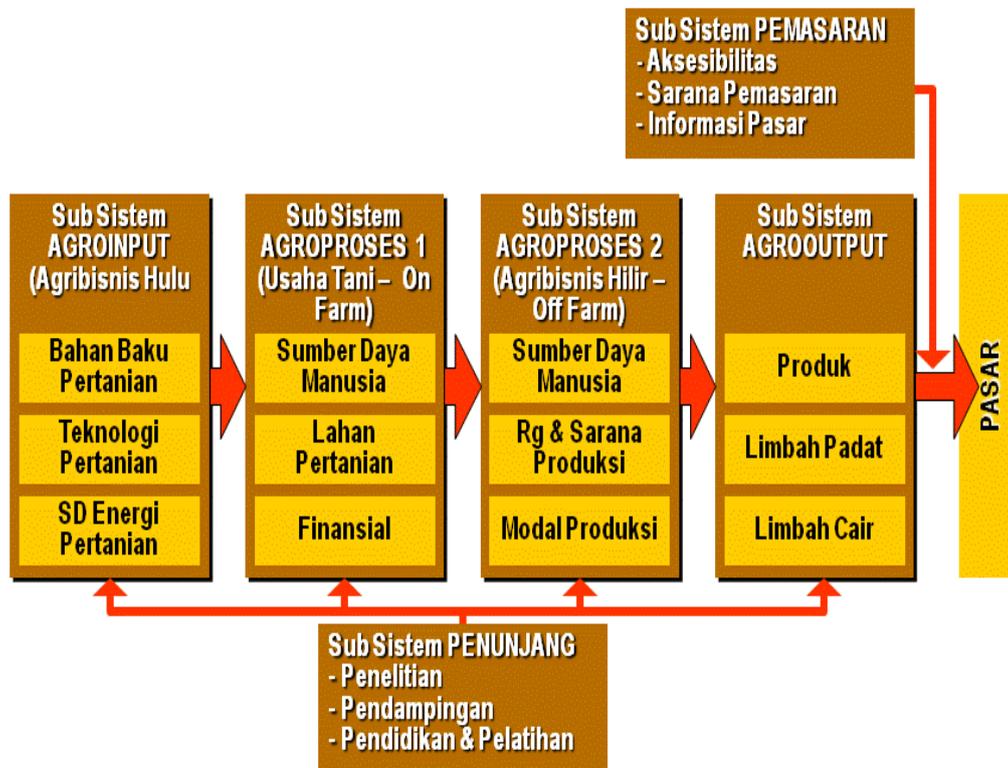


- pergerakan/migrasi spesies tertentu), zona perikanan lengkap, zona pemanfaatan, dan lain-lain (Mishra, 2007).
3. Kemudahan dikerjakan (*workability*), yakni sesulit atau semudah apa untuk direalisasikan, atau teknologi apa saja yang harus digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang direncanakan pada ruang tertentu untuk mencapai tujuan. Misalnya, untuk lahan perkebunan, unit lahan dengan presentasi batuan yang tinggi memiliki *workability* yang rendah.
 4. Kemudahan dilalui (*trafficability*) baik oleh manusia maupun kendaraan. Sebaik apapun kualitas ruang untuk penggunaan tertentu, pemanfaatannya akan ditentukan oleh kemudahan mencapai dan/atau melalui ruang tersebut.
 5. Keterjangkauan (*accessibility*), berarti jarak ditambah kemudahan untuk mencapai suatu ruang yang dipersiapkan untuk penggunaan tertentu. Namun, satuan lahan yang jaraknya dekat dapat saja memiliki aksesibilitas rendah jika terhadap hambatan (*barrier*).
 6. Teknologi yang tersedia dalam pengambilan keputusan secara keruangan. Saat ini teknologi komputer begitu berkembang sehingga keputusan secara spasial ditunjang oleh pemanfaatan teknologi digital. Sistem yang umum digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan secara spasial adalah *geographic information systems* (GIS) yang saat ini bahkan telah dikenal sebagai sistem penunjang keputusan spasial (*spatial decision support system*, SDSS).

4.2.3 Analisis Sub Sistem (Potensi Masalah)

Analisis sub system tanaman kelapa sawit digunakan untuk mengkaji karakteristik kegiatan pengembangan komoditas kelapa sawit pada masing-masing bagian. Bagian sub system yaitu sub system hulu (*up stream*), sub sistem usahatani (*on farm*), sub system hilir (*off farm*), sub sistem output, sub sistem pemasaran, serta sub system penunjang. Analisis secara detail melihat kondisi eksisting kegiatan pada masing-masing bagian sub sistem baik potensi maupun masalah yang dihadapi pada masing-masing bagian sub sistem sehingga

efektivitas pengembangan pada masing-masing bagian sub system dapat tercapai (Manik, 2013). Pembahasan pada masing-masing bagian sub sistem serta alur pembahasan analisis sub sistem dapat dilihat pada **Gambar 4.1**.

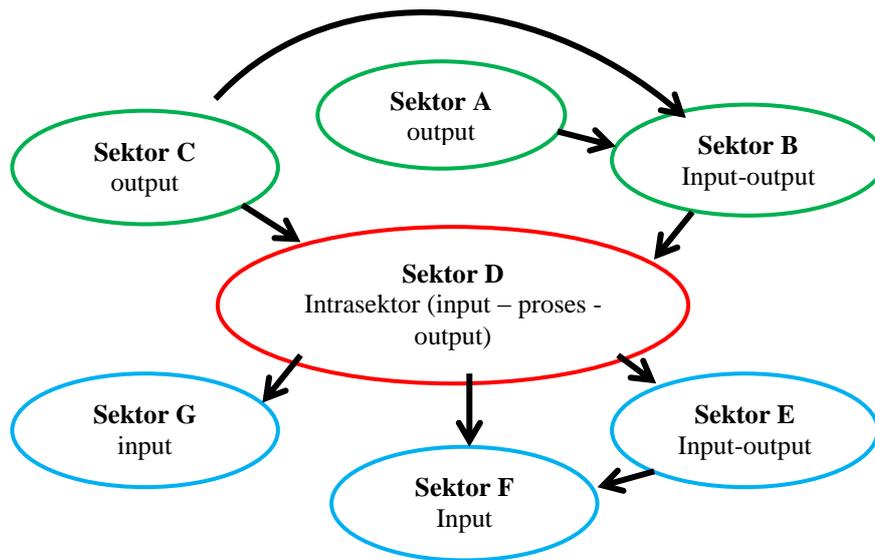


Gambar 4.1. Analisis Sub Sistem.

4.2.4 Analisis Linkage System

Analisis *linkage system* bertujuan untuk melibatkan hubungan dari berbagai kegiatan dalam perekonomian daerah yang luas. Berbagai rangkaian kegiatan dapat memberikan peluang-peluang produksi dari suatu kegiatan ke kegiatan lain di dalam perekonomian daerah, sehingga mengakibatkan pertumbuhan atau bahkan kemunduran suatu wilayah. *Linkage system* dapat berupa keterkaitan antara kegiatan hulu dan hilir. Berbagai teori tentang pendorong pertumbuhan daerah menekankan peranan permintaan output-output daerah dan rangkaian kegiatan atau sektor ekonomi yang mengarah ke muka (keterkaitan hilir), yaitu kaitan ke depan/*forward linkage* dan kaitan ke belakang/*backward linkage* (Manik, 2013).

Analisis linkage sistem antar komoditas dengan metode pembuatan Diagram *Linkage System*. Digram ini menggambarkan dan digunakan untuk menganalisis hubungan antar komoditas dalam segi produksi hingga pemasaran. **Gambar 4.2** berikut ini juga menggambarkan hubungan antar komoditas tersebut dalam pengembangan Kawasan. Selain itu juga dianalisis peran masing-masing komoditas serta tujuan pengembangannya.



Gambar 4.2. Ilustrasi Kerangka Keterkaitan Fungsional antar Sektor Analisis Spasial.

4.2.5 Forum Group Discussion (FGD)

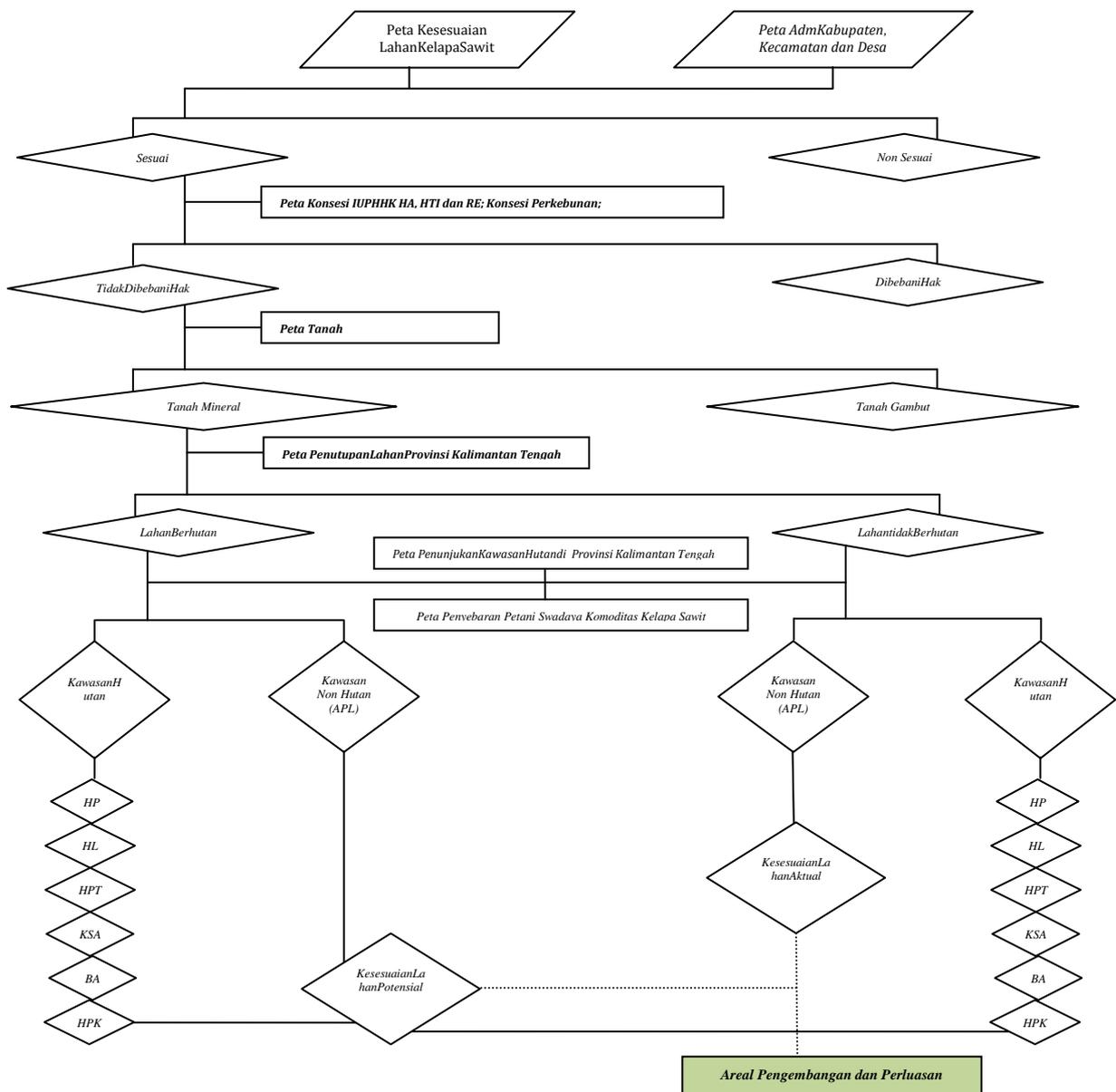
Diskusi bersama antara tenaga ahli dan pemangku kepentingan (Pemerintah provinsi, kabupaten, dan SKPD terkait) untuk melakukan pemaparan hasil analisis, pemaparan ide-ide, penilaian, serta kritik dan saran.

4.2.6 Overlay Peta

Dalam Penyusunan *Master plan* pengembangan kawasan berbasis komoditas Kelapa Sawit digunakan Metode Analisis Spasial yang dipadukan dengan Analisis Data Tabular. Langkah awal dari analisis spasial adalah mempersiapkan peta-peta dasar seperti : a) Peta Kesesuaian Lahan untuk



Komoditas Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah, b) Peta Konsesi IUPHHK HA, HTI dan RE; Konsesi Perkebunan; Konsesi Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah, c) Peta Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, d) Peta Penyebaran Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah e) Peta Penyebaran Petani Sawadaya Komoditas Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah, dan f) Peta Penutupan Lahan terbaru di Provinsi Kalimantan Tengah. Peta-peta yang telah ada dianalisis menggunakan *software ArcGIS 10.1*. Proses awal dilakukan dengan cara melakukan tumpang susun/*overlay* dari Peta Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Kelapa Sawit dengan Peta Administrasi Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Penyebaran Gambut, Konsesi dan Penutupan Lahan. Setelah itu dilakukan seleksi ruang antara kawasan hutan dan non hutan. Hasil akhir dari analisis keruangan adalah data tabular dan peta kawasan pengembangan komoditas Kelapa Sawit. Langkah kerja kegiatan bidang perkebunan ditampilkan pada **Gambar 4.3** di bawah ini.



Gambar 4.3. Bagan Alir Analisis Spasial Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016.

Keterangan : HP = Hutan Produksi; HPT = Hutan Produksi Terbatas; HL = Hutan Lindung; KSA = Konservasi Suaka Alam; HPK = Hutan Produksi yang dapat Dikonversi; APL = Areal Penggunaan Lain, dan BA = Badan Air dan Lainnya.



4.2.7 Diagram Venn

Keterkaitan seluruh lembaga dapat dilihat dari Diagram Venn yang menggambarkan besar hubungan antar lembaga. Ukuran lingkaran menandakan besarnya peranan lembaga tersebut, semakin besar ukuran lingkarannya, maka peranannya semakin besar dan demikian pula sebaliknya (Jabbar, 2009).

4.2.8 Qualitative Strategic Planning Matrix (QSPM)

Metode QSPM merupakan alat analisa yang digunakan untuk menentukan prioritas program penanganan. QSPM tergolong kedalam metode formulasi strategi, dan merupakan alat yang baik dalam menentukan alternative strategi diantara beberapa strategi yang ada (David *et al.*, 2009). Pada penilaian QSPM terdapat bobot dan *Attractiveness Score* (AS). Bobot merepresentasikan tingkat kepentingan dari strategi, sedangkan AS merepresentasikan pilihan dari pengambil keputusan terhadap strategi yang telah dirumuskan. Bobot dari masing-masing strategi akan ditentukan oleh ahli (pada studi kasus yaitu ahli dari universitas) dengan nilai total bobot = 1, sedangkan AS akan ditentukan oleh pengambil keputusan (pada studi kasus yaitu : Pemerintah Kota Palangka Raya) dengan rentang nilai 1-4. Hasil perhitungan bobot dan AS akan menghasilkan score total untuk masing-masing strategi, semakin tinggi score maka strategi tersebut merupakan strategi yang dianggap penting untuk dilaksanakan. Contoh proses analisa QSPM dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.



Tabel 4.1. Contoh Analisa QSPM.

Strategi	Bobot	AS	Total
Penentuan Jagung sebagai produk unggulan daerah (PUD)	0.15	4	0.6
Kerjasama pemerintah-universitas-pelaku usaha dalam pengembangan kawasan sentra jagung	0.05	4	0.2
Kerjasama pemerintah-universitas-pelaku usaha-investor dalam pengembangan produk olahan jagung	0.10	3	0.3
Kerjasama pemerintah-universitas dalam penyediaan kalender musim dan early warning system yang up to date	0.05	2	0.1
Program transmigrasi oleh pemerintah untuk meningkatkan regenerasi petani	0.05	1	0.05
Penyiapan generasi muda siap kerja pada sector pertanian melalui kerjasama pemerintah-universitas	0.05	2	0.1
Peningkatan peran penyuluh melalui pembinaan dari universitas	0.10	3	0.3
CSR dari investor dalam membantu percepatan pengadaan prasarana	0.02	1	0.02
Peningkatan hubungan penyuluh dengan keluarga petani untuk menjaring potensi regenerasi petani dari keluarga	0.03	1	0.03



BAB V

POTENSI WILAYAH KOMODITAS UNGGULAN DAN KAWASAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

5.1 Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Kalimantan Tengah

5.1.1 Luas Wilayah dan Letak Geografis

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah sekitar 1,5 kali pulau Jawa, yaitu seluas 8,04% dari luas daratan Indonesia, yaitu seluas 153.564 km² atau 15.356.400 ha. Adapun rincian sebagai berikut : kawasan hutan seluas 89.168 km² atau 58,07%, semak belukar seluas 37.743 km² atau 24,58%, rawa seluas 11.614 km² atau 7,57%, pertanian dan perkebunan seluas 10.797 km² atau 7,03%, perairan seluas 1.420 km² atau 0,93% dan tanah lainnya seluas 2.825 km² atau 1,84%. Secara geografis Provinsi Kalimantan Tengah terletak di garis Khatulistiwa pada posisi 111° – 113° Bujur Timur, 0°45' Lintang Utara, dan .3°30' Lintang Selatan.

5.1.2 Batas Wilayah Administrasi

Letak Provinsi Kalimantan Tengah berada di tengah Pulau Kalimantan dan berhadapan langsung dengan Laut dan Pulau Jawa. Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat dijadikan titik poros penghubung atau *interconnection* antara provinsi-provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Provinsi ini secara administrasi mempunyai batas wilayah yaitu : di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur, dan di sebelah selatan dengan Laut Jawa.

5.1.3 Kondisi Biofisik dan Iklim Wilayah

Berdasarkan interpretasi dan pengamatan langsung di lapangan, secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar merupakan dataran rendah. Sepanjang bagian selatan, tengah, barat, dan timur merupakan wilayah dengan topografi yang relatif datar. Pada bagian tengah



wilayah Kalimantan Tengah ini mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landai hingga kemiringan tertentu, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Bagian utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Proporsi dari areal-areal yang bertopografi sangat curam banyak dijumpai di daerah-daerah yang berada di kawasan atas, sebaliknya areal areal bertopografi agak curam terdapat di daerah daerah yang berada di kawasan bawah. Ketinggian berkisar antara 0 – 150 m dari permukaan laut (dpl). Kecuali sebagian kecil wilayah utara merupakan daerah perbukitan dimana terbentang pegunungan Muller-Schwanner dengan puncak tertingginya (Bukit Raya) mencapai 2.278 m dpl. Titik tertinggi wilayah Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang (Kabupaten Murung Raya) dengan ketinggian mencapai 1.220 m dpl. Areal yang bertopografi lebih curam banyak dijumpai di daerah-daerah yang berada di bagian utara, sebaliknya daerah yang bertopografi agak curam hingga curam terdapat di daerah-daerah yang berada di bagian tengah sampai dengan selatan.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang mempunyai iklim lembab dan panas, termasuk dalam tipe A dengan klasifikasi Kopen Afa. Wilayah ini rata-rata mendapat penyinaran matahari sekitar 56,18% per tahun. Udaranya relatif panas yaitu siang hari mencapai 33°C dan malam hari 23°C, sedangkan rata-rata curah hujan per tahunnya relatif tinggi, yaitu mencapai 331,68 mm dan rata-rata hari hujan 120 hari.

Berdasarkan data statistik Kalimantan Tengah (2016), Provinsi Kalimantan Tengah dilalui oleh 11 sungai besar dan 33 sungai kecil atau anak sungai yang mengalir dari bagian utara ke bagian selatan dan bermuara ke Laut Jawa. Sungai besar dan kecil ini, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas provinsi ini. Salah satu sungai besar dan terpanjang yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu : Sungai Barito memiliki panjang 900 km dengan rata-rata kedalaman 8 m dan mampu dilayari hingga 700 km. Keberadaan sungai-sungai



ini dapat dijadikan sebagai salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk berbagai keperluan untuk peningkatan PAD (ekonomi dan kepariwisataan).

Provinsi Kalimantan Tengah secara geologis terdiri dari 3 (tiga) satuan batuan yang berpotensi mengandung bahan galian tambang, yakni : 65% satuan batuan sedimen, 25% satuan batuan beku dan 10% satuan batuan metamorf. Di bagian utara Provinsi Kalimantan Tengah terkenal sebagai “*Borneo Gold Belt*”, karena terdapat satuan batuan beku yang mengandung berbagai jenis logam dasar, perak dan emas. Kalimantan Tengah juga memiliki 3 (tiga) cekungan besar yang berasal dari batuan sedimen, cekungan ini memiliki kandungan logam mulia dan logam dasar sekunder, batubara, bahan minyak serta gas bumi. Ketiga cekungan tersebut adalah cekungan Kutai, cekungan Melawi dan cekungan Barito. Jenis tanah terdiri dari Histosols, Ultisols, Inceptisols, Spodosols, dan Entisols.

5.1.4 Kependudukan

Jumlah penduduk Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2016 adalah berjumlah 2.495.035 jiwa, terdiri dari 1.192.239 jiwa perempuan atau 47,78% penduduk perempuan dan 1.302.796 jiwa laki-laki atau 52,21% penduduk laki-laki, dengan kepadatan penduduk 16 jiwa/km² yang terpusat di ibukota provinsi. *Sex ratio* adalah 109, berarti terdapat 109 laki-laki untuk 100 perempuan. Distribusi penduduk mencakup yang bertempat tinggal di perkotaan sebanyak 740.256 jiwa (33,46%) dan di daerah perdesaan sebanyak 1.471.833 jiwa (66,54%). Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja di provinsi ini sebesar 1.059.278 orang, dimana sejumlah 1.044.483 orang diantaranya bekerja dan 14.795 orang merupakan pencari kerja. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 69,50%, TPAC laki-laki 86,06% lebih tinggi dibanding TPAC perempuan yang hanya 51,28%. TPAC perkotaan lebih rendah dibandingkan TPAC perdesaan, yaitu 60,80% dan 73,99%.



Berdasarkan hasil analisis data sekunder serta pengamatan langsung di lapangan, secara umum kondisi wilayah (luas wilayah, kondisi lahan, keadaan biofisik dan agroklimat serta kependudukan) di atas, umumnya tidak menjadi kendala yang berarti bagi pengembangan usaha pertanian (perkebunan, peternakan, dan perikanan). Komoditi yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah komoditi perkebunan, yaitu : kelapa sawit, karet, kelapa, lada, kopi, kakao (dapat dikembangkan dalam skala besar), nila dan tebu (dapat dikembangkan dalam skala kecil).

5.2 Perkebunan Kelapa Sawit

5.2.1 Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit

Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan perluasan areal perkebunan kelapa sawit paling pesat di Indonesia. Dalam kurun waktu 18 tahun luas areal pertanaman perkebunan kelapa sawit meningkat sampai dengan 40%, dan cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Luas lahan perkebunan di Kalimantan Tengah sampai dengan tahun triwulan III tahun 2016 mencapai 1.933.852,87 ha atau 12,59% dibanding dengan luas wilayah Kalimantan Tengah. Sebanyak 64,97% dari luas lahan perkebunan tersebut atau seluas 1.411.018,00 ha merupakan luas areal yang dikembangkan untuk perkebunan kelapa sawit. Lihat **Tabel 1.1** pada **Bab I**.



Tabel 5.1. Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Kalimantan Tengah Berdasarkan Status Pengusahaan Tahun 1998 - 2015.

No.	Tahun	Perkebunan Rakyat		Perkebunan Swasta	
		Luas Lahan (ha)	Produksi CPO (ton)	Luas Lahan (ha)	Produksi CPO (ton)
1.	1998	10.641,00	7.437,00	139.721,00	150.362,00
2.	1999	24.301,00	8.582,00	167.030,00	148.331,00
3.	2000	29.771,00	16.053,00	167.030,00	149.537,00
4.	2001	29.960,00	20.762,00	187.706,00	172.306,00
5.	2002	33.328,00	34.779,00	187.706,00	211.145,00
6.	2003	51.352,00	70.502,00	190.263,00	217.576,00
7.	2004	95.389,00	113.988,00	192.306,00	260.469,00
8.	2005	99.741,00	198.811,00	218.642,00	319.823,00
9.	2006	112.838,00	249.268,00	312.445,00	425.283,00
10.	2007	114.223,00	274.479,00	312.508,00	428.648,00
11.	2008	98.548,00	156.834,00	360.259,00	625.454,00
12.	2009	108.719,00	188.327,00	727.356,00	1.609.775,00
13.	2010	134.511,00	218.257,00	814.780,00	1.506.411,00
14.	2011	147.046,00	213.303,00	874.552,00	1.902.142,00
15.	2012	267.746,00	224.042,00	988.698,00	1.589.264,00
16.	2013	131.057,00	229.963,00	967.935,00	2.896.793,00
17.	2014	136.947,00	245.413,00	1.018.986,00	3.066.605,00
18.	2015	146.276,51	231.469,54	1.264.741,90	4.239.831,94

Sumber : Statistik Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, 2016.

Sampai dengan tahun 2015 luas areal perkebunan kelapa sawit adalah seluas 1.411.018,41 ha, terdiri dari Perkebunan Rakyat (PR) seluas 146.276,51 ha atau 10,37% dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 1.264.741,90 ha atau sebesar 89,63%. Perkebunan Besar Swasta ini sebagian besar atau 89,43% dikelola dengan pola PIR-BUN, yakni pola kemitraan antara perusahaan inti dan petani plasma. Peningkatan luas areal cukup signifikan terjadi mulai tahun 2006-2012 dibandingkan peningkatan luas areal yang terjadi pada kurun waktu tahun 1998-2005. Perkembangan peningkatan luas areal, produksi dan produktivitas kelapa sawit disajikan pada **Tabel 5.2.**



Tabel 5.2. Perkembangan Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit Kalimantan Tengah Tahun 1998 - 2015.

No.	Tahun	Luas Lahan (ha)	Produksi TBS (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	1998	150.362,00	597.446,15	3,97
2.	1999	191.331,00	603.434,62	3,15
3.	2000	196.801,00	636.884,62	3,24
4.	2001	217.666,00	742.638,46	3,41
5.	2002	221.034,00	945.861,54	4,27
6.	2003	241.615,00	1.107.992,31	4,58
7.	2004	287.695,00	1.440.323,08	5,00
8.	2005	318.383,00	1.987.053,85	6,24
9.	2006	571.873,00	6.287.807,00	6,09
10.	2007	610.598,00	6.453.272,69	6,94
11.	2008	712.026,00	6.534.970,08	8,69
12.	2009	909.703,00	6.915.776,92	8,27
13.	2010	1.087.950,00	6.633.338,46	6,99
14.	2011	1.256.444,00	8.136.326,92	8,03
15.	2012	1.164.009,41	10.820.407,70	8,14
16.	2013	1.156.301,51	11.011.373,30	9,52
17.	2014	1.297.886,17	12.761.418,70	9,83
18.	2015	1.411.018,41	16.543.815,50	11,72

Sumber : Statistik Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, 2016.

5.2.2 Perkembangan Produksi Kelapa Sawit

Seiring dengan meningkatnya luas arealnya perkebunan kelapa sawit dari tahun ke tahun, maka dalam kurun waktu tersebut meningkat pula produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebagai produk utama kelapa sawit dan merupakan bahan baku pembuatan minyak sawit *crude palm oil* (CPO). Peningkatan produksi TBS kelapa sawit yang signifikan mulai terjadi pada tahun 2006 yakni sebesar 6.287.807 ton dan mencapai 16.543.815,50 ton (atau sebesar 163%) pada tahun 2015. Peningkatan yang signifikan terjadi baik pada Perkebunan Besar Swasta (PBS) maupun Perkebunan Rakyat (PR), hal ini seiring dengan meningkatnya luas areal dan produktivitas (lihat **Tabel 5.2**).



5.2.3 Perkembangan Produktivitas Kelapa Sawit

Berdasarkan **Tabel 5.2** di atas, peningkatan produktivitas kelapa sawit di Kalimantan Tengah selama tahun 1998-2015 menunjukkan pola yang cukup berfluktuasi. Produktivitas kelapa sawit tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu : sebesar 11,72 ton/ha, walaupun demikian jika dibandingkan dengan produktivitas kelapa sawit nasional sebesar 15 ton/ha maka produktivitas kelapa sawit Kalimantan Tengah masih relatif rendah.

5.2.4 Sentra Produksi Kelapa Sawit

Luas areal perkebunan dan produksi kelapa sawit di Kalimantan Tengah tersebar di seluruh di 14 kabupaten dan 1 kota. Sentra produksi kelapa sawit (dalam wujud minyak sawit atau CPO) terdapat di 5 (lima) kabupaten, yaitu : Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Sukamara, dengan kontribusi terhadap total produksi CPO di Provinsi Kalimantan Tengah (**Tabel 5.3**). Kabupaten Kotawaringin Timur berada di urutan pertama dengan kontribusi sebesar 37,96% disusul oleh Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kontribusi sebesar 23,28%, Seruyan sebesar 16,43%, Lamandau sebesar 5,14%, Katingan sebesar 4,53% dan Kapuas sebesar 4,27%.



Tabel 5.3. Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah Tahun 2015.

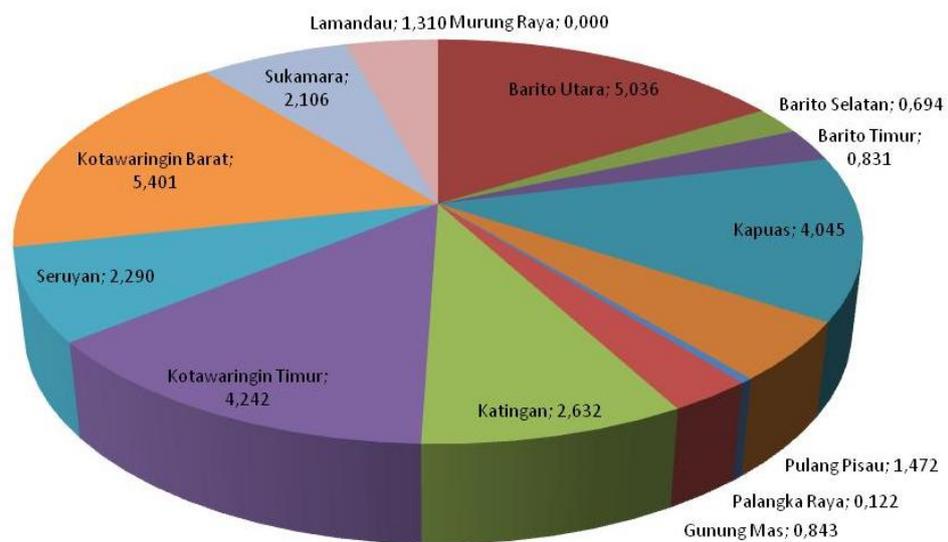
No.	Kab./Kota	Perkebunan Rakyat		Perkebunan Besar Swasta		Total Luas Area		Total Produksi		Produktivitas (ton/ha)
		Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	(ha)	(%)	(ton)	(%)	
1.	Murung Raya	68	0	0	0	68	0,005	0	0,000	0,000
2.	Barito Utara	2.616	6.214	22.870	122.124	25.486	1,805	128.338	2,870	5,036
3.	Barito Selatan	194	45	3.028	2.190	3.222	0,228	2.235	0,050	0,694
4.	Barito Timur	350	109	23.425	19.650	23.775	1,683	19.759	0,442	0,831
5.	Kapuas	1.225	183	45.869	190.313	47.094	3,335	190.496	4,260	4,045
6.	Pulang Pisau	2.045	498	40.284	61.798	42.329	2,997	62.296	1,393	1,472
7.	Palangka Raya	1.736	211	0	0	1.736	0,123	211	0,005	0,122
8.	Gunung Mas	1.175	0	40.789	35.381	41.964	2,971	35.381	0,791	0,843
9.	Katingan	16.522	10.859	60.365	191.505	76.887	5,444	202.364	4,526	2,632
10.	Kotawaringin Timur	22.408	22.890	377.737	1.674.615	400.145	28,334	1.697.505	37,963	4,242
11.	Seruyan	15.264	32.114	305.576	702.468	320.840	22,718	734.582	16,428	2,290
12.	Kotawaringin Barat	45.073	68.737	147.626	972.055	192.699	13,645	1.040.793	23,276	5,401
13.	Sukamara	12.790	35.097	47.942	92.794	60.732	4,300	127.891	2,860	2,106
14.	Lamandau	24.811	54.512	150.456	175.121	175.267	12,411	229.634	5,136	1,310
Kalimantan Tengah						1.412.243	100	4.471.485	100	3,166

Sumber : Data Tetap Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Nilai tambah suatu produk didukung dari produktivitas komoditi. Jadi dapat diartikan produktivitas adalah rasio dari total output dengan input yang dipergunakan dalam produk (Heady, 1952; Doll and Orazem, 1976; Halcrow, 1981; Samuelson dan Nordhaus, 1992, Pindyck, R.S and D.L. Rubinfeld, 2001). Lebih lanjut Pindyck, R.S and D.L. Rubinfeld (2001)

mengungkapkan bahwa pengukuran produktivitas input sebagai jumlah output per unit input, produktivitas tenaga kerja sebagai jumlah output per unit tenaga kerja. Heady (1952) menjelaskan bahwa berkenaan dengan lahan, produktivitas lahan berkesesuaian dengan kapasitas lahan untuk menyerap input produksi dan menghasilkan output dalam produksi pertanian.

Berdasarkan Gambar 5.1. terlihat ada 5 (lima) besar Kabupaten yang memiliki produktivitas tertinggi di Kalimantan Tengah, yaitu : Kabupaten Kotawaringin Barat menyumbang produktivitas tertinggi yakni sebesar 5,40 ton/ha, disusul oleh Kabupaten Barito Utara sebesar 5,03 ton/ha, Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 4,24 ton/ha, selanjutnya Kabupaten Kapuas sebesar 4,04 ton/ha, dan Kabupaten Katingan sebesar 2,63 ton/ha.



Gambar 5.1. Kabupaten Sentra Produksi Minyak Sawit/CPO di Kalimantan Tengah Tahun 2015.

Sumber : Statistik Perkebunan Kalimantan Tengah Diolah, 2016.



5.2.5 Pengembangan Industri Pengolahan TBS Kelapa Sawit/Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Pemasaran Hasil.

Total perkebunan besar kelapa sawit di Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2012 adalah 81 unit (78 unit yang sudah operasional dan 3 unit yang belum operasional) dan terdiri dari 9 unit sampai dengan ijin pelepasan kawasan hutan (IPKH) serta 74 unit sampai dengan hak guna usaha (HGU). Ada 48 unit perusahaan dari 78 unit perusahaan perkebunan besar kelapa sawit yang sudah operasional, yang sudah memiliki industri pengolahan TBS kelapa sawit/Pabrik Kelapa Sawit (PKS). PKS ini memproduksi minyak sawit mentah (CPO) dengan total kapasitas terpakai 2.875 ton TBS per jam. Dan ada 9 unit perusahaan yang memiliki pabrik minyak inti sawit (Palm Kernel Oil/PKO) dengan total kapasitas TBS sebesar 75,7 ton/jam. Ada satu unit pabrik minyak goreng sawit, dengan kapasitas terpasang 1500 ton CPO per hari, total kapasitas terpakai 1300 ton CPO per hari dan produksi minyak goreng (*Refenery*) sebesar 31.200 ton/bulan atau 374.400 ton/tahun, secara rinci disajikan pada **Tabel 5.4**. Sedangkan industri CPO yang menghasilkan barang jadi lainnya seperti, minyak goreng/makan, mentega atau margarine dan produk turunan lainnya masih belum ada. Karena salah satu persyaratan minimal untuk membangun 1 (satu) unit industri Hilir CPO tersebut adalah apabila telah tersedia kebun kelapa sawit yang sudah menghasilkan TBS kelapa sawit atau memproduksi TBS kelapa sawit secara optimal seluas 150 - 200 ha.

Produksi CPO telah di pasarkan ke pabrik industri hilir CPO yang berada di pulau Jawa, yaitu : Surabaya (Best Group), Semarang dan Jakarta (Astra Group), sedangkan yang berada di pulau Sumatera yaitu Medan, Belawan, Palembang, Pekanbaru dan Lampung (Sinar Mas Group, Salim Group, Raja Garuda Mas Group dan Asam Jawa Group). Produksi CPO juga diekspor keluar negeri.



Tabel 5.4. Jumlah Perusahaan dan Jumlah Pabrik Kelapa Sawit per Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2012.

Kabupaten	Jumlah Perusahaan (unit)	Jumlah PKS (unit)			Total Kapasitas (ton/jam)		
		CPO	PKO	MG	CPO	PKO	MG
Murung Raya	-	-	-	-	-	-	-
Barito Utara	1	1	1	-	80,0	15,0	-
Barito Selatan	1	-	-	-	-	-	-
Barito Timur	5	-	-	-	-	-	-
Kapuas	2	-	-	-	-	-	-
Pulang Pisau	1	-	-	-	-	-	-
Gunung Mas	2	-	-	-	-	-	-
Kotawaringin Timur	25	15	3	-	830,0	20,4	-
Seruyan	12	11	3	-	750,0	19,6	-
Katingan,	-	2	-	-	60,0	-	-
Kotawaringin Barat	18	14	4	1	810,0	20,7	1300
Lamandau	4	2	-	-	120,0	-	-
Sukamara	1	3	-	-	180,0	-	-
KotaPalangka Raya	-	-	-	-	-	-	-
Lintas kabupaten/Kota	9	-	-	-	-	-	-
Jumlah	81	50	11	1	2.875,0	75,7	1300

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, 2013.

5.3 Aspek Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

5.3.1 Letak Administrasi dan Geografis

Wilayah kajian secara umum berada di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu : a) Kecamatan Arut Utara, b) Kecamatan Pangkalan Lada, c) Kecamatan Kumai dan d) Kecamatan Kotawaringin Lama. Secara geografis wilayah kajian berada pada 1° 33' 43.45" - 3° 31' 59.21" LS dan 111° 15' 52.71" - 112° 5' 22.13" E.

5.3.2 Batas Wilayah

Batas wilayah kajian Masterplan Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit jika dilihat berdasarkan administrasi wilayah, berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, Kecamatan Menthobi Raya, Sematu Jaya dan Bulik Kabupaten Lamandau, Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara.
- Bagian Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.



- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Tengah, Hanau Danau Sembuluh dan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.
- Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Balai Riam dan Sukamara Kabupaten Sukamara.

5.3.3 Administrasi Pemerintahan

Wilayah kajian *Master plan* kawasan berbasis komoditas kelapa sawit jika dilihat dari 4 (empat) kecamatan dengan 56 desa. Desa yang terluas adalah wilayah Desa Teluk Pulai dengan luas 84.135,9 ha atau 14,4% dari seluruh wilayah kajian. Sedangkan wilayah terkecil ada pada administrasi Desa Candi dengan luas 378,6 ha atau 0,1 dari luas kajian. Distribusi luasan berdasarkan administrasi Kecamatan dan Desa di wilayah kajian ditampilkan pada **Tabel 5.5**.

Tabel 5.5. Distribusi Luasan Berdasarkan Administrasi Kecamatan dan Desa di Wilayah Kajian *Master plan* Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit.

Nama Desa	Kecamatan (ha)				Grand Total (ha)	%
	Arut Utara	Kotawaringin Lama	Kumai	Pangkalan Lada		
Babual Baboti		11.903,0			11.903,0	2,0
Batu Belaman			4.071,8		4.071,8	0,7
Bumi Harjo			1.619,2		1.619,2	0,3
Candi			378,6		378,6	0,1
Dawak		2.675,6			2.675,6	0,5
Gandis	7.826,7				7.826,7	1,3
Ipuh Bangun Jaya		4.091,3			4.091,3	0,7
Kadipi Atas				1.864,2	1.864,2	0,3
Kerabu	8.840,1				8.840,1	1,5
Keraya			5.476,8		5.476,8	0,9
Kinjil		1.251,0			1.251,0	0,2
Kondang		7.274,7			7.274,7	1,2
Kota Waringin Hilir		32.857,6			32.857,6	5,6
Kotawaringin Hulu		13.550,9			13.550,9	2,3
Kubu			8.459,0		8.459,0	1,4
Kumai Hilir			4.527,2		4.527,2	0,8
Kumai Hulu			8.815,5		8.815,5	1,5
Lada Mandala Jaya				3.819,6	3.819,6	0,7



Nama Desa	Kecamatan (ha)				Grand Total (ha)	%
	Arut Utara	Kotawaringin Lama	Kumai	Pangkalan Lada		
Lalang		6.373,2			6.373,2	1,1
Makarti Jaya				1.849,5	1.849,5	0,3
Nanga Mua	33.991,0				33.991,0	5,8
Palih Baru		1.503,1			1.503,1	0,3
Pandau	11.766,3				11.766,3	2,0
Pandu Sanjaya				7.565,2	7.565,2	1,3
Pangkalan Dewa				2.868,9	2.868,9	0,5
Pangkalan Durin				2.334,4	2.334,4	0,4
Pangkalan Satu			1.485,4		1.485,4	0,3
Pangkalan Tiga				3.146,2	3.146,2	0,5
Pangkut	23.050,3				23.050,3	3,9
Penahan	40.220,4				40.220,4	6,9
Penyombaan	11.202,4				11.202,4	1,9
Purbasari				1.192,2	1.192,2	0,2
Riam	12.288,1				12.288,1	2,1
Riam Durian		3.968,4			3.968,4	0,7
Rungun		5.110,2			5.110,2	0,9
Sakabulin		6.221,6			6.221,6	1,1
Sambi	9.663,2				9.663,2	1,7
Sebuai			10.954,9		10.954,9	1,9
Suka Makmur		3.673,4			3.673,4	0,6
Sukajaya		1.749,5			1.749,5	0,3
Sukamulya		2.308,8			2.308,8	0,4
Sukarami	6.038,5				6.038,5	1,0
Sumber Agung				3.288,0	3.288,0	0,6
Sumber Mukti		1.627,6			1.627,6	0,3
Sungai Bakau			7.870,9		7.870,9	1,3
Sungai Bedaun			20.713,2		20.713,2	3,5
Sungai Cabang			47.234,6		47.234,6	8,1
Sungai Dau	5.181,7				5.181,7	0,9
Sungai Kapitan			5.167,7		5.167,7	0,9
Sungai Melawen				1.493,5	1.493,5	0,3
Sungai Rangit Jaya				3.650,1	3.650,1	0,6
Sungai Sekonyer			56.870,6		56.870,6	9,7
Sungai Tendang			1.269,5		1.269,5	0,2
Teluk Bogam			5.002,7		5.002,7	0,9
			84.135,9		84.135,9	14,4



Nama Desa	Kecamatan (ha)				Grand Total (ha)	%
	Arut Utara	Kotawaringin Lama	Kumai	Pangkalan Lada		
Teluk Pulai						
Tempayang		926,3			926,3	0,2
Grand Total	170.068,7	107.066,2	274.053,5	33.071,8	584.260,2	100,0

Sumber : Data Diolah Tahun 2016.

5.3.4 Jenis Tanah

Jika dilihat berdasarkan jenis tanah, maka di wilayah kajian jenis tanah utama adalah Tropodults dengan luas 211.367,4 ha atau 36,82% dari wilayah kajian. Sedangkan jenis tanah terkecil ada jenis tanah Tropohents dengan luas hanya 32,8 ha atau 0,01% dari wilayah kajian.

Tabel 5.6. Distribusi Luasan Berdasarkan Jenis Tanah dan Kecamatan di Wilayah Kajian *Master plan* Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit.

Jenis Tanah		Kecamatan (ha)				Grand Total (ha)	%
		Arut Utara	Kotawaringin Lama	Kumai	Pangkalan Lada		
Inceptisols	Dystropepts	9.934,0				9.934,0	1,73
	Tropaquepts	30.901,4	15.952,1			46.853,5	8,16
Entisols	Ustipsamments		26.157,3	85.648,4	339,9	112.145,6	19,54
	Fluvaquents		3.913,3	18.600,3		22.513,6	3,92
	Hydraquents			9.717,2	5.775,6	15.492,8	2,70
	Tropopsamments		32.030,2	7.769,2		39.799,4	6,93
	Troportents	32,8				32,8	0,01
Spodosols	Placaquods			80.259,3		80.259,3	13,98
Histosols	Troposaprists		1.155,5	16.473,2	658,2	18.286,9	3,19
Ultisols	Hapludults	129.200,9	25.876,5	30.413,2	25.876,8	211.367,4	36,82
	Not known			17.338,6		17.338,6	3,02
	Grand Total	170.069,1	105.084,9	266.219,4	32.650,5	574.023,9	100,00

Sumber : Data Diolah Tahun 2016.

5.3.5 Kawasan Hutan

Jika dilihat berdasarkan fungsi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka di wilayah kajian terbanyak pada fungsi kawasan hutan Hutan Produksi (HP) dengan luas 203.768,4 ha atau 34,88% dari wilayah kajian.



Wilayah terkecil ada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas 259,9 ha atau 0,04% dari wilayah kajian.

Tabel 5.7. Distribusi Luasan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan dan Kecamatan di Wilayah Kajian *Master plan* Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit.

Fungsi Kawasan	Kecamatan (ha)				Grand Total (ha)	%
	Arut utara	Kotawaringin Lama	Kumai	Pangkalan Lada		
APL	32.477,0	22.066,3	55.055,7	27.541,8	137.140,8	23,47
BADAN AIR		1.006,1	4.043,2	773,8	5.823,1	1,00
HP	129.081,3	42.994,5	31.644,9	47,7	203.768,4	34,88
HPK	8.250,5	33.160,2	16.014,4	4.708,4	62.133,5	10,64
HPT	259,9				259,9	0,04
KAWASAN KONSERVASI			531,9		531,9	0,09
KSA/KPA		7.839,4	166.720,8		174.560,2	29,88
Grand Total	170.068,7	107.066,5	274.010,9	33.071,7	584.217,8	100,00

Sumber : Data Diolah Tahun 2016.

5.3.6 Sistem Lahan

Jika dilihat berdasarkan fungsi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka di wilayah kajian terbanyak pada fungsi kawasan Hutan Produksi.

5.4 Ekonomi dan Perekonomian

Sektor perkebunan merupakan sektor dominan yang mempengaruhi perekonomian masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dan harga konstan menunjukkan sektor pertanian (termasuk didalamnya perkebunan), kehutanan, dan perikanan serta sektor industri pengolahan, termasuk pula didalamnya industri pengolahan sektor perkebunan menempati posisi teratas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (**Tabel 5.8**).



Tabel 5.8. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Kotawaringin Barat.

LAPANGAN USAHA	2012	2013*	2014**	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2 732 704,72	3 010 372,88	3 373 465,74	2 355 547,22	2 506 733,14	2 685 321,10
2. Pertambangan & Penggalian	165 002,90	177 785,01	166 619,72	140 985,43	149 113,18	129 436,48
3. Industri Pengolahan	2 223 038,08	2 529 594,31	2 978 467,82	2 061 316,33	2 206 070,85	2 356 462,89
4. Pengadaan Listrik dan Gas	3 453,01	3 545,07	4 192,34	3 694,07	4 239,28	4 663,03
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	7 574,29	8 311,75	10 181,77	7 152,36	7 570,53	8 621,59
6. Konstruksi	748 255,69	853 762,51	986 688,59	697 799,95	767 190,17	825 204,57
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 092 119,69	1 193 026,32	1 392 026,03	1 007 960,58	1 050 803,65	1 114 752,88
8. Transportasi dan Pergudangan	683 899,14	802 796,53	921 626,21	646 977,03	716 265,19	753 850,43
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	115 987,65	131 013,34	144 358,24	99 906,53	106 934,36	117 107,97
10. Informasi dan Komunikasi	90 458,86	102 598,99	116 329,32	88 770,99	94 448,96	102 192,51
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	429 195,81	496 777,64	602 773,60	367 448,69	399 816,90	466 937 71
12. Informasi dan Komunikasi	165 177,50	185 896,04	201 975,11	143 252,02	154 668,57	169 990,52
13. Real Estate	4 115,26	4 877,20	5 732,51	3 672,62	4 036,34	4 357,27
14. Jasa Perusahaan	283 222,53	331 890,48	375 913,97	242 866,10	259 908,43	287 129,90
15. Real Estate	237 629,59	252 987,12	263 344,70	2 355 547,22	2 506 733,14	2 685 321,10
16. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2 732 704,72	3 010 372,88	3 373 465,74	140 985,43	149 113,18	129 436,48
17. Jasa Pendidikan	165 002,90	177 785,01	166 619,72	205 619,38	209 004,18	213 313,17
18. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102 504,00	111 058,53	130 909,94	91 312,55	96 579,88	101 046,56
19. Jasa Lainnya	84 621,46	96 714,74	106 819,20	74 812,11	78 981,23	84 579,09
PDRB	9 168 960,18	10 293 008,44	11 781 424,82	8 239 293,94	8 812 362,85	9 424 987,66

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat

Tinjauan sektor perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih spesifik menunjukkan dominasi komoditi kelapa sawit dalam aspek luasan lahan dan produktivitas (**Tabel 5.8**). Hal ini telah sejalan dengan arahan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai wilayah strategis sentra produksi kelapa sawit Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan lokasi perkebunan, komoditi kelapa sawit diusahakan oleh masyarakat dan perusahaan secara menyebar di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Kotawaringin Barat. Kecamatan dengan luas areal lahan dan hasil produksi terbesar komoditi kelapa sawit yaitu Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Kotawaringin Lama (**Tabel 5.9**).



Tabel 5.9. Luas Lahan dan Hasil Produksi Masing-Masing Komodi Sektor Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

No.	Komoditi	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Aren	49,05	2,88	0,058716
2	Jambu mete	21	1	0,047619
3	Karet	15.687	5.444,56	0,347075
4	Kelapa	805,22	185,7	0,23062
5	Kelapa sawit (Rakyat)	43.280,79	(TBS)59.661,74	1,378481
6	Kopi	132,26	16,06	0,121427
7	Lada	603,24	219,63	0,364084
8	Kelapa sawit (Perusahaan)	130.263,56	<ul style="list-style-type: none"> • 2.513.075,33 (TBS) • 690.193,48 (CPO) • 123.086,36 (Kernel) • 49.509,02 (PKO) 	19,29224
9	Karet (Perusahaan)	2.220	2.174,66	0,979577
Total		193.061,51	2.580.781,56	22,81983

Sumber : Perkebunan Dalam Angka 2013-2014.

Tabel 5.10. Luas Lahan dan Hasil Produksi Komoditi Kelapa Sawit per Kecamatan.

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Arut Selatan	4.137,81	6.646,77
2	Kumai	5.795,13	8.372,91
3	Arut Utara	633,69	564,74
4	Kotawaringin Lama	18.141,38	19.180,5
5	Pangkalan Banteng	1.315	1.804,8
6	Pangkalan Lada	13.257,78	23.092,02
Total		43.280,79	59.661,74

Sumber : Perkebunan Dalam Angka 2013-2014.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa produktivitas komoditi kelapa sawit yang diusahakan oleh masyarakat dan perusahaan memiliki gap yang sangat tinggi. Peningkatan produktivitas kelapa sawit terutama yang diusahakan oleh masyarakat perlu ditingkatkan. Dalam menganalisa potensi dan permasalahan terkait proses produksi kelapa sawit oleh masyarakat akan digunakan analisa *sub-system*. Kemudian akan digunakan pula analisa *linkage system* dalam mengoptimalkan aspek *onward* dan *backward* hasil produksi kelapa sawit, baik oleh masyarakat maupun oleh perusahaan.



5.5 Kependudukan dan Sosial Budaya

Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 253 ribu jiwa pada tahun 2012. Angka ini terus meningkat dan pada tahun 2014 mencapai 269.629 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Selama periode 2012-2014 tingkat pertumbuhan penduduk tercatat mengalami penurunan dengan besaran kenaikan tahun 2014 terhadap tahun 2013 sebesar 3,23 % (BPS Kabupaten Kobar, 2015). Indikator kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada **Tabel 5.11**.

Tabel 5.11. Indikator Kependudukan.

Indikator	2012	2013	2014
Jumlah penduduk (jiwa)	253.000	261.000	269.629
Pertumbuhan (%)	3,31	3,24	3,23
Sex ratio L/P (%)	22,78	24,28	25,06
Jumlah rumah tangga	112,41	112,36	112,5
Rata-rata ART (Jiwa/Ruta)	3,78	3,81	3,8
Penduduk menurut umur (%)			
0-14	30	28,31	27,92
15-64	67,82	69,07	69,41
>65	2,17	2,61	2,66
Statistik ketenagakerjaan			
TPAK (%)	70,75	67,62	70,05
Tingkat pengangguran (%)	2,36	3,65	2,66
Bekerja (%)	97,19	96,32	97,34
UMK (Rp)	1.401.101	1.538.244	1.789.066

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kotawaringin Barat Tahun 2014 menduduki peringkat ke-2 se-Kalimantan Tengah setelah Kota Palangka Raya. Meningkatnya angka IPM sejalan dengan menurunnya prosentase penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2011 prosentase penduduk miskin sebesar 6,19 % turun menjadi 5,64 % pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 % kemiskinan sedikit turun menjadi 5,44 % (**Tabel 5.8**). Meskipun hal tersebut merupakan hasil yang menggembirakan tapi pemerintah daerah harus tetap berupaya meningkatkan program kesejahteraan masyarakat.



Tabel 5.12. Statistik Kemiskinan

Uraian	2011	2012	2013
Garis kemiskinan (Rp)	238.987	268.998	273.467
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	16,5	14,1	14,3
%tase penduduk miskin (%)	6,19	5,64	5,44

5.6 Aspek Sarana dan Prasarana Penunjang

Aspek sarana dan prasana penunjang akan dibahas secara spesifik untuk komoditi kelapa sawit berdasarkan kondisi eksisting di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum. Pembahasan secara spesifik menitik beratkan pada pengusahaan komoditi kelapa sawit oleh petani rakyat, petani plasma, dan Perusahaan Besar Swasta (PBS).

A. Bibit

Penyediaan bibit bagi petani rakyat dibeli secara swadaya kepada kelompok tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), KUD, maupun perusahaan. Terdapat 2 (dua) pilihan bibit yaitu bibit tersertifikasi (memenuhi ISPO) dan tidak tersertifikasi. Penggunaan bibit tidak tersertifikasi bagi petani rakyat lebih memungkinkan mengingat harga yang lebih murah dibandingkan dengan bibit tersertifikat. Penyediaan bibit bagi petani plasma dijamin oleh PBS sehingga jumlah dan kualitasnya telah sesuai untuk mencapai ISPO.

B. Pupuk dan pestisida

Secara eksisting, penggunaan pupuk dan pestisida oleh petani rakyat tidak dilakukan secara benar (kualitas dan kuantitas). Hal ini terjadi karena keterbatasan petani rakyat dalam membeli pupuk dan pestisida walaupun dalam penyediaan, pupuk dan pestisida dapat dibeli di KUD maupun perusahaan. Terkadang penggunaan pupuk dan pestisida hanya dilakukan bila terdapat bantuan dari pemerintah. Bagi petani plasma, penggunaan pupuk dan pestisida sudah dilakukan sesuai ISPO karena penyediaan dijamin oleh perusahaan.



C. Peralatan dan Perangkutan

Alat pertanian tradisional baik pada masa pra tanam, tanam, hingga pasca tanam masih digunakan oleh petani rakyat maupun petani plasma. Namun, petani plasma selain penggunaan alat pertanian tradisional, terdapat dukungan alat pertanian modern seperti *compactor*, *excavator*, *grader*, *bulldozer*, *farm tractor*, dan *back hoe loader*. Demikian pula dalam perangkutan hasil produksi, hasil produksi petani plasma dijamin untuk langsung diangkut tepat waktu oleh truk pengangkut perusahaan. Sedangkan petani rakyat mengandalkan pedagang pengumpul untuk mengambil hasil produksi.

D. Infrastruktur

Jaringan infrastruktur jalan pada Kecamatan Kotawaringin Barat khusus yang terkait dengan pengembangan sektor perkebunan komoditi kelapa sawit yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu :

Jaringan jalan tersebut meliputi :

Jaringan jalan arteri primer (penghubung PKN-PKN) jalan lintas Kalimantan poros selatan meliputi :

- A. Ruas jalan Kujan – Runtu – Simpang Runtu;
- B. Ruas jalan batas Kota Pangkalan Bun – Pangkalan Lada – Asam Baru;
- C. Ruas jalan Ahmad Yani, jalan Pakunegara; dan
- D. Ruas jalan Akses Pelabuhan Tanjung Kalap.

Jaringan jalan kolektor primer K1 (penghubung PKW ke PKN) jalan penghubung antar jalan lintas Kalimantan meliputi Batas Kota Pangkalan Bun – Kumai, jalan Pangeran Diponegoro – Jalan Iskandar, sepanjang 17 km.

Jaringan jalan kolektor primer K2 (penghubung PPK ke PKW atau PKW ke PKL), menghubungkan jalan penghubung antar lintas kabupaten meliputi :

- A. Ruas jalan Pangkalan Bun – Kumai – Teluk Bogam sepanjang 67 km.
- B. Ruas jalan Teluk Bogam - Sebuai termasuk Keraya - Sebuai Timur dan Keraya - Sebuai.



- C. Ruas jalan Riam Durian – Kinjil - Dawak – Sukajaya – Batas Sukamara.
D. Ruas jalan Riam Durian – Tempayung – Babual Beboti – Batas Sukamara.
Jaringan jalan kolektor primer K3 (penghubung PPK ke PKL atau PPK ke PPK) meliputi :
- A. Ruas jalan Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama – Riam Durian, sepanjang 60,5 km;
 - B. Ruas jalan Pangkalan Bun – Seberang Gajah – Lunci – Kuala Jelai, sepanjang 256,9 km;
 - C. Ruas jalan Natai Raya – Kumai, sepanjang 12 km;
 - D. Ruas jalan Sungai Kapitan – Kubu;
 - E. Ruas jalan Semanggang – Pangkut – Sungai Dau – batas Seruyan, sepanjang 98,93 km;
 - F. Ruas jalan Iskandar – Bandar Udara Iskandar; dan
 - G. Ruas jalan Iskandar – Sungai Tendang, sepanjang 15 km;
 - H. Ruas jalan Alternatif Ring Road Kota Pangkalan Bun.

Jaringan jalan khusus, meliputi :

- A. Ruas jalan khusus Nanga Mua – Semanggang, sepanjang 53,42 km;
- B. Ruas jalan khusus Rangda – Sei Rangit Jaya, sepanjang 51,80 km;
- C. Ruas jalan khusus Semanggang – Pabrik Pulp, sepanjang 18,80 km;
- D. Ruas jalan khusus Semanggang – Sei Rangit Jaya, sepanjang 25,90 km;
- E. Ruas jalan khusus Sei Rangit Jaya – Bumiharjo, sepanjang 8,43 km; dan
- F. Ruas jalan khusus jalan masuk dari Seruyan, sepanjang 39 km.

Jaringan jalan menuju pelabuhan, bandara, ibukota kecamatan dan jalan alternatif lingkar kota di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan lebar antara 60 m sampai dengan 100 m.

Irigasi di Kabupaten Kobar terbagi atas 2 (dua) penanganan, yaitu penanganan oleh Provinsi yang berada di Desa Kumpai Batu, Kecamatan Arut Selatan dengan luas hamparan 1.500 ha, dan penanganan oleh Kabupaten. Penanganan oleh kabupaten yang berkesesuaian dengan pengembangan sektor



perkebunan komoditi kelapa sawit yaitu di Kondang atau Sagu, Suka Mulya terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama dengan luas pelayanan 200 ha.

Sarana pendukung pengembangan strategis sub sektor perkebunan lainnya adalah bandara, pelabuhan, KUD, dan PBS. Secara eksisting keberadaan bandara penumpang dan pelabuhan laut berada di Kecamatan Kumai, KUD Tani Subur sebagai lembaga penyokong petani rakyat berada di Kecamatan pangkalan lada. PBS berada tersebar di Kabupaten Kotawaringin Barat, salah satu PBS dengan luas areal tanam terbesar berada di Kecamatan Kotawaringin Lama.

Aspek informasi mengenai Kabupaten Kotawaringin Barat, terutama mengenai pengembangan strategis perekonomian belum terakomodir secara formal. Website Kabupaten Kobar masih sangat minim informasi terutama yang berkaitan dengan pengembangan sub sektor perkebunan komoditi kelapa sawit secara *factual* dan *real time*.

5.7 Aspek Pengolahan, Perdagangan, dan Konsumsi Hasil

A. Pemasaran

Pemasaran hasil produksi petani rakyat sangat tergantung dengan pedagang pengumpul. Hal ini disebabkan keterbatasan petani rakyat untuk mengangkut hasil produksi serta hasil produksi yang kualitasnya tidak sesuai dengan standard perusahaan. Walaupun terdapat KUD tani subur yang bersedia membeli hasil produksi petani rakyat, namun masih terbatas pada Kecamatan Pangkalan Lada dan belum semua petani menjadi anggota. Keterbatasan ini juga berdampak pada penentuan harga hasil produksi petani rakyat yang rendah. Pemasaran hasil produksi petani plasma dijamin oleh perusahaan dikarenakan kualitas hasil produksi yang telah memenuhi standard. Harga hasil produksi petani plasma pun dihargai tinggi oleh perusahaan sehingga petani plasma mendapat keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan petani rakyat.



B. Produk dan limbah

Produk perkebunan kelapa sawit petani rakyat dan petani plasma adalah berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang kemudian oleh perusahaan diolah menjadi produk *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel Oil* (PKO), dan minyak goreng. Hanya sebagian petani yang telah memanfaatkan limbah tandan kelapa sawit sebagai bahan pembuatan kompos. Terdapat lebih dari 40 jenis produk turunan dari kelapa sawit (di luar 3 produk di atas) yang belum dikembangkan oleh industri kelapa sawit PBS Kabupaten Kotawaringin barat.

5.8 Aspek Kebijakan

Aspek kebijakan dibahas untuk mendelineasikan arahan dan program dari kebijakan terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan sub sektor perkebunan, dan secara khusus mengenai komoditi kelapa sawit sebagai komoditi unggulan Kabupaten Kobar. Kebijakan yang akan dikaji dalam analisa ini yaitu batang tubuh rancangan peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2015-2034 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2012-2016. Pembahasan aspek kebijakan dapat dilihat pada **Tabel 5.13** dan **Tabel 5.14**.

Tabel 5.13. Delineasi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap *Master plan*.

No.	Muatan
1	Strategi pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan, meliputi : <ul style="list-style-type: none">• Mendorong pengembangan perkebunan rakyat yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta pembangunan yang berkelanjutan melalui fasilitas dan pembinaan pemerintah daerah;• Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agrobisnis);• Membentuk kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan yang lebih profesional;



No.

Muatan

- Meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan lebih efektif;
 - Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan;
 - Mendorong pengembangan produksi pertanian yang bernilai ekonomi tinggi;
 - Mewujudkan pemasaran produk hasil pertanian yang berkesinambungan; dan
 - Mewujudkan sistem agroindustri terpadu dari hulu sampai hilir demi peningkatan ekonomi masyarakat petani.
- 2 Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 124.810 ha yang tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai;
- 3 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
- Kawasan perkebunan meliputi :
 - Perkebunan kelapa sawit berada di **Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada;**
 - Perkebunan karet berada di Kecamatan Pangkalan Banteng dan **Pangkalan Lada;**
 - Perkebunan lada berada di Kecamatan **Pangkalan Lada;**
 - Perkebunan jagung berada di Kecamatan **Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng.**
 - Kawasan terpadu industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara berupa kawasan sentra produksi berada di Pangkalan Bun – Kumai, kawasan sentra produksi Pandu Sanjaya – Karang Mulya (Pakam), kawasan sentra produksi Pangkut, kawasan pelabuhan meliputi : pelabuhan Tanjung Kalap/CPO Bumiharjo dan pelabuhan Ro-ro berada di Kecamatan Kumai, Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun dan rencana pembangunan Bandar Udara baru berada di Desa Sembuai;
- 4 Indikasi program terkait perkebunan:
- Jalan Angkutan khusus (pertambangan, perkebunan dan kehutanan):
1) Nanga Mua – Semanggang - pabrik Pulp; 2) Rangda – Sungai Rangit Jaya – P. BumiHarjo; 3) Rantau Pulut/Seruyan – Semanggang – S. Rangit Jaya - P. Bumi Harjo waktu belum ditentukan.
 - Penyediaan pusat/fasilitas pendidikan yang berorientasi pengembangan pengetahuan dan keterampilan pengusaha tanaman tahunan/perkebunan pada Kecamatan Arut Utara dimulai pada semester kedua tahun 2020.



Tabel 5.14. Delineasi RPJM Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap *Master plan*.

No.	Analisa
1	Pengembangan lahan perkebunan khususnya komoditi kelapa sawit saat ini secara eksisting hanya mencapai 173.544 ha yang merupakan akumulasi lahan masyarakat dan perusahaan. Perlu peningkatan lahan terutama dengan menggunakan cadangan lahan yang tersebar di 6 Kecamatan dengan target minimal 200.000 ha.
2	Berdasarkan pohon industri kelapa sawit yang di rilis oleh kementerian perindustrian setidaknya terdapat 38 macam produk dan turunannya dari komoditi kelapa sawit. Berdasarkan RPJMD setidaknya harus ada 6 produk yang dapat diproduksi di Kabupaten Kobar yaitu CPO, PFA, Olein, Stearin, PKO, dan Minyak goreng. kondisi eksisting saat ini produksi masyarakat sebatas TBS, sementara produksi perusahaan sebatas TBS, CPO, PKO dan Kernel.
3	Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (meningkatkan pendapatan, nilai ekonomis produk, dan membuka lapangan kerja). Diversifikasi komoditas sawit sebagai komoditi unggulan pada sub sistem hulu, proses, dan hilir perlu dilakukan termasuk kaitannya dengan sektor industri pasca produksi. Oleh karena itu diperlukan industri diversifikasi sawit berbasis masyarakat
4	Agar diversifikasi komoditi kelapa sawit dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan nilai tambah yang positif maka perlu dipertimbangkan padu padan dengan komoditi unggulan sub sektor lain (pertanian, peternakan, dan perikanan).
5	Produksi komoditi kelapa sawit harus berasaskan keberlanjutan pada sub sistem hulu, proses, dan hilir, serta termasuk diversifikasinya (ISPO).

Masterplan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kebijakan dalam upaya mengkomodir pengembangan kawasan strategis perkebunan khususnya komoditi kelapa sawit. Sehingga dari penentuan kawasan strategis yang telah termuat dalam RTRW, perlu dibuat *master plan* untuk kawasan tersebut.

5.9 Aspek Perkebunan

Data perkembangan pendaftaran usaha perkebunan yang ditinjau dari jumlah penerbitan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Rakyat (SPUP-B) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015, terdapat 48 SPUP-B dengan jenis tanaman kelapa sawit. Sedangkan perusahaan besar swasta yang beroperasi



pada wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 28 perusahaan dengan rincian 20 perusahaan dengan luas areal terdata dan sisanya belum terdata. Data pengusahaan perkebunan kelapa sawit dapat dilihat pada **Tabel 5.15** dan **Tabel 5.16**.

Tabel 5.15. SPUP-B Kabupaten Kotawaringin Barat

Jenis Tanaman	Tahun Tanam	Luas (ha)	Kepemilikan Lahan	Luas Tanaman (ha)			Penanda Tangan SPUP-B
				TBM	TM	Jumlah	
Kelapa Sawit	2007	16,000	SKT	0	16,000	16,000	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2007	24,000	SKT	0	24,000	24,000	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2008	24,680	SKT	0	24,680	24,680	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2007	24,000	SKT	0	24,000	24,000	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2007	24,000	SKT	0	24,000	24,000	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2008	24,500	Sertifikat	0	8,500	8,500	Ka. Disbun Kobar
			SKT	0	16,000	16,000	
Kelapa Sawit	2008	24,000	SKT	0	24,000	24,000	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2008	24,250	Sertifikat	0	8,250	8,250	Ka. Disbun Kobar
			SKT	0	16,000	16,000	
Kelapa Sawit	2008	24,500	SKT	0	24,500	24,500	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2009	24,718	Sertifikat	12,500	0	12,500	Ka. Disbun Kobar
			SKT	12,218	0	12,218	
Kelapa Sawit	2009	15,736	Sertifikat	15,736	0	15,736	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2009	22,500	SKT	22,500	0	22,500	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2009	13,200	SKT	13,200	0	13,200	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2007	24,000	SKT	0,000	24,000	24,000	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2008	17,940	SKT	0,000	17,940	17,940	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2006	17,750	SKT	0,000	17,750	17,750	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2009	3,300	Sertifikat	3,300	0	3,300	Camat Pangkalan Lada



Jenis Tanaman	Tahun Tanam	Luas (ha)	Kepemilikan Lahan	Luas Tanaman (ha)			Penanda Tangan SPUP-B
				TBM	TM	Jumlah	
Kelapa Sawit	2009	10,000	SKT	10,000	0	10,000	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2009	5,000	SKT	5,000	0	5,000	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2009	1,800	SKT	1,800	0	1,800	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2009	2,000	SKT	2,000	0	2,000	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2009	1,500	SKT	1,500	0	1,500	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2009	1,800	SKT	1,800	0	1,800	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2009	2,000	SKT	2,000	0	2,000	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2009	2,000	SKT	2,000	0	2,000	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2009	1,700	SKT	1,700	0	1,700	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2009	2,000	SKT	2,000	0	2,000	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2009	1,750	Sertifikat	1,750	0	1,750	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2009	4,000	Sertifikat	2,000	0	2,000	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2009		SKT	2,000	0	2,000	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2009	2,000	SKT	2,000	0	2,000	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2009	1,750	SKT	1,750	0	1,750	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2009	2,000	SKT	2,000	0	2,000	Camat Pangkalan Lada



Jenis Tanaman	Tahun Tanam	Luas (ha)	Kepemilikan Lahan	Luas Tanaman (ha)			Penanda Tangan SPUP-B
				TBM	TM	Jumlah	
Kelapa Sawit	2007	4.000	Sertifikat	0	4.000	4.000	Camat Pangkalan Lada
Kelapa Sawit	2006	24.000	Sertifikat	0	24.000	24.000	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2006	24.000	Sertifikat	0	24.000	24.000	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2006	24.000	Sertifikat	0	24.000	24.000	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2006	24.000	Sertifikat	0	24.000	24.000	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2009	22,800	Sertifikat	22,800	0	22,800	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2009	15,200	SKT	15,200	0	15,200	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2009	19,000	SKT	19,000	0	19,000	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2009	22,800	Sertifikat	22,800	0	22,800	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2008	19,000	SKT	0	19.00	19.00	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2008	22,800	SKT	0	23.400	23.400	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2008	22,800	SKT	0	24.200	24.200	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2009	11.560	Sertifikat	11.560	0	11.560	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2009	8.310	Sertifikat	8.310	0	8.310	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2011	24.500	SKT	24.500	0	24.500	Ka. Disbun Kobar
Kelapa Sawit	2011	23.500	SKT	23.500	0	23.500	Ka. Disbun Kobar

Tabel 5.16. Perusahaan Besar Swasta di Kabupaten Kotawaringin Barat.

NPWP	Nama Perusahaan	Komoditi	Jenis	Luas Areal (Ha)			Kecamatan
				Plasma	Inti	Jumlah	
01.353.293.2-712.000	PT. Agro Menara Rahmat	Kepala Sawit	PBS	0.00	6,501.81	6,501.81	Arut Selatan
01.715.853.6-012.000	PT. Bangun Jaya Alam Permai	Kepala Sawit	PBS	0.00	15,500.41	15,500.41	Pangkut
01.343.760.4-022.000	PT. Bumilanggeng Perdana Trada	Kepala Sawit	PBS	1,500.00	8,950.00	10,450.00	Kumai
01.356.034.5-077.000	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	Kepala Sawit	PBS	8,000.00	16,131.00	24,131.00	Kotawaringin Lama
01.353.301.3-004.000	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	Kepala Sawit	PBS	179.00	8,144.00	8,323.00	Pangkalan Banteng
01.353.297.3-712.000	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	Kepala Sawit	PBS	958.00	6,067.00	7,025.00	Pangkalan Lada
01.250.190.3-712.001	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	Kepala Sawit	PBS	297.00	8,344.00	8,641.00	Pangkalan Banteng
01.353.301.5.004.000	PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur	Kepala Sawit	PBS	113.00	4,283.00	4,396.00	Pangkalan Banteng
02.225.164.9-712.000	PT. Kalimantan Sawit Abadi	Kepala Sawit	PBS	752.31	4,776.00	5,528.31	Arut Selatan
01.948.713.1-013.000	PT. Meta Epsi Agro	Kepala Sawit	PBS	7,658.00	0.00	7,658.00	Pangkalan Lada
02.579.823.5-712.000	PT. Mitra Mendawai Sejati	Kepala Sawit	PBS	381.57	8,388.19	8,769.76	Arut Selatan
01.061.131.7.701.000	PTP. Nusantara XIII	Karet	PBN	2,220.00	2,620.00	4,840.00	Pangkalan Banteng
01.353.305.4.001.000	PT. Persada Bina Nusantara Abadi	Kepala Sawit	PBS	0.00	2,019.28	2,019.28	Arut Utara
	PT. Primasentosa Pratama Putra	Kepala Sawit	PBS	0.00	256.00	256.00	Pangkalan Lada
01.002.743.1-712.001	PT. Satya Kisma Usaha	Kepala Sawit	PBS	0.00	2,441.24	2,441.24	Pangkalan Lada
01.580.420.4-712.000	PT. Sawit Sumbermas Sarana	Kepala Sawit	PBS	230.00	19,943.22	20,173.22	Arut Selatan
01.353.305.4-004.000	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	Kepala Sawit	PBS	538.00	6,144.00	6,682.00	Arut Selatan
02.225.205.0.713.000	PT. Surya Sawit Sejati	Kepala Sawit	PBS	132.88	10,428.00	10,560.88	Pangkalan Lada
02.596.860.3-012.000	PT. Andalan Sukses Makmur	Kepala Sawit	PBS	111.07	880.26	991.33	Kumai
02.549.992.2-713.000	PT. Arut Sawit Mandiri	Kepala Sawit	PBS	0.00	400.00	400.00	Pangkut
	PT. Usaha Agro Indonesia	Kepala Sawit	PBS	0.00	4,000.00	4,000.00	Kotawaringin Lama
Jumlah Kobar				23,070.83	136,217.41	159,288.24	



5.10 Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

5.10.1 KUD Tani Subur

KUD Tani Subur merupakan badan usaha yang berada pada Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat. Bidang usaha yang dikelola yaitu : perkebunan sawit plasma, penyediaan saprodi, simpan pinjam, perangkutan, serta diversifikasi usaha berbasis kelapa sawit (peternakan sapi). Visi KUD Tani subur yaitu ***“Bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan menggali potensi yang ada dimasyarakat, baik potensi alam maupun sumber daya manusia”***. sedangkan misi yang ingin dicapai yaitu menjadi soko guru perekonomian masyarakat, melalui usaha – usaha yang berpotensi, berhasil guna dan berdaya guna, untuk kesejahteraan masyarakat. Data inventaris dan aset KUD dapat dilihat pada **Tabel 5.17**.

Tabel 5.17. Aset dan Inventaris KUD Tani Subur.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kebun Plasma Sawit Luas Kebun 870 ha dengan Nilai	56,550,000,000
2.	Tanah dan bangunan	
	Bangunan Kantor	250,000,000
	Bangunan Kantor Baru	1,250,000,000
	Mess Karyawan	250,000,000
	Kebun Sawit luas 4 Ha	150,000,000
	Total Nilai	1,900,000,000
3.	Kendaraan Roda 4	
	Dump Truck	235,000,000
	Truck Bak Kayu	200,000,000
	Hard Top 2 buah	75,000,000
	Mobil Pic Up Ranger	85,000,000
	Total Nilai	595,000,000
4.	Kendaraan Roda 2	
	Mega Pro	17,500,000
	Mega Pro New	18,500,000
	Win 2 buah	14,000,000



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Kharisma 2 buah	8,000,000
	Total Nilai	58,000,000
5.	Kandang Sapi Bali (Kelompok Tani)	
	Tanah	100,000,000
	Bangunan Kandang 4 buah	315,000,000
	Rumah Kompos	300,000,000
	Mesin Cuper Jankos	40,000,000
	Cuper rumput 3 buah	80,000,000
	Mixer pembuatan pakan	25,000,000
	Generator	5,000,000
	Alat Biogas	35,000,000
	Ternak Sapi 112 ekor	720,000,000
	Total Nilai	1,620,000,000
6.	Kandang Sapi Penggemukan KUD	
	Tanah	150,000,000
	Kantor	110,000,000
	Perangkat Komputer	7,000,000
	AC 2 buah	3,500,000
	Meubeller	5,000,000
	Bangunan Kandang Sapi 2 buah	350,000,000
	Bangunan Kandang Ternak 2 buah	350,000,000
	Pembuatan Pagar keliling	150,000,000
	Hewan Ternak Sapi 138 ekor	1,794,000,000
	Bangunan Kandang isolasi ternak	150,000,000
	Gudang Pupuk	300,000,000
	Rumah Pakan ternak	50,000,000
	Truck	160,000,000
	Cuper	45,000,000
	Mixer	25,000,000
	Sumur	20,000,000
	Total Nilai	3,669,500,000
	Total Nilai Keseluruhan	64,392,500,000

Dokumentasi hasil survey primer mengenai kondisi dan inventaris KUD Tani Subur dapat dilihat pada **Gambar 5.2 – 5.6**.



Gambar 5.2. Kondisi dan Inventaris KUD Tani Subur (A).



Gambar 5.3. Kondisi dan Inventaris KUD Tani Subur (B).

DIVISI : B1 a (318 ha)		DATA PRODUKSI KUD "TANI SUBUR"									
NO	BULAN	TAHUN									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	JANUARI	347 670	232 500	250 140	277 940	397 830	493 310	799 560	1 213 740	2 016	2 017
2	FEBRUARI	296 710	207 580	273 680	595 610	406 940	486 590	800 200	1 369 590		
3	MARET	349 430	298 750	326 690	436 890	461 500	488 670	653 950	1 349 860		
4	APRIL	356 310	377 750	383 990	523 340	549 310	405 260	644 950	2 155 940		
5	MEI	458 350	671 180	434 940	579 130	498 200	417 580	654 620	2 025 230		
6	JUNI	509 500	709 000	420 660	467 310	643 390	281 890	593 190	1 804 390		
7	JULI	417 490	627 800	370 060	421 390	675 200	500 800	417 940	1 516 480		
8	AGUSTUS	270 930	658 070	345 600	338 060	428 010	265 990	482 060	1 889 040		
9	SEPTEMBER	348 280	422 500	254 880	371 730	561 960	628 650	332 380	1 699 140		
10	OKTOBER	255 320	535 310	455 430	594 840	619 890	435 430	374 780	1 485 670		
11	NOPEMBER	377 500	557 630	420 950	584 160	579 880	667 390	520 840	1 760 650		
12	DESEMBER	324 410	433 600	455 690	707 280	612 430	874 750	611 220	1 681 230		
TOTAL		4 311 880	5 731 670	4 392 670	5 837 620	6 434 540	5 966 230	6 585 140	19 804 570		

DIVISI : B1 b. (552 ha)		TAHUN									
NO	BULAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	JANUARI	-	-	294 830	596 150	650 130	706 060	1 186 620	
2	FEBRUARI	-	133 600	370 160	558 750	593 260	852 650	982 250			
3	MARET	-	211 800	347 390	629 160	576 790	781 300	1 140 460			
4	APRIL	-	336 980	406 750	1 020 110	669 540	754 060	1 167 860			
5	MEI	-	357 470	491 930	917 270	635 820	639 670	1 115 750			
6	JUNI	-	764 410	460 780	709 060	809 320	569 890	947 670			
7	JULI	-	676 780	370 970	552 350	967 090	795 580	812 420			
8	AGUSTUS	-	630 720	296 260	607 490	708 380	535 300	1 038 290			
9	SEPTEMBER	-	423 200	358 360	597 090	1 304 600	1 115 740	612 250			
10	OKTOBER	-	573 020	709 740	734 750	912 490	523 040	684 630			
11	NOPEMBER	-	777 740	834 470	860 040	907 870	1 304 800	794 490			
12	DESEMBER	-	604 140	824 340	1 042 360	1 091 140	1 505 170	728 340			
TOTAL		-	4 189 860	5 865 980	8 324 770	9 826 430	10 077 190	11 211 330			

Gambar 5.4. Kondisi dan Inventaris KUD Tani Subur (C).



Gambar 5.5. Kondisi dan Inventaris KUD Tani Subur (D).



Gambar 5.6. Kondisi dan Inventaris KUD Tani Subur (E).

5.10.2 Pelaku Perkebunan

Pelaku perkebunan berdasarkan ketersediaan data sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan yaitu petani plasma, petani swadaya, dan penyuluh. Jumlah masing-masing dapat dilihat pada **Tabel 5.18**.

Tabel 5.18. Pelaku Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pelaku perkebunan	Jumlah (jiwa)
Petani plasma	9.304
Petani swadaya	21.356
Penyuluh	93
Total	30.753



BAB VI ANALISIS PERENCANAAN

6.1 Analisa Biofisik Sumberdaya Lahan

6.1.1 Analisa Kesesuaian Lahan Aktual Komoditi Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran *in-situ* dan hasil analisis laboratorium untuk lahan perkebunan komoditas Kelapa Sawit (*Elaeis guinensis* Jack.) dapat disimpulkan kelas kesesuaian lahan aktual dan potensialnya. Penentuan kelas kesesuaian lahan merujuk pada Panduan Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk komoditas kelapa sawit, Balai Penelitian Tanah, dan *World Agroforestry Centre* (ICRAF) (Ritung *et al.*, 2007) seperti pada **Tabel 6.1**. Hasil identifikasi laboratorium sample tanah per kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 6.2**.

Tabel 6.1. Kriteria Kesesuaian Lahan Aktual untuk Tanaman Kelapa Sawit.

Persyaratan tumbuh/Karakteristik lahan	Kelas Kesesuaian Lahan			
	S1	S2	S3	N
Suhu (tc)				
Suhu tahunan rata-rata (°C)	25 - 28	22 - 25 28 - 32	20 - 22 32 - 35	< 20 > 35
Ketersediaan air (wa)				
Curah hujan tahunan rata-rata (mm)	1700 - 2500	1450 - 1700 2500 - 3500	1250 - 1450 3500 - 4000	< 1250 > 4000
Jumlah bulan kering (bulan)	< 2	2 - 3	3 - 4	> 4
Ketersediaan Oksigen (oa)				
Kelas drainase	Baik, sedang	Agak terhambat	Terhambat, agak cepat	Sangat terhambat cepat
Keadaan perakaran (rc)				
Tekstur tanah (permukaan)	Halus, agak halus, sedang	-	Agak kasar	Kasar
Fraksi kasar (%)	< 15	15 - 35	35 - 55	> 55
Kedalaman tanah (cm)	> 100	75 - 100	50 - 75	< 50
Gambut:				
Ketebalan (cm)	< 60	60 - 140	140 - 200	> 200
Ketebalan (cm), bila berlapis dengan bahan mineral/pengkayaan mineral	< 140	140 - 200	200 - 400	> 400
Kematangan	sapric*	sapric, hemic*	hemic, fibric*	Fibric
Ketersediaan hara (nr)				
KTK liat (cmol/kg)	> 16	< 16	-	-
Kejenuhan basa (%)	> 20	≤ 20	-	-
pH H ₂ O	5.0 - 6.5	4.2 - 5.0 6.5 - 7.0	< 4.2 > 7.0	-
C-organik (%)	> 0.8	≤ 0.8	-	-
Toksistasitas (xc)				
Salinitas (ds/m)	< 2	2 - 3	3 - 4	> 4
Sodisitas (xn)				
Alkalinitas/ESP (%)	-	-	-	-
Toksistasitas sulfidik (xs)				
Kedalaman sulfidik (cm)	> 125	100 - 125	60 - 100	< 60
Bahaya erosi (eh)				
Lereng (%)	< 8	8 - 16	16 - 30	> 30
Tingkat bahaya erosi (eh)	Very low	Low-moderate	Severe	Very severe
Bahaya banjir (fh)				
Banjir	F0	F1	F2	> F2
Penyilapan tanah (lp)				
Batuan permukaan (%)	< 5	5 - 15	15 - 40	> 40
Singkapian batuan (%)	< 5	5 - 15	15 - 25	> 25



Tabel 6.2. Hasil Analisis Lahan Aktual untuk Tanaman Kelapa Sawit di Kotawaringin Barat.

Karakteristik Lahan	Kec. Arut Utara		Kec. Kotawaringin Lama		Kec. Pangkalan Lada		Kec. Kumai	
	Nilai	S1/S2/S3/N	Nilai	S1/S2/S3/N	Nilai	S1/S2/S3/N	Nilai	S1/S2/S3/N
Suhu (tc)								
Suhu tahunan rata-rata (°C)	22-31	S2	23-31	S2	23-31	S2	22-33	S2
Ketersediaan air (wa)								
Curah hujan tahunan rata-rata (mm)	2700 - 4600	S2	2400 - 3500	S2	2000 - 4100	S2	2200 - 3200	S2
Jumlah bulan kering (bulan)	0-1	S1	0-1	S1	0-4	S1	0-1	S1
Ketersediaan Oksigen (oa)								
Kelas Drainase	Baik, sedang	S1	Baik, sedang	S1	Baik, sedang	S1	Baik, sedang	S1
Keadaan perakaran (rc)								
Tekstur tanah (permukaan)	Halus, agak halus, sedang	S1	Halus, agak halus, sedang	S1	Halus, agak halus, sedang	S1	Agak Kasar	S3
Fraksi kasar (%)	<15%	S1	<15%	S1	<15%	S1	<15%	S1
Kedalaman tanah (cm)	> 100	S1	> 100	S1	> 100	S1	> 100	S1
Gambut:								
Ketebalan (cm)	-	-	60-140	S2	-	-	60-140	S2
Kematangan	-	-	Saprik	S1	-	-	Saprik	S1
Ketersediaan hara (nr)								
KTK Liat (meq/100g)	10,7	S1	4,6	S2	2,4	S2	2,3	S2
Kejenuhan basa (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
pH H ₂ O	4,7	S2	4,53	S2	4,89	S1	5,16	S1
Toksisitas sulfidik (xs)								



Kedalaman sulfidik (cm)	>125	S1	>125	S1	>125	S1	>125	S1
Bahaya erosi (eh)								
Lereng (%)	< 8	S1						
Tingkat bahaya erosi (eh)	Sangat rendah	S1						
Bahaya banjir (fh)								
Banjir	Ringan	S1	Ringan	S1	Ringan	S1	Ringan	S1
Penyiapan tanah (lp)								
Batuan permukaan (%)	<5	S1	<5	S1	<5	S1	<5	S1
Singkapan batuan (%)	<5	S1	<5	S1	<5	S1	<5	S1
Kelas Kesesuaian Lahan Aktual		S2 Cukup Sesuai		S2 Cukup Sesuai		S2 Cukup Sesuai		S3 Sesuai marginal

Lahan di Kecamatan Arut Utara, Kotawaringin Lama dan Pangkalan Lada menunjukkan kesesuaian lahan aktual termasuk kelas S2tcwanr (cukup sesuai). Usaha perbaikan suhu (tc) tidak dapat dilakukan perbaikan dari S2 menjadi S1, ketersediaan air (wa) dapat diperbaiki menjadi S1 dengan meningkatkan ketersediaan air bagi tanaman selain itu retensi hara (nr) dapat diperbaiki menjadi S1 dengan meningkatkan pH dan KTK, sehingga **kesesuaian lahan potensial** menjadi S2tc.

Lahan di Kecamatan Kumai menunjukkan kesesuaian lahan aktual termasuk kelas S3rc (sesuai marginal). Usaha perbaikan keadaan perakaran (rc) tidak dapat dilakukan perbaikan dari S2 menjadi S1 karena sebagian wilayah terutama di pesisir pantai memiliki kandungan bahan kasar berupa pasir, sehingga **kesesuaian lahan potensial** tetap menjadi S3rc.

Tabel 6.3 di bawah ini menunjukkan kandungan 3 (tiga) unsur hara makro yaitu Nitrogen (N), Posfat (P) dan Kalium (K). Kriteria kesuburan tanah pada keempat lokasi contoh tanah yang berasal dari Kecamatan Arut Utara, Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada, dan Kumai menunjukkan kemiripan dari kisaran nilai N-Total (rendah - sedang), P-Total (sangat tinggi) dan K-Total (sangat tinggi). Nilai N-total yang tertinggi terindikasi pada Kecamatan Arut Utara, dan Pangkalan Lada, dimana sampel tanah



diambil dari perkebunan kelapa sawit. N memiliki fungsi utama sebagai bahan sintesis klorofil, protein, dan asam amino karena itu unsur ini dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada saat pertumbuhan memasuki fase vegetatif. Bersama dengan unsur P, unsur N ini digunakan dalam mengatur pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Nilai P-total yang tertinggi terindikasi pada Kecamatan Pangkalan Lada dan Kumai. Unsur P merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA serta juga berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Nilai P-total yang tertinggi terindikasi pada Kecamatan Kotawaringin Lama. Unsur K berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tanah yang berada pada keempat lokasi memerlukan penambahan hara N untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.

Tabel 6.3. Hasil Analisis Kimia Tanah di Kotawaringin Barat.

Lokasi	N (%)	Kriteria	P (mg 100 g ⁻¹)	Kriteria	K (mg 100 g ⁻¹)	Kriteria
Kec. Arut Utara	0,27	Sedang	330.82	Sangat Tinggi	278.46	Sangat Tinggi
	0,25	Sedang	276.59	Sangat Tinggi	161.43	Sangat Tinggi
	0,23	Sedang	204.57	Sangat Tinggi	166.67	Sangat Tinggi
Rerata	0.25	-	270.66	-	202.18	-
Kec. Kotawaringin Lama	0,19	Rendah	211.54	Sangat Tinggi	240.26	Sangat Tinggi
	0,22	Sedang	243.56	Sangat Tinggi	286.89	Sangat Tinggi
	0,23	Sedang	255.9	Sangat Tinggi	289.14	Sangat Tinggi
Rerata	0.21	-	237	-	272.09	-
Kec. Pangkalan Lada	0,25	Sedang	333.44	Sangat Tinggi	133.69	Sangat Tinggi
	0,20	Sedang	285.24	Sangat Tinggi	229.63	Sangat Tinggi
	0,24	Sedang	209.43	Sangat Tinggi	171.27	Sangat Tinggi
Rerata	0.23	-	276.03	-	178.19	-
Kec. Kumai	0,16	Rendah	283.79	Sangat Tinggi	155.11	Sangat Tinggi
	0,20	Rendah	322.51	Sangat Tinggi	159.27	Sangat Tinggi
	0,18	Rendah	303.15	Sangat Tinggi	157.19	Sangat Tinggi
Rerata	0.18	-	276.03	-	157.19	-

Sumber : Hasil Analisis Laboratorium Dasar dan Analitik Universitas Palangka Raya, 2016.



6.1.2 Analisa Kesesuaian Lahan Potensial Komoditi Kelapa Sawit

Analisa kesesuaian lahan potensial dilakukan dengan menerapkan kriteria lahan spesifik komoditi (dalam hal ini kelapa sawit) dalam proses *overlay* peta-peta tematik. Proses analisa menghasilkan wilayah-wilayah potensial pengembangan yang diinginkan. Pembuatan peta kesesuaian lahan untuk komoditas kelapa sawit, diambil dari kriteria Tanaman Perkebunan yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2016 serta dipadukan dengan kriteria kesesuaian lahan yang dikeluarkan oleh Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007. Sebagai sumber data utama pengolah kesesuaian lahan adalah data digital sumberdaya lahan yang dikeluarkan oleh RePPPProT (*Regional Physical Planning Project for Transmigration*) Tahun 1987. Kriteria dan tindak lanjut pengembangan lahan dapat dilihat pada **Tabel 6.4**.

Tabel 6.4. Beberapa Kriteria untuk Peta Kesesuaian Lahan Potensial.

Kriteria	Kelapa Sawit	
	Sesuai	Tidak Sesuai
Curah Hujan	1250 - 4000	<1250 dan > 4000
Temperatur Tahunan	20 - 28	< 20
Bulan Kering	2 - 4	> 4
Kedalaman Efektif	50->100	< 50
pH Tanah	4,2 - 8	<4,2 dan >8
KTK (CEC)	Sangat Rendah - Sedang	TD
Salinitas	<2 - 4	TD
P Total	Sangat Rendah-Sedang	TD
K Total	Sangat Rendah-Sedang	TD
Bahaya Banjir	small, slight, tidal	permanent
Gambut	Gambut 0-<3 dan mineral	Gambut >3 m
Kelas Lereng	8-30%	>30%
Ketinggian Tempat	1-1000	>1000

Dari hasil analisis keruangan terhadap wilayah kajian, didapatkan empat kriteria arahan pengembangan dan perluasan komoditas kelapa sawit yaitu Arahan Pengembangan dan Perluasan Komoditas Kelapa Sawit I – IV. Kriteria ini didapatkan dari hasil *overlay* (tumpang tindih) dan analisis pemodelan ruang dari Peta Kesesuaian Lahan Kelapa sawit, Peta-peta Perijinan (PBS Sawit, Ijin Pertambangan, IUPHHK HA,



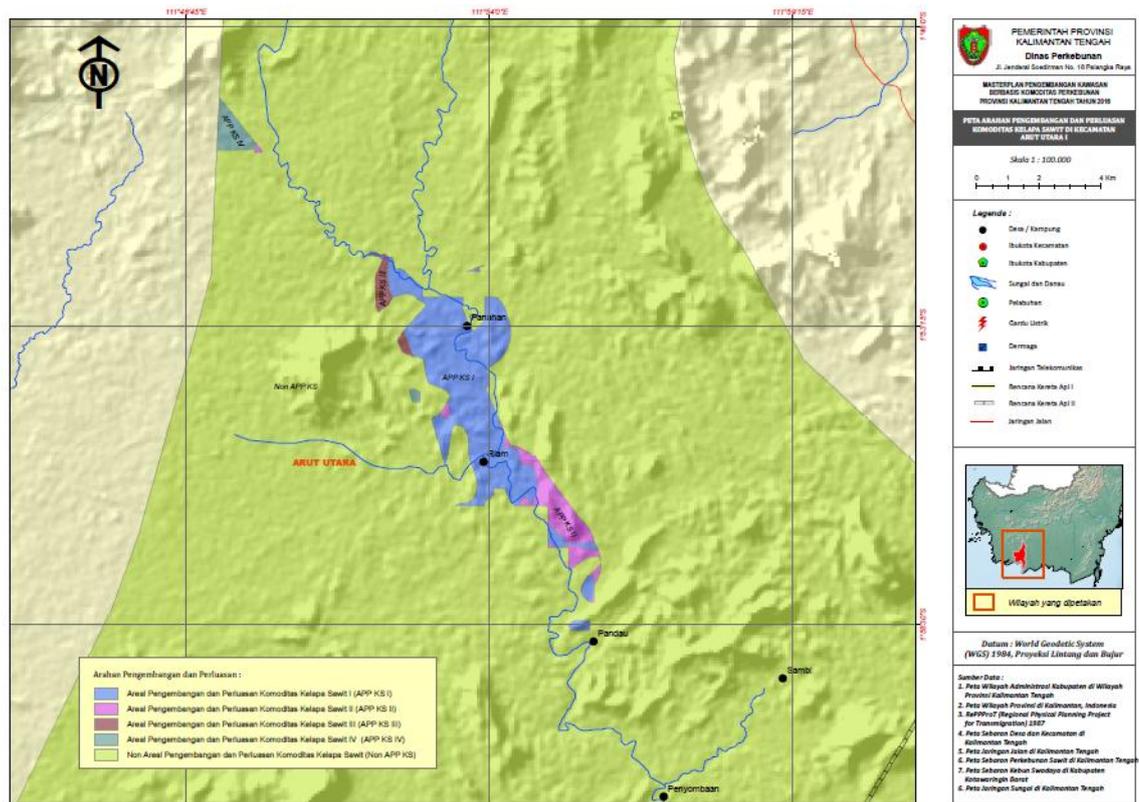
IUPHHK HT, IPPKH dan HTR), Peta Kedalaman Gambut, Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Penutupan Lahan.

Tabel 6.5. Tindak Lanjut Pengembangan Lahan.

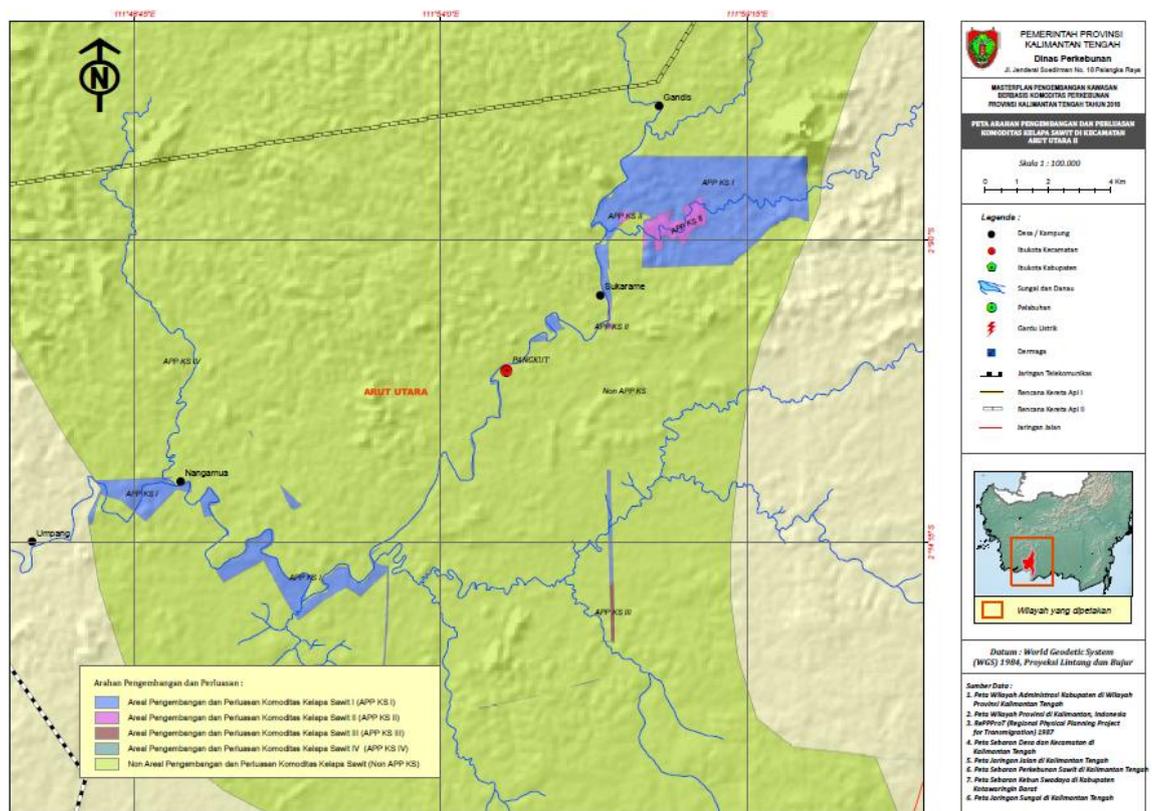
Kriteria Arahan	Hak Perijinan	Gambut <3m dan Tanah Mineral	Kawasan Hutan	Penutupan Lahan	Keterangan Pengembangan dan Perluasan	Tindak Lanjut Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit
APP KS I	Tidak Dibebrani Hak	Berada di Tanah Gambut dengan kedalaman <3m dan Tanah Mineral	Non Kawasan Hutan (APL)	Non Hutan	Areal Pengembangan dan Perluasan I	Dapat langsung dikembangkan dan diperluas
APP KS II	Tidak Dibebrani Hak	Berada di Tanah Gambut dengan kedalaman <3m dan Tanah Mineral	Non Kawasan Hutan (APL)	Hutan	Areal Pengembangan dan Perluasan II	Dapat langsung dikembangkan dan diperluas, dengan adanya land clearing/pembersihan lahan
APP KS III	Tidak Dibebrani Hak	Berada di Tanah Gambut dengan kedalaman <3m dan Tanah Mineral	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	Non Hutan	Areal Pengembangan dan Perluasan III	Tidak Dapat langsung dikembangkan dan diperluas, perlu pelepasan kawasan hutan dari KLHK
APP KS IV	Tidak Dibebrani Hak	Berada di Tanah Gambut dengan kedalaman <3m dan Tanah Mineral	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	Hutan	Areal Pengembangan dan Perluasan IV	Tidak Dapat langsung dikembangkan dan diperluas, perlu pelepasan kawasan hutan dari KLHK dan perlu adanya land clearing/pembersihan lahan

6.1.3 Analisa Ketersediaan Lahan

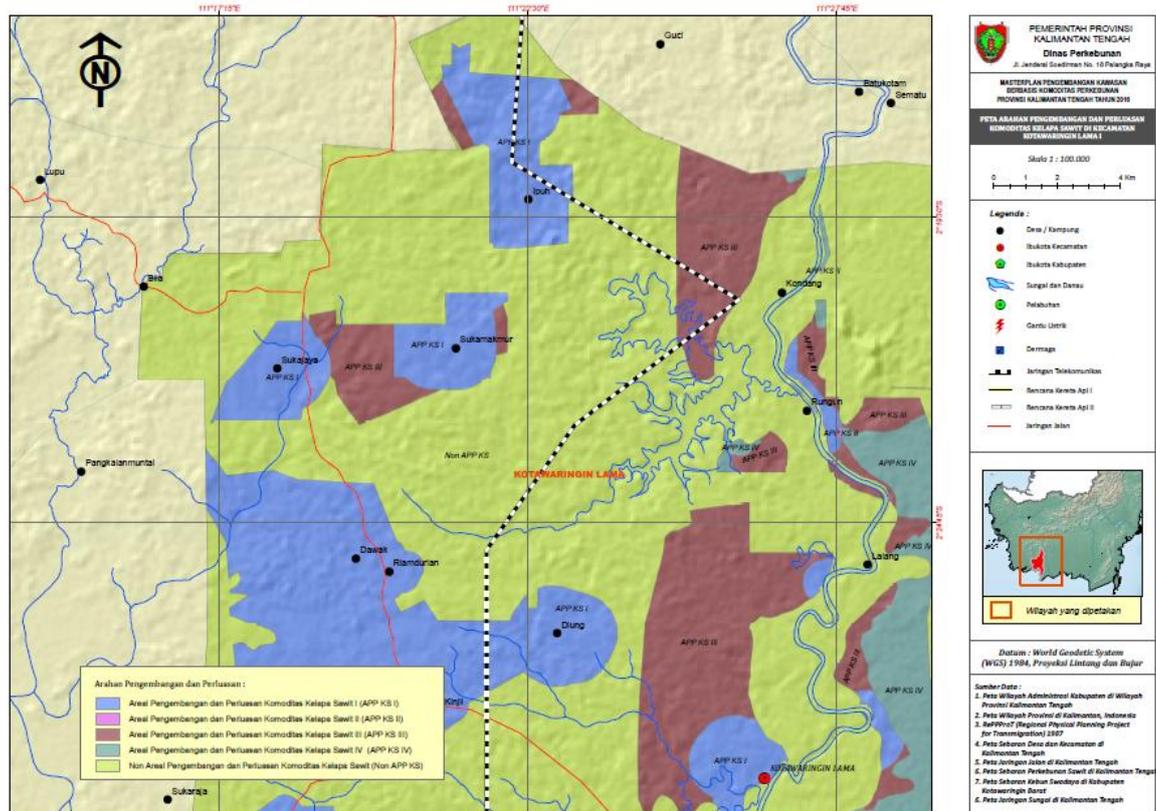
Ketersediaan lahan merupakan total lahan yang telah dianalisa melalui analisa kesesuaian lahan yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan. Ketersediaan lahan per kecamatan dapat dilihat pada **Gambar 6.1 – 6.13**.



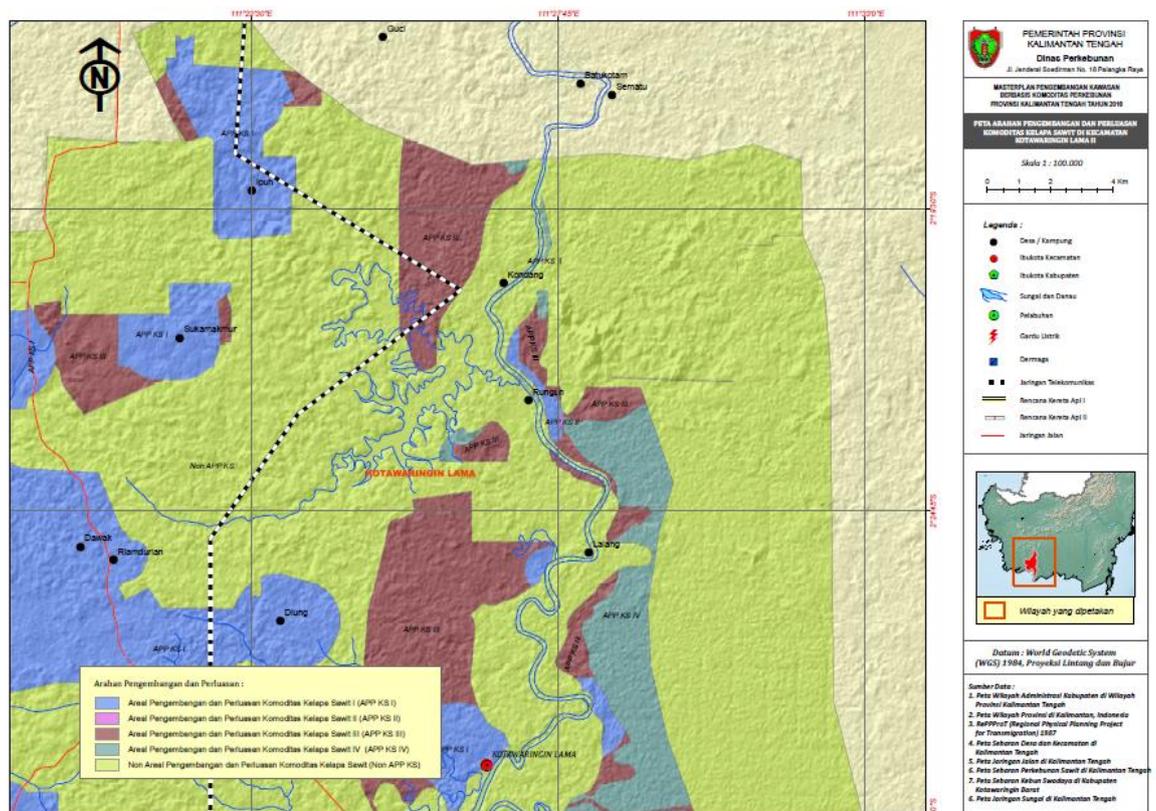
Gambar 6.1. Ketersediaan Lahan Kecamatan Arut Utara (A).



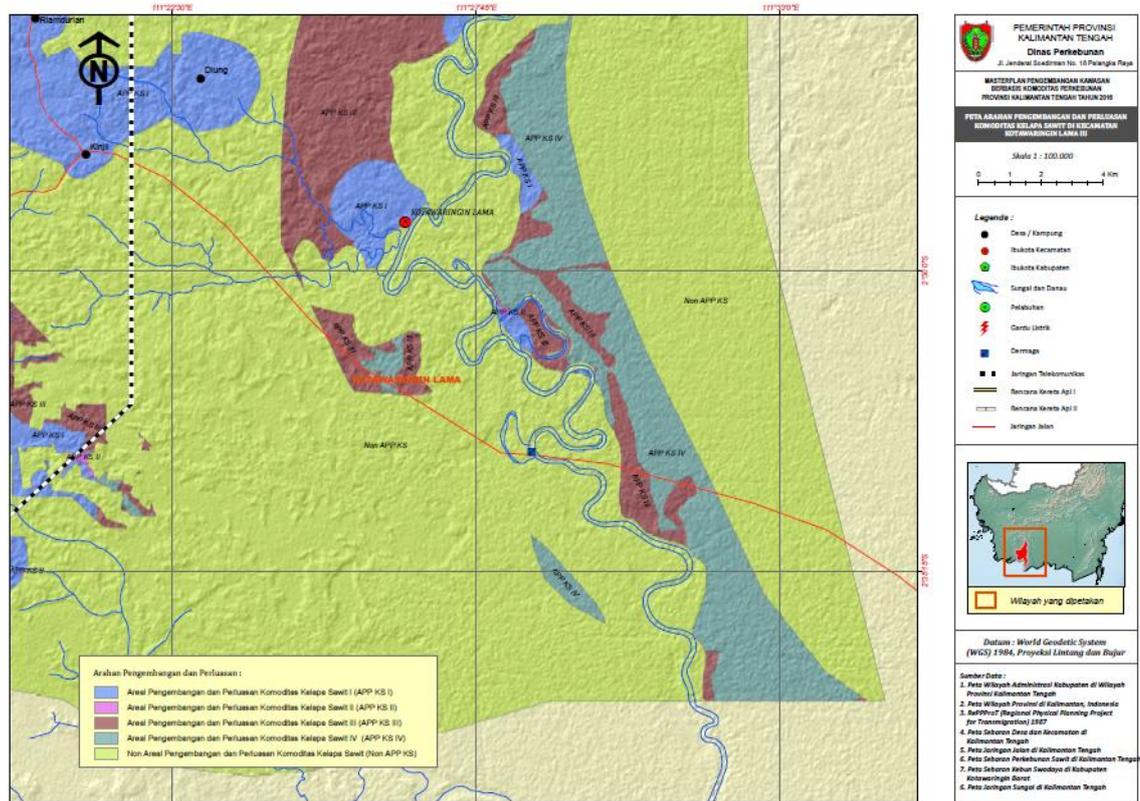
Gambar 6.2. Ketersediaan Lahan Kecamatan Arut Utara (B).



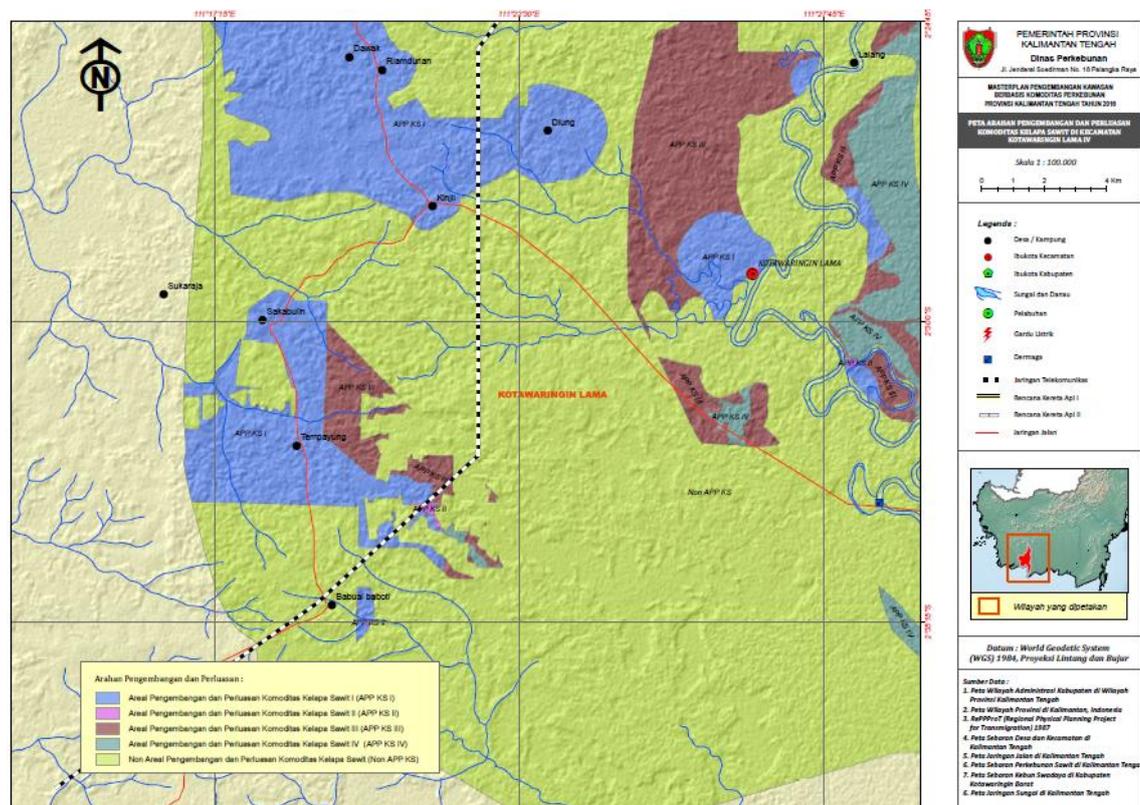
Gambar 6.3. Ketersediaan Lahan Kecamatan Kotawaringin Lama (A).



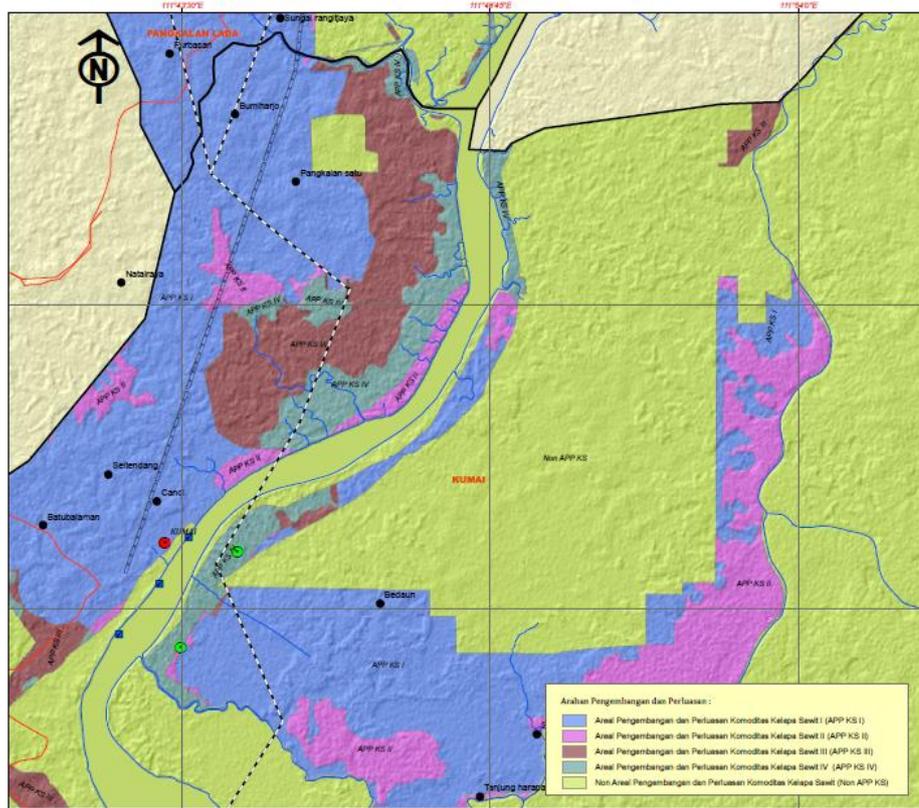
Gambar 6.4. Ketersediaan Lahan Kecamatan Kotawaringin Lama (B).



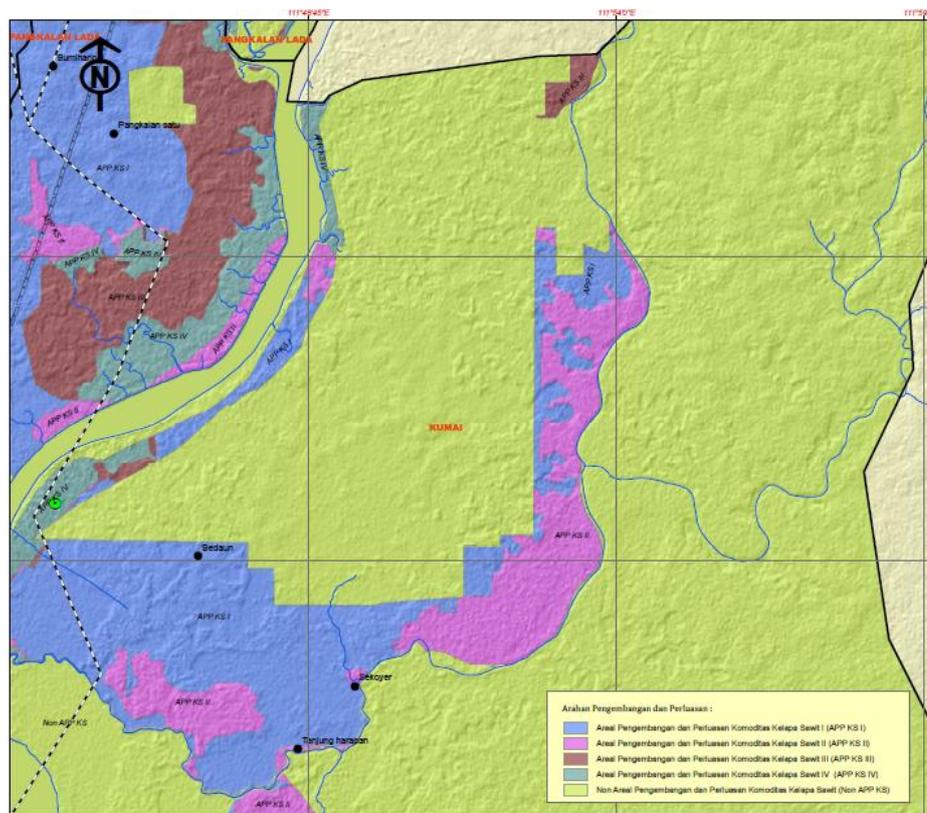
Gambar 6.5. Ketersediaan Lahan Kecamatan Kotawaringin Lama (C).



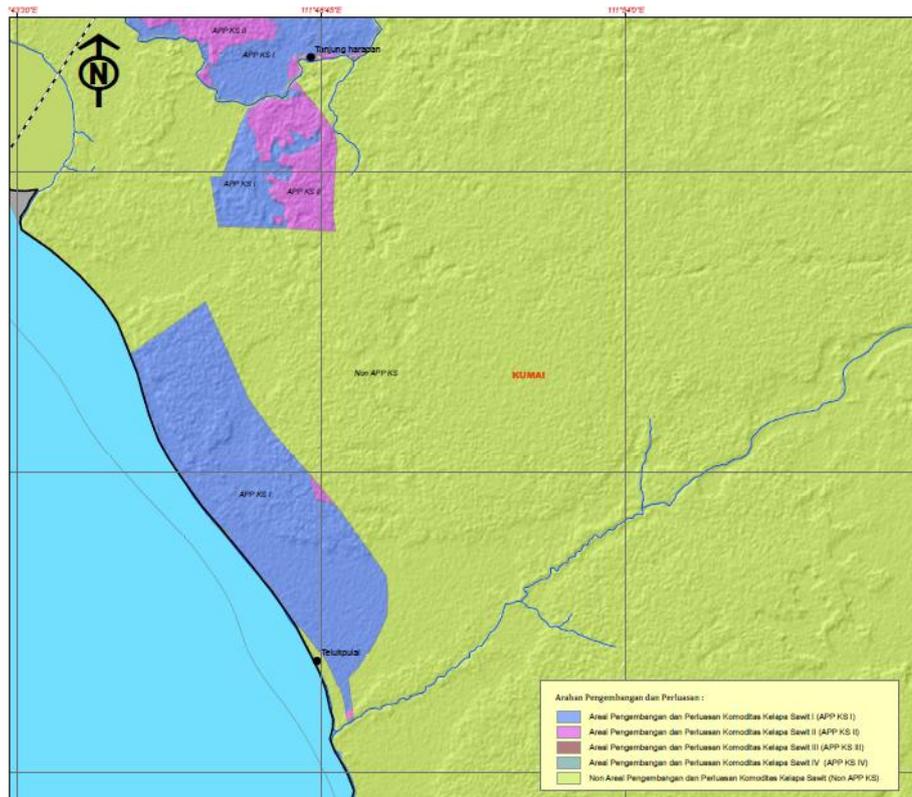
Gambar 6.6. Ketersediaan Lahan Kecamatan Kotawaringin Lama (D).



Gambar 6.7. Ketersediaan Lahan Kecamatan Kumai (A).



Gambar 6.8. Ketersediaan lahan Kecamatan Kumai (B).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dinas Perkebunan
Jl. Jenderal Sudirman No. 10 Palangka Raya

MASTEPPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018

PETA ABASAN PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KAWASAN SEMPIT DI KECAMATAN KUMAI (C)

Skala 2 : 100.000

0 1 2 3 4 Km

Legenda :

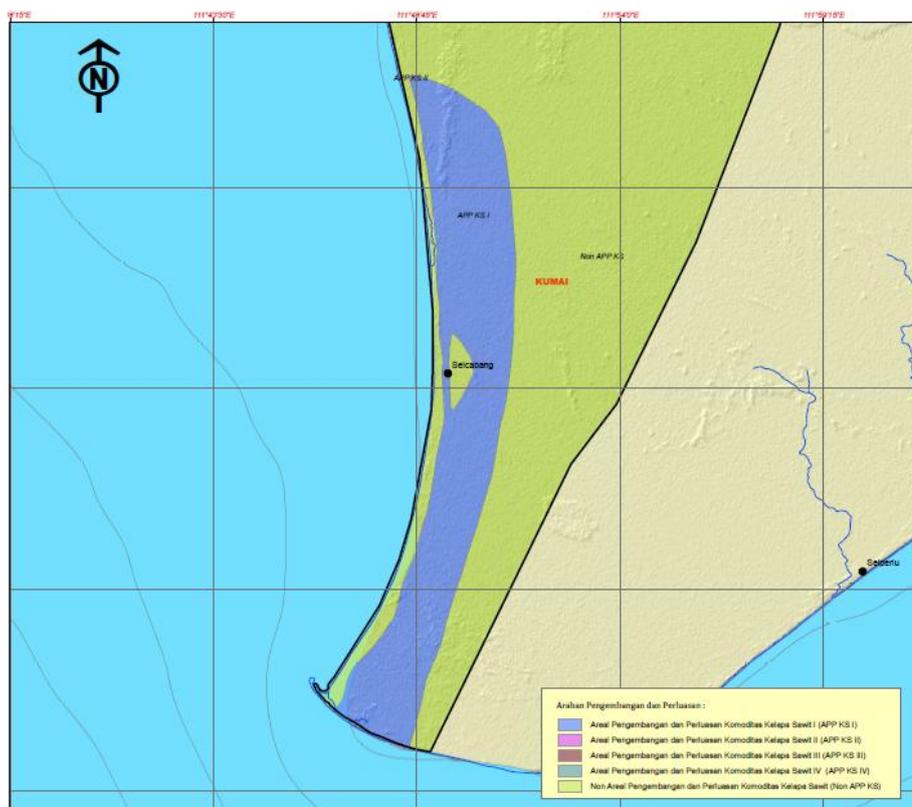
- Desa / Kampung
- Ikut Kota Kecamatan
- Ikut Kota Kabupaten
- Sungai dan Danau
- Pemukiran
- Gardu Listrik
- Demaga
- Jaringan Telekomunikasi
- Rencana Koridor Agri I
- Rencana Koridor Agri II
- Jaringan Jalan

Datum : World Geodetic System (WGS) 1984, Proyeksi Lintang dan Bujur

Sumber Data :

1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Peta Wilayah Provinsi di Kalimantan, Indonesia
3. RAPPWOT (Regional Physical Planning Project for Transmigration) 1987
4. Peta Sebaran Desa dan Kecamatan di Kalimantan Tengah
5. Peta Jaringan Jalan di Kalimantan Tengah
6. Peta Sebaran Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah
7. Peta Sebaran Kebun Sawit di Kabupaten Kotawaringen Barat
8. Peta Jaringan Sungai di Kalimantan Tengah

Gambar 6.9. Ketersediaan lahan Kecamatan Kumai (C).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dinas Perkebunan
Jl. Jenderal Sudirman No. 10 Palangka Raya

MASTEPPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018

PETA ABASAN PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KAWASAN SEMPIT DI KECAMATAN KUMAI (D)

Skala 2 : 100.000

0 1 2 3 4 Km

Legenda :

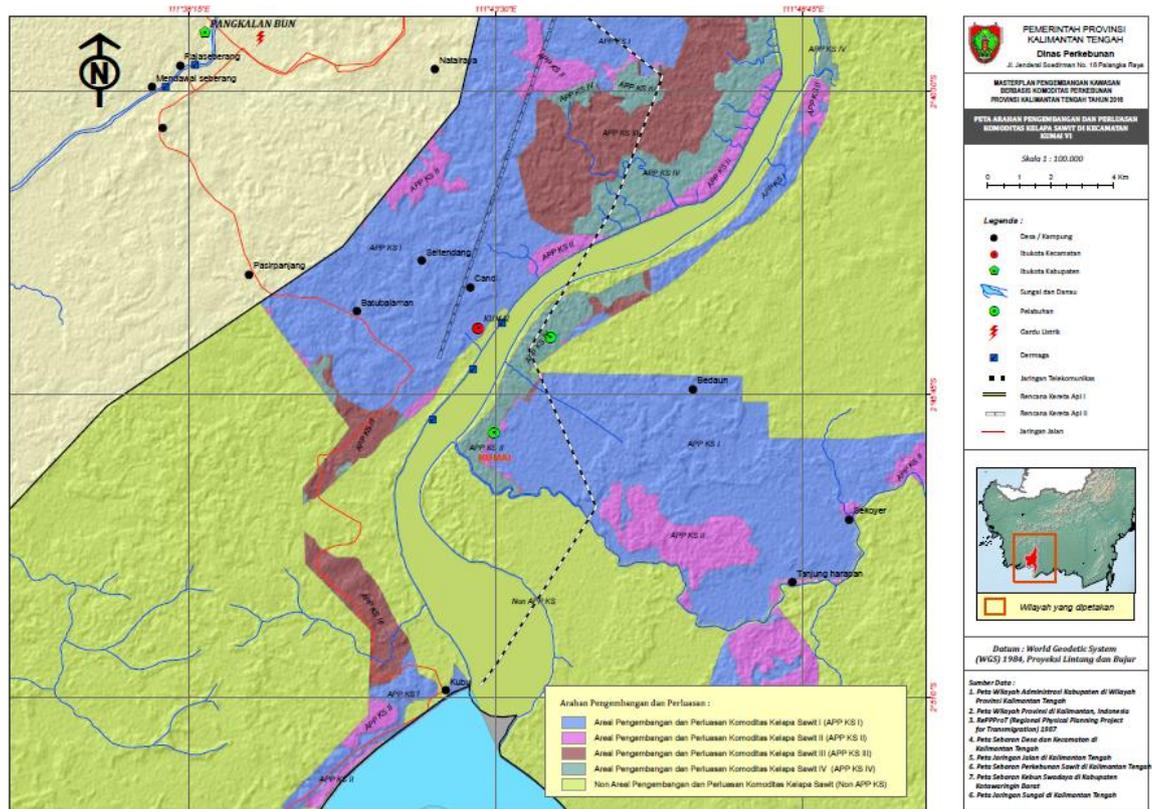
- Desa / Kampung
- Ikut Kota Kecamatan
- Ikut Kota Kabupaten
- Sungai dan Danau
- Pemukiran
- Gardu Listrik
- Demaga
- Jaringan Telekomunikasi
- Rencana Koridor Agri I
- Rencana Koridor Agri II
- Jaringan Jalan

Datum : World Geodetic System (WGS) 1984, Proyeksi Lintang dan Bujur

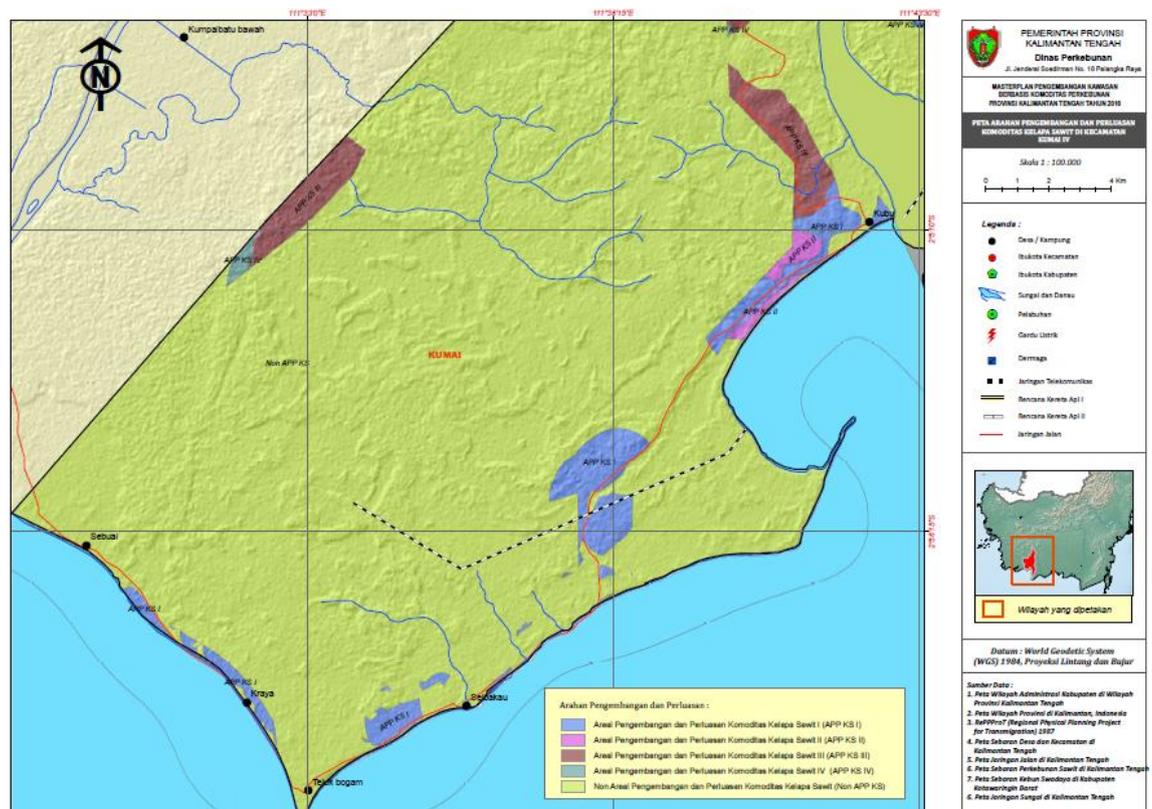
Sumber Data :

1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Peta Wilayah Provinsi di Kalimantan, Indonesia
3. RAPPWOT (Regional Physical Planning Project for Transmigration) 1987
4. Peta Sebaran Desa dan Kecamatan di Kalimantan Tengah
5. Peta Jaringan Jalan di Kalimantan Tengah
6. Peta Sebaran Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah
7. Peta Sebaran Kebun Sawit di Kabupaten Kotawaringen Barat
8. Peta Jaringan Sungai di Kalimantan Tengah

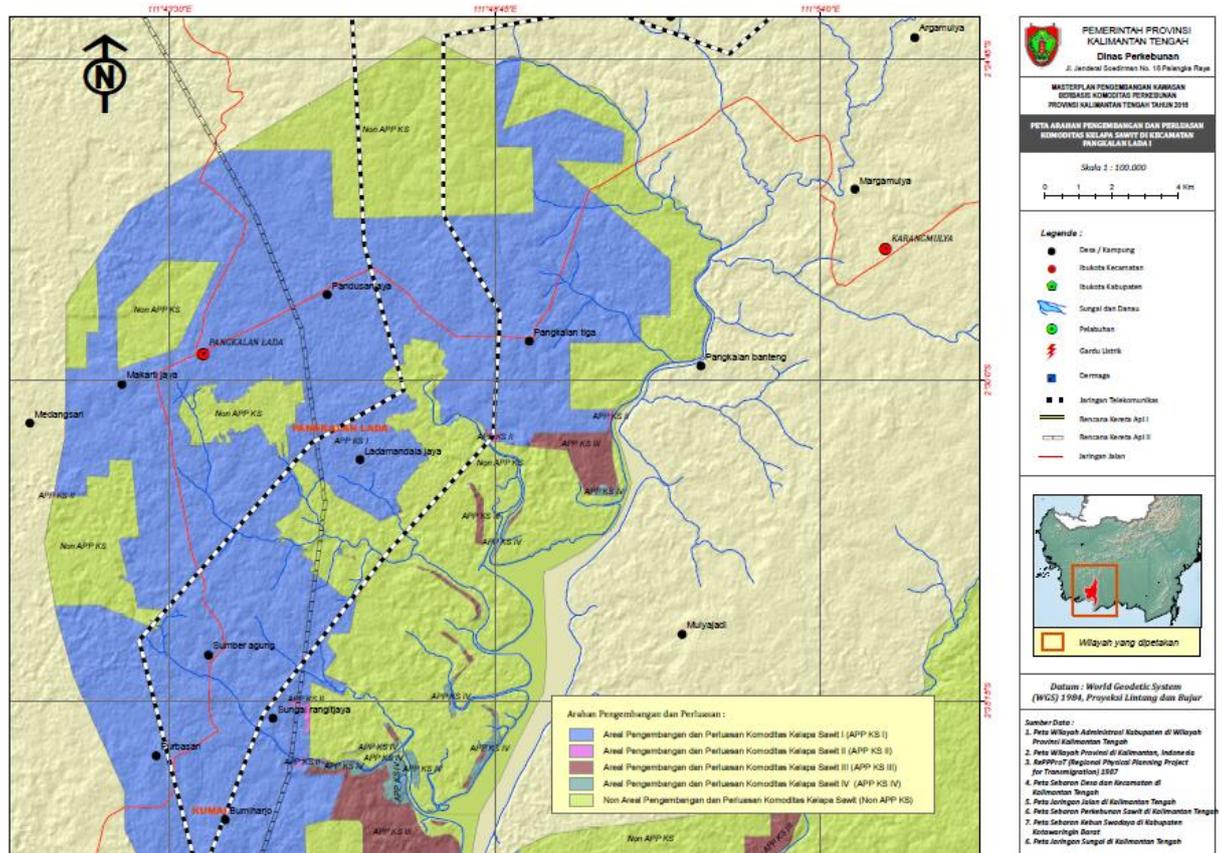
Gambar 6.10. Ketersediaan lahan Kecamatan Kumai (D).



Gambar 6.11. Ketersediaan Lahan Kecamatan Kumai (E).



Gambar 6.12. Ketersediaan Lahan Kecamatan Kumai (F).



Gambar 6.13. Ketersediaan Lahan Kecamatan Pangkajene Lada.

Dari hasil analisis juga didapatkan data bahwa, untuk pengembangan dan perluasan tahap awal dapat menggunakan areal Pengembangan dan Perluasan Komoditas Kelapa Sawit I (APP KS I), dikarenakan lokasi berada pada lokasi APL dan tidak berhutan sehingga tidak perlu untuk dilakukan pelepasan kawasan dan pembersihan lokasi yang berat. Untuk APP KS I ada di Kecamatan Kumai dengan sebaran di 17 Desa. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 6.6** dan **6.7**.

Tabel 6.6. Arahan Pengembangan dan Perluasan Komoditas Kelapa Sawit Berdasarkan Kecamatan dalam Kajian *Master plan* Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Kec.	Arahan Pengembangan dan Perluasan (ha)					Grand Total (ha)	%
	APP KS I	APP KS II	APP KS III	APP KS IV	Non APP KS		
Arut Utara	3.953	502	113	134	168.272	172.974	29,4
Ktw. Lama	12.539	43	8.691	5.807	81.445	108.526	18,5
Kumai	31.298	5.696	4.868	2.597	229.139	273.599	46,5
P. Lada	18.333	41	377	144	14.176	33.072	5,6
Grand Total	66.125	6.282	14.049	8.683	493.032	588.170	100,0
%	11,24	1,07	2,39	1,48	83,82	100,00	-



Tabel 6.7. Arahannya Pengembangan dan Perluasan Komoditas Kelapa Sawit Berdasarkan Kecamatan dan Desa dalam Kajian *Master plan* Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit Kalimantan Tengah.

Kecamatan/Desa	Arahannya Pengembangan dan Perluasan (ha)					Grand Total (ha)	%
	APP KS I	APP KS II	APP KS III	APP KS IV	Non APP KS		
Arut Utara	3.953,3	502,0	112,6	133,9	168.272,3	172.974,2	29,4
Gandis	829,3	35,7			7.018,7	7.883,7	1,3
Kerabu					8.840,2	8.840,2	1,5
Nanga Mua	669,7		0,3	0,3	34.355,4	35.025,7	6,0
Pandau	81,2	116,3			11.568,7	11.766,3	2,0
Pangkut	60,2		22,0		23.328,8	23.411,0	4,0
Penahan	739,1	4,0	90,3	122,0	39.265,0	40.220,3	6,8
Penyombaan					11.202,4	11.202,4	1,9
Riam	709,1	199,2		11,7	11.368,1	12.288,1	2,1
Sambi					9.803,9	9.803,9	1,7
Sukarami	864,8	146,9			5.026,9	6.038,6	1,0
Sungai Dau					6.494,3	6.494,3	1,1
Kotawaringin Lama	12.539,4	43,1	8.691,2	5.807,2	81.444,9	108.525,8	18,5
Babual Baboti	504,7	28,4	417,2	44,0	11.228,3	12.222,6	2,1
Dawak	2.091,7				583,9	2.675,6	0,5
Ipuh Bangun Jaya	856,6		48,0		3.202,5	4.107,1	0,7
Kinjil	428,4				822,6	1.250,9	0,2
Kondang	0,1	0,8	1.361,8	78,8	5.967,5	7.408,9	1,3
Kota Waringin Hilir	1.214,3	9,5	2.245,2	3.779,3	25.609,4	32.857,6	5,6
Kotawaringin Hulu	735,2		2.296,0	1.063,4	9.525,9	13.620,5	2,3
Lalang	64,1	2,4	479,8	801,3	5.799,5	7.147,1	1,2
Palih Baru	665,1		151,4		686,6	1.503,1	0,3
Riam Durian	1.557,5		291,9		2.119,0	3.968,4	0,7
Rungun	112,6	2,0	555,1	40,5	4.538,3	5.248,5	0,9
Sakabulin	834,2		352,7		5.034,7	6.221,6	1,1
Suka Makmur	783,6		389,3		2.500,6	3.673,4	0,6
Sukajaya	952,2				797,3	1.749,5	0,3
Sukamulya	295,1		59,0		1.955,1	2.309,2	0,4
Sumber Mukti	648,9				986,7	1.635,6	0,3
Tempayung	795,2		44,1		87,1	926,3	0,2
Kumai	31.298,5	5.696,0	4.867,6	2.597,4	229.139,1	273.598,5	46,5
Batu Belaman	1.508,2	198,7	7,4	18,6	2.338,9	4.071,8	0,7
Bumi Harjo	1.582,6	12,3	12,6	5,4	7,2	1.620,2	0,3
Candi	377,6	1,0				378,6	0,1
Keraya	131,6				5.345,2	5.476,8	0,9
Kubu	1.000,4	186,2	133,1		7.098,1	8.417,8	1,4



Kecamatan/Desa	Arahan Pengembangan dan Perluasan (ha)					Grand Total (ha)	%
	APP KS I	APP KS II	APP KS III	APP KS IV	Non APP KS		
Kumai Hilir	635,0	45,6	14,4	353,6	3.478,6	4.527,2	0,8
Kumai Hulu	1.505,0	735,2	3.167,6	1.825,8	1.581,9	8.815,5	1,5
Pangkalan Satu	1.236,7	18,2	47,5	7,0	176,0	1.485,4	0,3
Sebuai	59,5		452,0	65,3	10.378,0	10.954,9	1,9
Sungai Bakau	291,1				7.579,1	7.870,2	1,3
Sungai Bedaun	2.647,7	1.763,7	211,5	265,9	15.942,1	20.830,8	3,5
Sungai Cabang	9.864,1	3,2			37.028,2	46.895,4	8,0
Sungai Kapitan	993,6	36,2	799,9	55,8	3.282,4	5.167,9	0,9
Sungai Sekonyer	4.345,1	2.634,5	8,9	0,0	49.881,8	56.870,3	9,7
Sungai Tendang	1.227,5	29,4	12,6			1.269,5	0,2
Teluk Bogam	36,1				4.966,5	5.002,6	0,9
Teluk Pulai	3.856,6	31,8			80.055,2	83.943,6	14,3
Pangkalan Lada	18.333,4	41,1	377,1	144,5	14.175,7	33.071,7	5,6
Kadipi Atas	1.308,4				555,8	1.864,2	0,3
Lada Mandala Jaya	1.114,1		56,7	11,1	2.637,6	3.819,5	0,6
Makarti Jaya	1.394,7				454,7	1.849,5	0,3
Pandu Sanjaya	4.473,0				3.092,2	7.565,2	1,3
Pangkalan Dewa	1.896,9	18,4	254,2	18,4	681,0	2.868,9	0,5
Pangkalan Durin	704,8	21,1	25,8	95,8	1.486,9	2.334,4	0,4
Pangkalan Tiga	1.658,0				1.488,2	3.146,2	0,5
Purbasari	1.192,2					1.192,2	0,2
Sumber Agung	2.458,6	1,5			827,9	3.288,0	0,6
Sungai Melawen	1.187,2				306,2	1.493,4	0,3
Sungai Rangit Jaya	945,4		40,4	19,2	2.645,1	3.650,1	0,6
Grand Total	66.124,6	6.282,2	14.048,5	8.683,0	493.031,9	588.170,2	100,0

Pengembangan dan perluasan komoditas Kelapa Sawit untuk kebun swadaya secara umum hanya dapat dikembangkan di Kecamatan Kumai yaitu seluas 6,3 ha. Sedangkan untuk kecamatan yang lain (Arut Utara, Kotawaringin Lama dan Pangkalan Lada) pengembangan kebun sawadaya untuk tahun – tahun awal dapat dikembangkan pada areal Arahan Pengembangan dan Perluasan Komoditas Kelapa Sawit (APP KS I) seluas ± 65.839 ha yang tersebar di 35 Desa. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 6.8** dan **Tabel 6.9**.



Tabel 6.8. Arahan Pengembangan dan Perluasan Komoditas Kelapa Sawit Berdasarkan Kecamatan di Kebun Swadaya dalam Kajian *Master plan* Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit Kalimantan Tengah.

Kecamatan/Kebun Swadaya	Arahan Pengembangan dan Perluasan (ha)					Grand Total (ha)	%
	APP KS I	APP KS II	APP KS III	APP KS IV	Non APP KS		
Kebun Swadaya	285,2	6,3	13,8	0,4	177,8	483,5	0,1
KUMAI	285,2	6,3	13,8	0,4	177,8	483,5	0,1
Non Kebun Swadaya	65.839	6.276	14.035	8.683	492.854	587.687	99,9
Arut Utara	3.953	502	113	134	168.272	172.974	29,4
Kotawaringin Lama	12.539	43	8.691	5.807	81.445	108.526	18,5
Kumai	31.013	5.690	4.854	2.597	228.961	273.115	46,4
Pangkalan Lada	18.333	41	377	144	14.176	33.072	5,6
Grand Total	66.125	6.282	14.049	8.683	493.032	588.170	100,0
%	11,24	1,07	2,39	1,48	83,82	100,00	-

Tabel 6.9. Arahan Pengembangan dan Perluasan Komoditas Kelapa Sawit Berdasarkan Kecamatan dan Desa di Kebun Swadaya dalam Kajian *Master plan* Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit Kalimantan Tengah.

Kecamatan/Desa/ Kebun Swadaya	Arahan Pengembangan dan Perluasan (ha)					Grand Total (ha)	%
	APP KS I	APP KS II	APP KS III	APP KS IV	Non APP KS		
Kebun Swadaya	285,2	6,3	13,8	0,4	177,8	483,5	0,1
Kumai							
BatuBelaman					0,04	0,04	0,00
Bumi Harjo	107,1				4,3	111,3	0,0
Kumai Hulu	0,8		0,3		2,8	3,9	0,0
Pangkalan Satu	9,1				21,7	30,8	0,0
Sungai Bedaun	15,3	-			63,3	78,5	0,0
Sungai Cabang	2,2				0,1	2,2	0,0
Sungai Kapitan	28,9	6,1	13,5	0,4	85,8	134,6	0,0
Sungai Sekonyer	109,8	0,2				110,0	0,0
Teluk Pulai	12,0					12,0	0,0
Non Kebun Swadaya	65.839,3	6.275,9	14.034,8	8.682,6	492.854,1	587.686,7	99,9
Arut Utara	3.953,3	502,0	112,6	133,9	168.272,3	172.974,2	29,4
Gandis	829,3	35,7			7.018,7	7.883,7	1,3
Kerabu					8.840,2	8.840,2	1,5
Nanga Mua	669,7		0,3	0,3	34.355,4	35.025,7	6,0
Pandau	81,2	116,3			11.568,7	11.766,3	2,0
Pangkut	60,2		22,0		23.328,8	23.411,0	4,0
Penahan	739,1	4,0	90,3	122,0	39.265,0	40.220,3	6,8
Penyombean					11.202,4	11.202,4	1,9
Riam	709,1	199,2		11,7	11.368,1	12.288,1	2,1



Kecamatan/Desa/ Kebun Swadaya	Arahan Pengembangan dan Perluasan (ha)					Grand Total (ha)	%
	APP KS I	APP KS II	APP KS III	APP KS IV	Non APP KS		
Sambi					9.803,9	9.803,9	1,7
Sukarami	864,8	146,9			5.026,9	6.038,6	1,0
Sungai Dau					6.494,3	6.494,3	1,1
Kotawaringin Lama	12.539,4	43,1	8.691,2	5.807,2	81.444,9	108.525,8	18,5
Babual Baboti	504,7	28,4	417,2	44,0	11.228,3	12.222,6	2,1
Dawak	2.091,7				583,9	2.675,6	0,5
Ipuh B. Jaya	856,6		48,0		3.202,5	4.107,1	0,7
Kinjil	428,4				822,6	1.250,9	0,2
Kondang	0,1	0,8	1.361,8	78,8	5.967,5	7.408,9	1,3
K. Wrg. Hilir	1.214,3	9,5	2.245,2	3.779,3	25.609,4	32.857,6	5,6
K. Wrg. Hulu	735,2		2.296,0	1.063,4	9.525,9	13.620,5	2,3
Lalang	64,1	2,4	479,8	801,3	5.799,5	7.147,1	1,2
Palih Baru	665,1		151,4		686,6	1.503,1	0,3
Riam Durian	1.557,5		291,9		2.119,0	3.968,4	0,7
Rungun	112,6	2,0	555,1	40,5	4.538,3	5.248,5	0,9
Sakabulin	834,2		352,7		5.034,7	6.221,6	1,1
Suka Makmur	783,6		389,3		2.500,6	3.673,4	0,6
Sukajaya	952,2				797,3	1.749,5	0,3
Sukamulya	295,1		59,0		1.955,1	2.309,2	0,4
Sumber Mukti	648,9				986,7	1.635,6	0,3
Tempayung	795,2		44,1		87,1	926,3	0,2
Kumai	31.013,2	5.689,7	4.853,8	2.597,0	228.961,3	273.115,0	46,4
Batu Belaman	1.508,2	198,7	7,4	18,6	2.338,8	4.071,8	0,7
Bumi Harjo	1.475,6	12,3	12,6	5,4	3,0	1.508,8	0,3
Candi	377,6	1,0				378,6	0,1
Keraya	131,6				5.345,2	5.476,8	0,9
Kubu	1.000,4	186,2	133,1		7.098,1	8.417,8	1,4
Kumai Hilir	635,0	45,6	14,4	353,6	3.478,6	4.527,2	0,8
Kumai Hulu	1.504,2	735,2	3.167,3	1.825,8	1.579,1	8.811,7	1,5
Pangkalan Satu	1.227,6	18,2	47,5	7,0	154,3	1.454,6	0,2
Sebuai	59,5		452,0	65,3	10.378,0	10.954,9	1,9
Sungai Bakau	291,1				7.579,1	7.870,2	1,3
Sungai Bedaun	2.632,4	1.763,7	211,5	265,9	15.878,8	20.752,3	3,5
Sungai Cabang	9.861,9	3,2			37.028,1	46.893,2	8,0
Sungai Kapitan	964,7	30,1	786,5	55,4	3.196,6	5.033,3	0,9
S. Sekonyer	4.235,3	2.634,3	8,9	0,0	49.881,8	56.760,3	9,7
S. Tendang	1.227,5	29,4	12,6			1.269,5	0,2
Teluk Bogam	36,1				4.966,5	5.002,6	0,9
Teluk Pulai	3.844,5	31,8			80.055,2	83.931,5	14,3



Kecamatan/Desa/ Kebun Swadaya	Arahan Pengembangan dan Perluasan (ha)					Grand Total (ha)	%
	APP KS I	APP KS II	APP KS III	APP KS IV	Non APP KS		
Pangkalan Lada	18.333,4	41,1	377,1	144,5	14.175,7	33.071,7	5,6
Kadipi Atas	1.308,4				555,8	1.864,2	0,3
Lada M. Jaya	1.114,1		56,7	11,1	2.637,6	3.819,5	0,6
Makarti Jaya	1.394,7				454,7	1.849,5	0,3
Pandu Sanjaya	4.473,0				3.092,2	7.565,2	1,3
Pangkalan Dewa	1.896,9	18,4	254,2	18,4	681,0	2.868,9	0,5
Pangkalan Durin	704,8	21,1	25,8	95,8	1.486,9	2.334,4	0,4
Pangkalan Tiga	1.658,0				1.488,2	3.146,2	0,5
Purbasari	1.192,2					1.192,2	0,2
Sumber Agung	2.458,6	1,5			827,9	3.288,0	0,6
Sungai Melawen	1.187,2				306,2	1.493,4	0,3
S. Rangit Jaya	945,4		40,4	19,2	2.645,1	3.650,1	0,6
Grand Total	66.124,6	6.282,2	14.048,5	8.683,0	493.031,9	588.170,2	100,0

6.2 Analisa Ekonomi dan Perekonomian

Daya keterkaitan sektoral (daya penyebaran komoditas pertanian), daya penyebaran merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah. Selanjutnya, dengan membagi jumlah dampak tersebut dengan banyaknya sektor, dapat dihitung rata-rata dampak yang ditimbulkan terhadap output masing-masing sektor akibat perubahan permintaan akhir (Manik. 2013).

Keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) atau disebut juga daya penyebaran menunjukkan besarnya *output domestic* yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan 1 unit permintaan akhir dari suatu sektor berarti semakin besar pula pertumbuhan output seluruh sektor ekonomi jika terjadi kenaikan permintaan akhir sektor tersebut. Perbandingan Luas Areal Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2008 – 2013 menunjukkan bahwa luas areal perkebunan besar negara (PBN) sebesar 7 ha, perkebunan rakyat (PR) sebesar 42 ha, dan perkebunan besar swasta (PBS) sebesar 51 ha. Kemudian hasil produksi kelapa sawit 2008 – 2013 juga menunjukkan trend peningkatan, dimana produksi kelapa sawit dari perkebunan besar negara (PBN) sebesar 8 ton, perkebunan rakyat (PR) sebesar 36 ton, dan perkebunan besar swasta sebesar 56 ton. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa perkembangan luasan perkebunan kelapa sawit dan produksi kelapa sawit menunjukkan trend meningkat, namun disisi lain pendapat petani pekebun tidak



sejalan dengan peningkatan tersebut di atas, karena tergantung (berfluktuasi) dari harga hasil kelapa sawit dipasaran (Ditjenbun. 2014).

Hasil studi dan analisis yang dilakukan mendapatkan bahwa pendapat petani pekebun di daerah studi (Kotawaringin Barat), adalah sebesar Rp. 2,112,780 per ha per KK per bulan. Namun hal ini akan meningkat jika usaha perkebunan kelapa sawit berintegrasi dengan sapi (usaha integrasi usaha tani kelapa sawit – sapi).

Hasil kajian ini juga dilakukan sebelumnya terhadap usaha ternak sapi, diperoleh pendapatan sebesar Rp. 1,040,000 per bulan per KK. Oleh karena itu ada alternatif usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani pekebun kelapa sawit, yaitu dengan cara melakukan integrasi usaha tani kelapa sawit dengan sapi, yang mana pendapatan yang akan diperoleh petani pekebun sebesar Rp. 2,112,780 + 1,040,000 = Rp. 3,152,780 per bulan per KK. Nilai ini lebih tinggi dari nilai UMR Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 2,204,120 per bulan per KK. Benefit cost ratio dari usaha perkebunan kelapa sawit rakyat dan ternak sapi adalah 1,57 artinya usaha integrasi kelapa sawit – sapi sangat layak dan dapat dilanjutkan.

6.3 Analisa Sarana dan Prasarana Penunjang

Analisa sarana dan prasarana penunjang dilakukan dengan menggunakan metode analisa sub sistem. Analisa akan membagi pembahasan ke dalam sub sistem hulu, *on farm*, dan proses.

6.3.1 Sub Sistem Hulu

Analisa sub sistem hulu dilakukan untuk membandingkan kondisi eksisting aspek-aspek hulu dengan standard penyediaan atau pelaksanaan yang berlaku. Proses analisa dapat dilihat pada **Tabel 6.10**.

Tabel 6.10. Analisa Sub Sistem Hulu.

Aspek hulu	Eksisting	Standar	Analisa
Bibit	Penyediaan bibit bagi petani rakyat dibeli secara swadaya kepada Poktan, KUD, maupun perusahaan. Terdapat dua pilihan bibit yaitu bibit tersertifikasi (memenuhi ISPO) dan tidak tersertifikasi.	Sumber : ISPO • Benih atau bahan tanam yang digunakan merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah	• Penggunaan bibit, pupuk, dan pestisida yang sesuai dengan standard telah dilakukan oleh petani plasma



Aspek hulu	Eksisting	Standar	Analisa
	Penggunaan bibit tidak tersertifikasi bagi petani rakyat lebih memungkinkan mengingat harga yang lebih murah dibandingkan dengan bibit tersertifikat. Penyediaan bibit bagi petani plasma dijamin oleh perusahaan sehingga jumlah dan kualitasnya telah sesuai untuk mencapai ISPO.	mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang. <ul style="list-style-type: none"> • Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan teknis. • Catatan perbenihan tersedia di Pekebun, kelompok tani dan koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard perlu diberlakukan pada seluruh petani rakyat agar didapatkan hasil produksi yang optimal • Pemerintah perlu menyikapi keterbatasan petani rakyat dalam pengaplikasian bibit, pupuk, dan pestisida sesuai standard dengan cara langsung seperti subsidi dan hibah maupun dengan cara tidak langsung seperti memfasilitasi petani rakyat untuk menjadi anggota KUD sehingga input produksi sesuai standard menjadi terjamin.
Pupuk dan pestisida	Secara eksisting, penggunaan pupuk dan pestisida oleh petani rakyat tidak dilakukan secara benar (kualitas dan kuantitas). Hal ini terjadi karena keterbatasan petani rakyat dalam membeli pupuk dan pestisida walaupun dalam penyediaan, pupuk dan pestisida dapat dibeli di KUD maupun perusahaan. Kadang-kadang penggunaan pupuk dan pestisida hanya dilakukan bila terdapat bantuan dari pemerintah. Bagi petani plasma, penggunaan pupuk dan pestisida sudah dilakukan sesuai ISPO karena penyediaan dijamin oleh perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pupuk yang digunakan adalah NPK, TSP, Urea, dan KCL dengan kuantitas dan kualitas sesuai ketentuan • Pestisida yang digunakan harus efektif, ekonomis, sesuai dengan kondisi lingkungan, waktu pemakaian yang tepat, ukuran pemakaian yang sesuai, serta menggunakan metode pengaplikasian yang sesuai 	

6.3.2 Sub Proses (on farm)

Analisa subsistem proses dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting aspek-aspek on-farm petani rakyat terhadap petani plasma. Proses analisa dapat dilihat pada **Tabel 6.11**.

Tabel 6.11. Analisa Sub Sistem Proses.

Aspek proses	Eksisting	Analisa
Peralatan dan Perangkitan	Alat pertanian tradisional baik pada masa pra tanam, tanam, hingga pasca tanam masih digunakan oleh petani rakyat maupun petani plasma. Namun, petani plasma selain penggunaan alat pertanian tradisional, terdapat dukungan alat pertanian modern seperti compactor, excavator, grader, bulldozer, farm tractor, dan back hoe loader. Demikian pula dalam perangkitan hasil produksi, hasil produksi petani plasma dijamin untuk langsung diangkut tepat waktu oleh truk pengangkut perusahaan. Sedangkan petani rakyat mengandalkan pedagang pengumpul untuk mengambil hasil produksi.	<ul style="list-style-type: none">• Petani plasma didukung peralatan modern oleh perusahaan dalam proses pra tanam, tanam, dan pasca tanam• Petani rakyat perlu dukungan peralatan modern minimal pada salah satu tahapan (pra tanam, tanam, atau pasca tanam).• Pengadaan peralatan oleh pemerintah dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah kepada poktan/gapoktan atau secara tidak langsung melalui penguatan inventaris KUD yang membawahi petani rakyat• Untuk mendukung kawasan calon potensial perluasan perkebunan rakyat kelapa sawit perlu dibuat KUD dengan standarisasi dan manajemen KUD Tani Subur
SDM dan kelembagaan	Kelembagaan utama penyokong petani rakyat adalah KUD Tani Subur. Secara eksisting telah berhasil mengakomodir perkebunan rakyat secara baik serta mampu mengaplikasikan diversifikasi usaha. Namun KUD tersebut hanya mencakup wilayah Kecamatan Pangkalan Lada.	

6.3.3 Sub Sistem Hilir

Analisa sub sistem hilir dilakukan untuk menganalisa produk, olahan produk dan limbah yang dihasilkan oleh sektor. Kemudian akan dibandingkan dengan potensi pengembangan produk dan pengolahan limbah yang memungkinkan untuk dilakukan. proses analisa dapat dilihat pada **Tabel 6.12**.

Tabel 6.12. Analisa Sub Sistem Hilir.

Aspek hilir	Eksisting	Analisa
Produk	Produk perkebunan kelapa sawit petani rakyat dan petani plasma adalah berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang kemudian oleh	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan pohon industri yang dirilis oleh kementerian perindustrian, terdapat lebih dari 40 macam produk turunan industri



Aspek hilir	Eksisting	Analisa
Limbah	<p>perusahaan diolah menjadi produk Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), dan minyak goreng.. Terdapat lebih dari 40 jenis produk turunan dari kelapa sawit (di luar 3 produk diatas) yang belum dikembangkan oleh industri kelapa sawit PBS Kabupaten Kotawaringin Barat.</p> <p>Limbah perkebunan kelapa sawit berupa tandan kelapa sawit dan limbah cair sisa pengolahan minyak</p>	<p>kelapa sawit yang berpotensi untuk dikembangkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk turunan industri kelapa sawit PBS Kabupaten Kotawaringin Barat perlu ditingkatkan minimal berkesesuaian dengan rencana strategis pemerintah • Pengolahan limbah menjadi produk yang bermanfaat perlu dilakukan baik oleh petani maupun oleh PBS bekerja sama dengan pemerintah • Tandan kelapa sawit dapat digunakan sebagai kompos untuk kepentingan petani, sedangkan limbah cair sisa industri dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan Biofuel • Keberadaan KUD dengan sistem KUD Tani Subur perlu ditingkatkan khususnya pada Kec. Kotawaringin Lama dan Kec. Kumai. Hal ini dapat menjadi solusi terhadap mekanisme harga pada tingkat petani yang rendah karena rendahnya kualitas hasil produksi

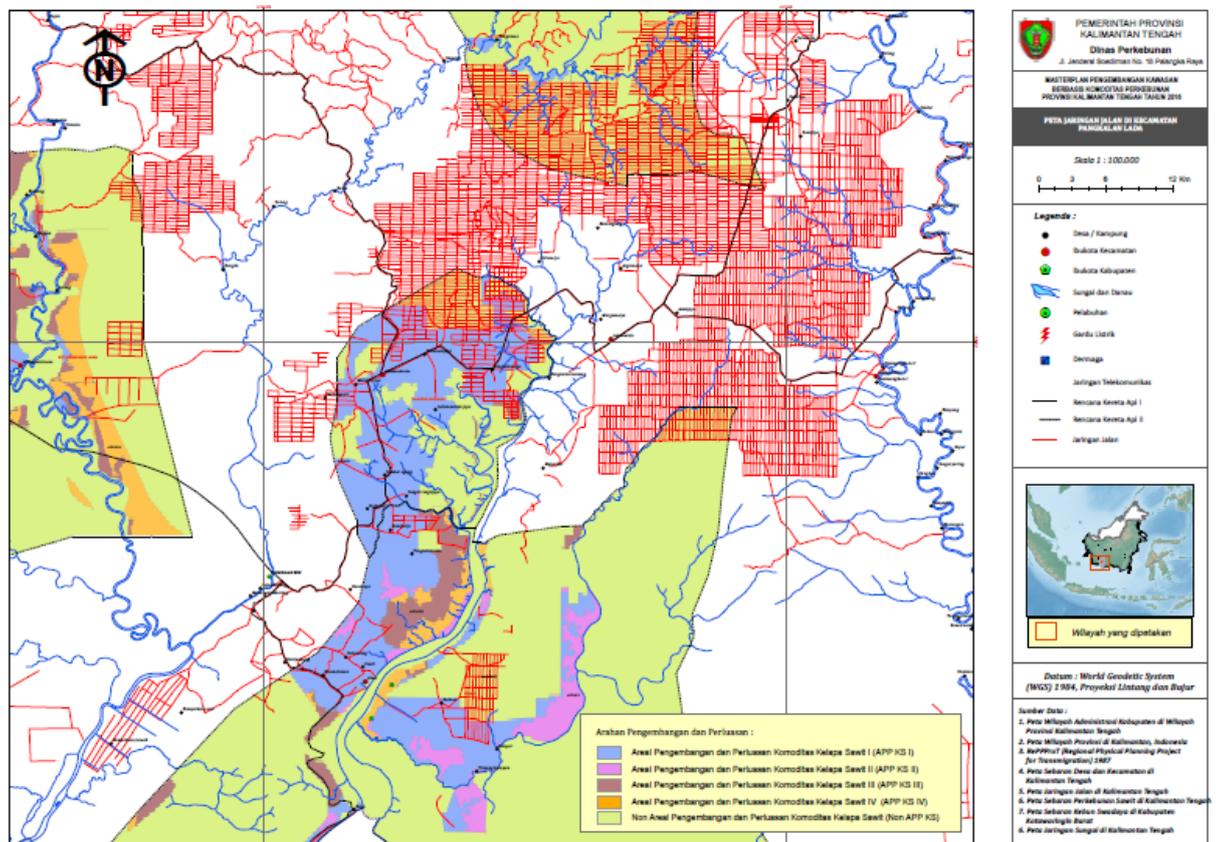
6.3.4 Sub Sistem Penunjang

Analisa sub sistem penunjang dilakukan untuk mengkaji aspek-aspek yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas proses pada setiap tahap sub sistem sebelumnya (hulu-proses-hilir) sehingga optimalisasi tahapan sub sistem dapat tercapai. Proses analisa dapat dilihat pada **Tabel 6.13**.

Tabel 6.13. Analisa Sub Sistem Penunjang.

Aspek penunjang	Eksisting	Analisa
Informasi	Aspek informasi mengenai Kabupaten Kotawaringin Barat, terutama mengenai pengembangan strategis perekonomian belum terakomodir secara formal. Website Kabupaten Kotawaringin Barat masih sangat minim informasi terutama yang berkaitan dengan pengembangan strategis perekonomian.	Perlu adanya perbaikan dan pengembangan media informasi seperti website yang real time dan komprehensif, periklanan mengenai potensi daerah khususnya komoditi unggulan kelapa sawit pada tempat-tempat strategis seperti bandara, pelabuhan dan juga di Kota Palangka Raya sebagai salah satu pintu gerbang Provinsi Kalteng.
Infrastruktur	Kondisi jalan secara umum sudah baik namun belum mencapai areal potensial pengembangan komoditi kelapa sawit terutama APP KS I (Gambar 6.14) Irigasi yang secara resmi diadakan oleh	Perlu adanya rehabilitasi jalan dan irigasi yang secara eksisting telah tersedia Perlu penambahan jalan, terutama menuju areal potensial pengembangan kelapa sawit khususnya APP KS I

Aspek penunjang	Eksisting	Analisa
	pemerintah baru sebesar 200 ha pada wilayah Kec. Kotawaringin lama	Perlu pengadaan jaringan irigasi yang menunjang pengembangan komoditi kelapa sawit terutam untuk wilayah kecamatan Pangkalan Lada dan Kumai.
Pelatihan dan penelitian	Belum terdapat sentra pelatihan dan penelitian khusus pembudidayaan komoditi kelapa sawit	Perlu pengadaan sentra pelatihan dan penelitian pada Kec. Pangkalan Lada Pemilihan Kec. Pangkalan Lada karena adanya KUD Tani Subur sebagai penunjang operasional.
Kebijakan	Belum terdapat kebijakan khusus yang mengakomodir pengembangan strategis kawasan perkebunan komoditi kelapa sawit	<i>Master plan</i> bertujuan untuk memberikn kepastian hukum dan kebijakan dalam upaya mengakomodir pengembangan kawasan strategis perkebunan khususnya komoditi kelapa sawit.



Gambar 6.14. Kondisi Eksisting Infrastruktur Jalan Kec. Pangkalan Lada.

6.4. Analisa Pengolahan, Perdagangan, dan Konsumsi Perdagangan Hasil Perkebunan

Analisa terhadap aspek pengolahan, perdagangan, dan konsumsi hasil perkebunan akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis Linkage Sistem. Analisa *linkage* dilakukan secara *backward* dan *onward* terhadap perusahaan komoditi kelapa sawit.

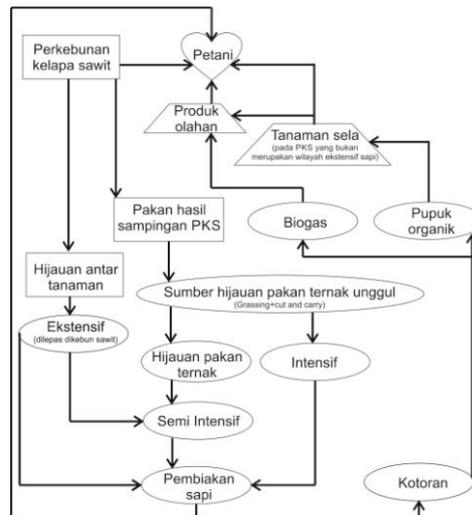


6.4.1 *Linkage Backward*

Analisa *linkage backward* digunakan untuk melihat keterkaitan antar komoditi dalam wilayah. Analisa *linkage backward* akan meninjau keterkaitan komoditi kelapa sawit dengan komoditi sektor lain yang berada dan juga diusahakan di Kabupaten Kotawaringin Barat. juga akan ditinjau peluang-peluang keterkaitan sektor atau komoditi lain dalam *linkage* komoditi kelapa sawit. Kondisi eksisting perusahaan komoditi kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Lada, telah dijalankan konsep diversifikasi kelapa sawit-sapi. Untuk meningkatkan nilai ekonomis perkebunan serta pendapatan masyarakat maka perlu diaplikasikan pula sistem tanaman sela. Analisa B/C peluang tanaman sela untuk komoditi kelapa sawit (Lolitsela, 2003) dapat dilihat pada **Tabel 6.7**. Keterkaitan diversifikasi kelapa sawit-sapi dengan peluang tanaman sela dalam bagan dapat dilihat pada **Gambar 6.15**.

Tabel 6.14. Peluang Tanaman Sela Kelapa Sawit Berdasarkan Besaran B/C Ratio.

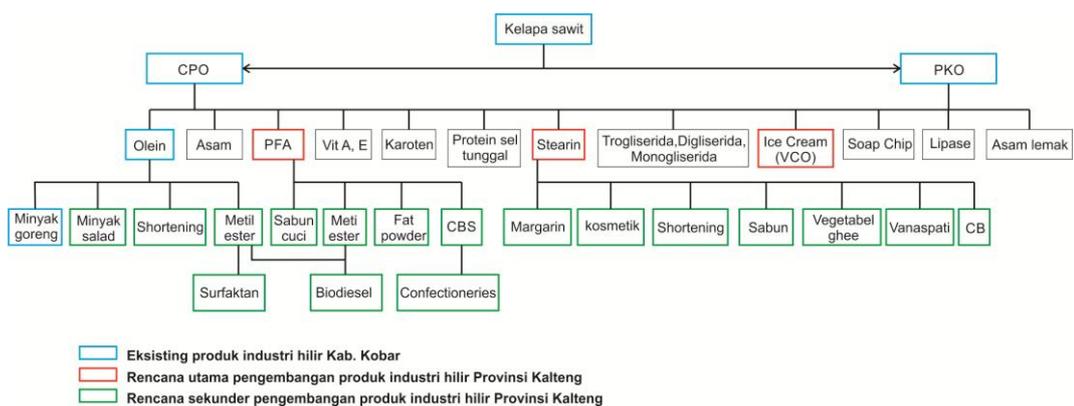
No	Model pola tanam	B/C Ratio
1	Kelapa sawit + Jagung hibrida	2,98
2	Kelapa sawit + Kacang tanah	1,87
3	Kelapa sawit + Kedelai	1,29
4	Kelapa sawit + Jahe gajah	2,17
5	Kelapa sawit + Kunyit	2,55
6	Kelapa sawit + Kencur	1,97
7	Kelapa sawit + Temulawak	1,63
8	Kelapa sawit + Temuireng	1,29
9	Kelapa sawit + Lengkuas	1,3
10	Kelapa sawit + Kopi	1,73
11	Kelapa sawit + Pisang	1,82
12	Kelapa sawit + Padi + Kacang tanah	1,17
13	Kelapa sawit + Kopi + vanili	1,44
14	Kelapa sawit + Kapulaga + Kopi	1,98
15	Kelapa sawit + Kopi + Vanili + Kapulaga	1,81



Gambar 6.15. Diversifikasi Kelapa Sawit-Sapi-Tanaman Sela.

6.4.2 Linkage Onward

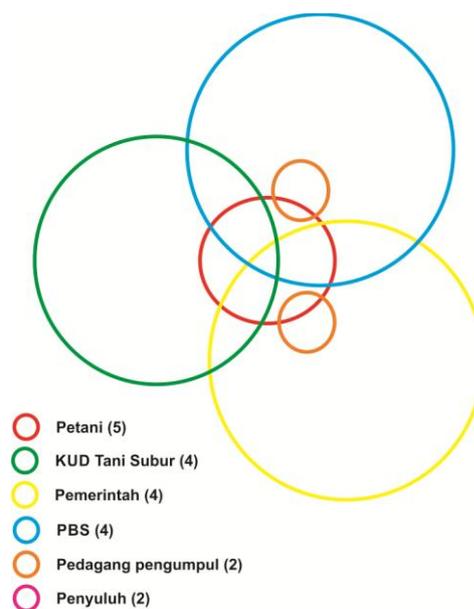
Analisa *linkage onward* digunakan untuk melihat keterkaitan komoditi antar wilayah. Dalam analisa *linkage onward* akan ditinjau diversifikasi industri hilir komoditi kelapa sawit Kabupaten Kotawaringin Barat kaitannya dengan pengembangan strategis perekonomian kabupaten, provinsi, dan nasional berdasarkan *roadmap* pengembangan industri hilir kelapa sawit dari Kementerian Perindustrian. Pentingnya pengembangan industri hilir adalah agar perekonomian strategis dari komoditas kelapa sawit secara nasional tidak hanya bergantung pada minyak mentah yang harganya secara global sangat fluktuatif. Bagan analisa *linkage onward* potensi industri hilir kelapa sawit dapat dilihat pada **Gambar 6.16**.



Gambar 6.16. *Linkage Onward* Industri Hilir Kelapa Sawit.

6.5. Analisa Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pelaku Sektoral

Analisa kelembagaan akan dilakukan dengan menggunakan metode diagram venn. Keterkaitan seluruh lembaga dapat dilihat dari Diagram Venn yang menggambarkan besar hubungan antar lembaga. Ukuran lingkaran menandakan besarnya peranan lembaga tersebut, semakin besar ukuran lingkarannya, maka peranannya semakin besar dan demikian pula sebaliknya (Rodiyah, 2005). Salah satu hal penting yang dipertimbangkan dalam usaha pengembangan masyarakat adalah pemanfaatan potensi lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, keberadaan dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut perlu untuk diperhitungkan dalam setiap usaha pengembangan masyarakat. Informasi yang diharapkan adalah kajian kegiatan-kegiatan, manfaat lembaga formal dan informal di dalam kehidupan masyarakat, serta menganalisis apakah lembaga tersebut membangun struktur masyarakat yang positif atau sebaliknya. Analisa kelembagaan dapat dilihat pada **Gambar 6.17**.



Gambar 6.17. Diagram Venn Pelaku Sektor Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit.

Berdasarkan hasil analisa terhadap keterkaitan antar pelaku sektor komoditi kelapa sawit Kabupaten Kotawaringin Barat, maka didapatkan prioritas penanganan. Petani sebagai pelaku utama yang bersinggungan dengan semua pelaku atau lembaga lain membutuhkan penanganan utama, kemudian disusul oleh KUD tani subur dan PBS, lalu terakhir penanganan kepada pedagang pengumpul dan penyuluh akan dilakukan



secara *purposive* yaitu kapan diperlukan penanganan maka akan dilakukan. Sedangkan pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai subjek perencanaan. Tujuan penanganan yang diharapkan pada masing-masing pelaku atau lembaga dapat dilihat pada **Tabel 6.15.**

Tabel 6.15. Tujuan Penanganan untuk Setiap Pelaku/Lembaga.

Pelaku/Lembaga	Tujuan Penanganan Berdasarkan Standar
Petani	Petani dan kelompok tani rakyat diharapkan memenuhi standard sertifikasi ISPO secara keseluruhan. Agar dapat terwujud maka terdapat 4 (empat) syarat: <ul style="list-style-type: none">• Kepemilikan lahan bersertifikat.• Input produksi (bibit, pupuk, dll) bersertifikat dan diaplikasikan sesuai aturan.• Proses ramah lingkungan.• Kelompok tani berkualitas (manajemen baik, memiliki keanggotaan dan susunan organisasi, memiliki catatan tanam, dll).
KUD	Untuk menuju KUD mandiri maka kriteria yang harus dipenuhi (Smecca): <ul style="list-style-type: none">• Mempunyai anggota penuh minimal 25% dari jumlah penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan KUD di daerah kerjanya.• Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha anggota maka pelayanan kepada anggota minimal 60% dari volume usaha KUD secara keseluruhan.• Minimal 3 (tiga) tahun buku berturut-turut RAT dilaksanakan tepat pada waktunya, sesuai Petunjuk Dinas.• Anggota Pengurus dan Badan Pemeriksa semua berasal dari anggota KUD dengan jumlah maksimal untuke Pengurus 5 orang dan Badan Pemeriksa 3 orang. Dan KUD telah memperkerjakan manajer dan karyawan dengan imbalan yang layak.• Modal sendiri minimal Rp. 25 juta.



Pelaku/Lembaga

Tujuan Penanganan Berdasarkan Standar

- Hasil audit laporan keuangan layak tanpa catatan (*unqualified opinion*).
- Batas toleransi deviasi usaha terhadap rencana usaha KUD (Program dan Non Program) maksimum 20% untuk deviasi negatif dan maksimum 50% untuk deviasi positif.
- Rasio Keuangan ditetapkan dengan sistem RLS (Rentabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas) dengan nilai minimal 75%.
- Total volume usaha harus proporsional dengan jumlah anggota dengan minimal rata-rata Rp 250.000,- per anggota per tahun.
- Pendapatan kotor minimal dapat menutup biaya berdasarkan prinsip efisiensi.
- Sarana usaha layak dan dikelola sendiri.
- Tidak ada penyelewengan dan manipulasi yang merugikan KUD oleh pengelola KUD.
- Tidak mempunyai tunggakan.

PBS

Berdasarkan Permentan Nomor : 11 Tahun 2015 tentang ISPO maka agar dapat tersertifikasi perusahaan wajib memenuhi:

- Memiliki izin usaha sesuai dengan pengusahaan yang dilakukan (IUP, IUP-B, IUP-P, SPUP, ITUBP, ITUIP).
- Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian; atau Izin usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian.
- Hak atas tanah sesuai peraturan di bidang pertanahan.
- Izin lingkungan.
- Penetapan usaha Perkebunan Kelas I, Kelas II atau Kelas III dari bupati/wali kota, gubernur atau Direktur Jenderal sesuai kewenangan.
- Tanggung jawab terhadap pekerja, serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.



6.6 Teknis Perkebunan

Asumsi umur tanaman kelapa sawit yang ditanam pertama kali di Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat ini telah mencapai kurang lebih usia 24-25 tahun. Asumsi digunakan mengingat terbatasnya data catatan tanam baik oleh pemerintah maupun oleh petani (poktan/gapoktan). Berdasarkan hal tersebut maka kemungkinan pada waktu dekat akan memerlukan peremajaan. Sistem Peremajaan tanaman kelapa sawit secara umum ada empat macam, yaitu sistem tumbang serempak, sistem *under planting*, sistem peremajaan bertahap, dan sistem tumpang sari/*intercropping* (Permentan Nomor : 18 Tahun 2016). Pertimbangan terhadap keuntungan dan kerugian penggunaan sistem peremajaan dapat dilihat pada **Tabel 6.16**.

Tabel 6.16. Pertimbangan Penggunaan Sistem Peremajaan.

Sistem	Keuntungan	Kerugian
Tumbang serempak	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan lahan dan pengolahan tanah dapat dilakukan lebih intensif, sehingga dapat mengurangi tingkat serangan hama kumbang tanduk (<i>Oryctes rhinoceros</i>), penyakit Ganoderma boninense Menyediakan kondisi tanah yang ideal bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit di lapangan. 	Hilangnya pendapatan pekebun karena pendapatan produksi dan penjualan TBS minimal 4 tahun (waktu minimal tanaman baru berbuah)
<i>Underplanting</i>	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kesempatan bagi pekebun untuk memperoleh pendapatan dari tanaman tua yang belum ditumbang Cocok diterapkan pada daerah rawan konflik 	Terganggunya pertumbuhan tanaman muda, meningkatnya serangan kumbang tanduk dan berkembangnya penyakit Ganoderma.
Bertahap	Pekebun masih dapat memperoleh pendapatan dari produksi tanaman tua yang belum diremajakan	Tidak efektif pada untuk pekebun dengan kepemilikan lahan kecil
Tumpang sari	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan alternatif pendapatan Melalui produksi tanaman sela Pertumbuhan tanaman muda tidak terganggu, Residu tanaman sela diharapkan dapat menjadi sumber Bahan organik dan membantu suplai hara bagi tanaman muda 	<ul style="list-style-type: none"> Memerlukan pengelolaan tanaman sela secara Intensif Memerlukan teknik dan rantai pemasaran yang Tepat agar produksi tanaman sela dapat terserap baik



Pilihan sistem peremajaan akan dilakukan melalui evaluasi terhadap kondisi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat. pada tahap awal, pemerintah perlu menjaring informasi catatan tanam dari masing-masing petani, poktan, maupun gapoktan sehingga dapat diketahui secara pasti lokasi peremajaan, besaran blok peremajaan, serta sistem peremajaan yang akan dipilih. Teknis dan tahapan peremajaan kemudian akan berpedoman pada Permentan Nomor : 18 Tahun 2016 tentang pedoman peremajaan perkebunan kelapa sawit.

6.7 Model dan Desain Pengembangan Teknis Perkebunan

6.7.1 Pilihan dan Penetapan Model

Berdasarkan Peraturan kementerian perindustrian Nomor : 13 Tahun 2010, pengembangan perkebunan kelapa sawit diharapkan untuk dilakukan dengan pendekatan industri klaster (terintegrasi). Secara umum pengelompokan industri kelapa sawit, yaitu:

A. Kelompok Industri Hulu

Merupakan kelompok industri dengan fokus produk akhir berupa TBS yang kemudian diolah menjadi produk CPO dan PKO merupakan kelompok industri yang menyediakan bahan baku bagi kelompok industri antara.

B. Kelompok Industri Antara

Merupakan kelompok industri dengan fokus produk akhir berupa industri olein, stearin, dan oleokimia dasar (*fatty acid, methyl ester, fatty amines, dll*). Merupakan kelompok industri yang menyediakan bahan baku bagi kelompok industri hilir.

C. Kelompok Industri Hilir

Merupakan kelompok industri dengan fokus produk akhir berupa produk hilir kelapa sawit baik produk pangan maupun non-pangan. Produk akhir kelapa sawit antara lain minyak goreng, *shortening*, CBS, sabun, vanaspati, biodiesel, surfaktan dll. Merupakan kelompok industri yang terintegrasi dengan industri pada sektor lain yang sangat beragam.



Secara umum, manfaat pengembangan kelompok industri dalam meningkatkan perekonomian daerah (pendapatan asli daerah, investasi, kesempatan kerja) akan semakin tinggi bila dilaksanakan semakin mendekati industri hilir. Secara eksisting berdasarkan analisa sub sistem, produk dan perusahaan sektor perkebunan komoditi kelapa sawit Kabupaten Kotawaringin Barat masih fokus pada produk-produk hulu sehingga masih dikategorikan sebagai kelompok industri hulu. Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kelapa sawit Provinsi Kalteng yang dilaksanakan pada Kabupaten Kotawaringin Barat akan direncanakan minimal sebagai kawasan industri produk antara.

Dalam analisa linkage sistem, untuk meningkatkan nilai ekonomis sektor perkebunan komoditi kelapa sawit terutama bagi masyarakat diperlukan diversifikasi usaha (sapi dan tanaman sela). Selain itu masyarakat melalui kelompok tani dan koperasi harus dapat memenuhi sertifikasi ISPO sehingga menghasilkan produk komoditi kelapa sawit terstandarisasi dan diusahakan dengan asas keberlanjutan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka model pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kelapa sawit Provinsi Kalimantan Tengah akan dilaksanakan dengan ketentuan:

- A. Berbasis klaster, dan diarahkan sebagai kawasan industri antara.
- B. Berbasis ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan.

6.7.2 Pilihan Komoditas dan Produk Akhir

Berdasarkan hasil analisa sebelumnya, maka pilihan komoditas dan produk akhir pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kelapa sawit Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 6.17**.

Tabel 6.17. Pilihan Komoditas dan Produk Akhir.

Komoditi	Kombinasi	Tanaman Sela	Produk Industri Antara
Kelapa sawit	• Kelapa sapi sawit-	• Jagung	• PFA
	• Kelapa ayam sawit-	• Lada	• Olein
	• Kelapa ikan sawit-	• Hortikultura	• Stearin
			• Ice Cream



6.8 Analisis Kebijakan dan Pembiayaan

Eksisting kondisi di lapangan terdapat lahan dengan status Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang telah menjadi perkebunan rakyat. Untuk pengembangan dan perluasan dikebun swadaya, perlu dilakukan bantuan pengurusan pelepasan kawasan HPK menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) contohnya pada 5 (lima) desa yang ada di daerah Kecamatan Kumai. Fakta di lapangan kemungkinan pada kecamatan lain terdapat pula hal serupa. Maka diharapkan pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan pelepasan kawasan HPK menjadi APL. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 6.18.**

Tabel 6.18. Arahan Pengembangan dan Perluasan Komoditas Kelapa Sawit Berdasarkan Kecamatan di Kebun Swadaya dalam Kajian *Master plan* Kawasan Berbasis Komoditas Kelapa Sawit Kalimantan Tengah.

Kecamatan/Desa/ Kebun Swadaya	Fungsi Kawasan Hutan						Grand Total
	APL	BADAN AIR	HP	HPK	HPT	KSA/KPA	
Kumai	322,3			161,2			483,5
Batu Belaman				0,04			0,04
Bumi Harjo	111,3						111,3
Kumai Hulu	3,6			0,3			3,9
Pangkalan Satu	19,8			11,0			30,8
Sungai Bedaun	22,9			55,6			78,5
Sungai Cabang	2,2						2,2
Sungai Kapitan	40,4			94,2			134,6
Sungai Sekonyer	110,0						110,0
Teluk Pulai	12,0						12,0
Grand Total	322,3	-	-	161,2	-	-	483,5

Selain mengenai konversi lahan, belum disahkan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah juga menyebabkan RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat belum dapat dibuatkan peraturan daerah (perda). Belum disahkan peraturan yang memuat pola ruang wilayah menyebabkan tidak ada kepastian hukum terkait penggunaan lahan. Sebagai upaya dalam menunjang kelancaran pengembangan sektor perkebunan komoditi kelapa sawit melalui *master plan*, pengesahan RTRW perlu segera dilakukan.



6.9 Sumber Pembiayaan

Dana pengembangan perkebunan sawit rakyat, termasuk didalamnya anggaran infrastruktur penunjang, bantuan, dan lain-lain secara umum berasal dari dana anggaran pemerintah Kabupaten serta Provinsi. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah maka diperlukan sumber dana lain yang dapat digunakan untuk membiayai program pengembangan komoditi kelapa sawit rakyat. Peluang sumber dana yang ada, yaitu:

A. Badan Pengelola dana Perkebunan (BPBD Sawit)

BPBD Sawit didirikan pada Juni 2015, berdasarkan UU Nomor: 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. BPBD adalah organisasi dibawah kementerian keuangan dengan sumber dana berasal dari pungutan retribusi ekspor hasil kelapa sawit. Target 2016, dana yang dihimpun oleh BPBD sawit adalah antara Rp 5-7 Triliun. Program yang dimiliki BPBD yaitu replanting lahan petani kecil, pengembangan riset dan produk, pemberdayaan SDM serta promosi. Syarat pengajuan dana bantuan, yaitu:

- Pengajuan langsung pada BPDP;
- Untuk petani perorangan lahan dibawah 4 ha, untuk petani berkelompok minimal lahan 300 ha;
- Harus terdapat koperasi/bank yang berfungsi sebagai sarana pemberian dana bantuan replanting;
- Lahan sawit yang akan ditanami ulang harus berpotensi dapat menghasilkan sawit yang berkualitas;
- Lahan potensial ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil Sistem*) atau sudah tersertifikat ISPO.

B. *Corporation Social Responsibility* (CSR)

Berdasarkan hasil survey primer, PBS kelapa sawit area barat Provinsi Kalimantan Tengah secara umum memiliki keinginan untuk mengembangkan industri kelapa sawit antara dan hilir. Keinginan ini dapat terealisasi apabila pemerintah dapat menyediakan areal lahan hingga 50.000 ha. Dengan ketersediaan lahan potensial pengembangan kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, hal ini dapat terealisasikan. Namun tentunya dengan persyaratan PBS harus dapat menyalurkan CSR untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan pengembangan petani kelapa sawit rakyat.



6.10 Qualitative Strategic Planning Matrix (QSPM)

Berdasarkan rangkaian analisa yang telah dilakukan sebelumnya, maka didapatkan rancangan program untuk masing-masing aspek pengembangan. Seluruh hasil tersebut kemudian akan dianalisa prioritas penanganannya dengan menggunakan QSPM. Masukan untuk analisa ini terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu : penilaian akademisi/teknokrat dan penilaian pemerintah terkait/birokrat. Penilaian akademisi berlaku sebagai bobot sementara penilaian pemerintah terkait akan berlaku sebagai *Attractiveness Score*. Bobot dan *Attractiveness Score* kemudian akan dikalikan untuk menghasilkan nilai akhir yang menggambarkan tingkat prioritas program yang direncanakan.

Aturan penilaian *Attractiveness Score* dan bobot untuk analisa QSPM adalah sebagai berikut:

- 3 = Mendesak dan penting
- 2 = Tidak mendesak namun penting
- 1 = Tidak mendesak dan tidak penting

Untuk jelasnya jalannya proses dan hasil analisa QSPM dapat dilihat pada **Tabel 6.19**.

Tabel 6.19. Hasil Analisa QSPM.

No.	Program	Attractiveness Score (AS)	Bobot	Nilai QSPM (AS x Bobot)
1	Pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit swadaya sebesar 1.200 ha	3	3	9
2	Pelepasan kawasan HPK yang secara eksisting telah beralih fungsi menjadi perkebunan rakyat kepada kawasan APL	3	3	9
3	Pengembangan kelompok tani swadaya komoditi kelapa sawit menjadi kelompok tani berkualitas	2	2	4
4	Inventarisasi umur tanaman kelapa sawit	1	3	3
5	Insentif pengurusan sertifikat (SHM, STDB) untuk lahan perkebunan rakyat	2	2	4
6	Pengembangan KUD pada Kec. Kotawaringin Lama dan Kumai	2	3	6
7	Penguatan KUD (SDM, Inventaris, dan Permodalan) untuk mencapai KUD mandiri	2	3	6
8	Fasilitasi sertifikasi ISPO bagi petani anggota KUD	3	3	9
9	Pendirian pusat/fasilitas pendidikan yang berorientasi pengembangan pengetahuan dan keterampilan pengusaha tanaman tahunan/perkebunan di Kec. Pangkalan Lada	1	2	2
10	Pengadaan bibit tanaman sela kelapa sawit	2	2	4
11	Pelatihan pembudidayaan tanaman sela kelapa sawit	2	3	6
12	Pengadaan bibit ternak kombinasi kelapa sawit	2	2	4
13	Pelatihan pembudidayaan ternak kombinasi kelapa sawit	3	3	9
14	Rehabilitasi dan pengadaan infrastruktur penunjang perkebunan sawit (jalan dan irigasi)	1	3	3
15	Pembuatan produk industri antara kelapa sawit (PFA, Olein, Stearin) dengan inisiasi pemerintah dan dukungan PBS	1	2	2



BAB VII RENCANA AKSI

7.1 Strategi Pengembangan

Esensi dari strategi pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kelapa sawit, tertuang dalam visi misi pengembangan sebagai acuan dasar dalam pembangunan sektor perkebunan dalam 20 tahun kedepan.

7.1.1 Visi Pengembangan

Visi pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

“Sebagai Klaster Industri Antara Komoditi Kelapa Sawit Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Berkelanjutan”

7.1.2 Misi Pengembangan

Dalam realisasi tujuan dari visi pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka hal-hal mendasar yang harus dicapai yaitu:

- A. Pengembangan areal perkebunan kelapa sawit untuk peningkatan produksi petani swadaya;
- B. Fasilitasi dan penjaminan kepastian hukum terkait status lahan dan perizinan;
- C. Penguatan SDM terkait komoditi kelapa sawit;
- D. Pelaksanaan dan pengelolaan sektor perkebunan komoditi kelapa sawit yang berkelanjutan;
- E. Penguatan basis ekonomi kerakyatan;
- F. Penyediaan infrastruktur penunjang sektor perkebunan yang berkualitas;
- G. Fasilitasi terhadap tersedianya industri produk antara.



7.2 Program Pengembangan

Program pengembangan merupakan perwujudan dari misi pengembangan yang telah dibahas sebelumnya. Program-program tersebut mewakili muatan dari misi pengembangan dengan ciri aplikatif sehingga dapat dilaksanakan. Program pengembangan juga memuat instansi terkait yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sert. Program pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada **Tabel 7.1.**

Tabel 7.1. Program Pengembangan.

Misi pengembangan	Program pengembangan	Detail kegiatan	Instansi pelaksana
Pengembangan areal perkebunan kelapa sawit untuk peningkatan produksi petani swadaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit swadaya sebesar 1.200 Ha ▪ Pelepasan kawasan HPK yang secara eksisting telah beralih fungsi menjadi perkebunan rakyat kepada kawasan APL 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan lahan pada Kec. Pangkalan Lada, Kec. Kotawaringin Lama, Kec. Kumai masing-masing 400 Ha (KODE A1) ▪ Survey lahan dan penetapan alih fungsi HPK –APL pada Kec. Pangkalan Lada, Kec. Kotawaringin Lama, Kec. Kumai (KODE A2) ▪ SI-CPCL (KODE A3) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbun ▪ Dishut
Fasilitasi dan penjaminan kepastian hukum terkait status lahan dan perijinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insentif pengurusan sertifikat (SHM, STDB) untuk lahan perkebunan rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan surat rekomendasi dan insentif bagi masyarakat atau kelompok tani dengan perkebunan produktif, potensial ISPO/terlah ISPO yang berguna sebagai katalisator dalam pengurusan SHM dan STDB (KODE B1) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbun ▪ BPN ▪ Perijinan
Penguatan SDM terkait komoditi kelapa sawit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kelompok tani swadaya komoditi kelapa sawit menjadi kelompok tani berkualitas ▪ Inventarisasi umur tanaman kelapa sawit ▪ Pendirian pusat/fasilitas pendidikan yang berorientasi pengembangan pengetahuan dan keterampilan pengusaha tanaman tahunan/perkebunan di Kec. Pangkalan Lada ▪ Pelatihan pembudidayaan ternak kombinasi kelapa sawit ▪ Pelatihan pembudidayaan tanaman sela kelapa sawit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan standard penilaian kelompok tani berkualitas (KODE C1) ▪ Survey umur tanaman khususnya bagi lahan petani swadaya di Kec. Pangkalan Lada, Kotawaringin Lama, dan Kumai (KODE C2) ▪ Insentif bantuan modal, bibit, pupuk, dan pestisida bagi petani / kelompok tani swadaya yang memiliki catatan tanam / telah memiliki STD-B (KODE C3) ▪ Fasilitasi untuk mendapatkan dana bantuan dan rehabilitasi kebun oleh BPBD Sawit (KODE C4) ▪ Pembangunan gedung pusat penelitian dan pendidikan (KODE C5) ▪ Pelatihan bagi petani/kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disbun ▪ BPTP



Misi pengembangan	Program pengembangan	Detail kegiatan	Instansi pelaksana
		tani berkualitas anggota KUD dalam diversifikasi usaha kombinasi ternak dan tanaman sela kelapa sawit (KODE C6)	
Pelaksanaan dan pengelolaan sektor perkebunan komoditi kelapa sawit yang berkelanjutan	Fasilitasi sertifikasi ISPO bagi petani anggota KUD	<ul style="list-style-type: none"> Subsidi dan penyediaan bibit tersertifikat, pupuk, dan pestisida bagi petani atau kelompok tani berkualitas yang menjadi anggota koperasi (KODE D1) Fasilitasi peningkatan kualitas petani melalui pendirian lembaga konsultan ISPO (KODE D2) 	<ul style="list-style-type: none"> Disbun Dinas Koperasi BPTP
Penguatan basis ekonomi kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan KUD pada Kec. Kotawaringin Lama dan Kumai Penguatan KUD (SDM, Inventaris, dan Permodalan) untuk mencapai KUD mandiri Pengadaan bibit tanaman sela kelapa sawit Pengadaan bibit ternak kombinasi kelapa sawit 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas dan kerjasama antar instansi dalam pendirian KUD di Kec. Kotawaringin Lama dan Kumai (KODE E1) Penyaluran bantuan bibit tanaman sela dan ternak kombinasi kelapa sawit bagi petani/kelompok tani berkualitas anggota KUD (KODE E2) 	<ul style="list-style-type: none"> Disbun Dinas Koperasi
Penyediaan infrastruktur penunjang sektor perkebunan yang berkualitas	Rehabilitasi dan pengadaan infrastruktur penunjang perkebunan sawit (jalan dan irigasi)	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan infrastruktur jalan menuju areal APP KS I pada wilayah Kec. Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada, dan Kumai (KODE F1) Pembangunan irigasi pada areal APP KS I untuk wilayah Kec. Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada, dan Kumai (KODE F2) 	<ul style="list-style-type: none"> Disbun Dinas PU Bappeda
Fasilitasi terhadap tersedianya industri produk antara	Pembuatan produk industri antara kelapa sawit (PFA, Olein, Stearin) dengan inisiasi pemerintah dan dukungan PBS	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan lahan yang dikhususkan untuk tujuan pengembangan industri antara-hilir oleh PBS (KODE G1) Fasilitasi melalui insentif perizinan PBS dalam pengembangan produk antara (KODE G2) Peningkatan koordinasi pusat-daerah dalam upaya penetapan wilayah Kab.Kotawaringin Barat sebagai kawasan produksi industri antara (KODE G3) 	<ul style="list-style-type: none"> Disbun

Berdasarkan program dan detail pengembangan serta instansi terkait pengembangan, maka alokasi waktu pelaksanaan, sumber pembiayaan, output dan outcome rencana akan dijelaskan secara mendetail dalam rencana aksi.

Tabel 7.2. Rencana Aksi

Detail Program	Instansi pelaksana	Jangka waktu pelaksanaan																				Sumber anggaran
		Jangka pendek					Jangka menengah										Jangka panjang					
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
A1	Disbun																					APBD
A2	▪ Disbun ▪ Dishut																					APBD, APBN
A3	▪ SI-CPCL																					BPDP
B1	▪ Disbun ▪ BPN																					APBD
C1	Disbun																					APBD
C2	Disbun																					APBD
C3	Disbun																					APBD, CSR
C4	Disbun																					APBD, Dana bantuan
C5	Disbun																					APBD, CSR
C6	▪ Disbun ▪ BPTP																					APBD
D1	▪ Disbun ▪ Dinas Koperasi																					APBD,
D2	▪ Disbun ▪ BPTP																					APBD
E1	▪ Disbun ▪ Dinas Koperasi																					APBD, CSR, Pebankan
E2	▪ Disbun ▪ Dinas Koperasi																					APBD, APBN
F1	▪ Disbun ▪ Dinas PU ▪ Bappeda																					APBD, APBN, PBS
F2	▪ Disbun ▪ Dinas PU ▪ Bappeda																					APBD, APBN, PBS
G1	▪ Disbun																					APBD, APBN
G2	▪ Disbun																					APBD, APBN
G3	▪ Disbun																					APBD, Swasta, BPDP

Ket: Pelaksanaan Evaluasi Perbaikan/Rehabilitasi





DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, Halind. 2006. Rencana Pengembangan Perkebunan pada Sistem Integrasi Sawit-Sapi di Kalimantan Tengah. Palangka Raya. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik Daerah Kab. Kobar 2015. Pangkalan Bun. Badan Pusat Statistik Kab. Kobar.
- David, E Meredith; David, R Forest; David, R Fred. 2009. The Quantitative Strategic Planning Matrix (Qspm) Applied to a Retail Computer Store. Florida. The Coastal Business Journal.
- Dinas Perkebunan Kab. Kobar. 2015. Perkebunan dalam angka 2013-2014. Pangkalan Bun. Pemerintah Kab. Kobar, Dinas Perkebunan.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2015. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019. Jakarta. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Jabbar, A Muhammad. 2009. Lebih jauh tentang Diagram Venn. Bandung. STEI ITB.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Jakarta. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- Kementerian Perindustrian. 2010. Peraturan Nomor 13 tahun 2010 tentang Peta Panduan (ROAD MAP) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit. Jakarta. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian. 2014. Pusat data dan sistem informasi pertanian. Jakarta. <http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id/>. Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- Kementerian Pertanian. 2015. Kepmentan No. 46 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional. Jakarta. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Manik, R Theodorik; Adrianto, W Dimas; Subagiyo, Aris. 2013. Kajian Pengembangan Kawasan Agropolitan Seroja Kabupaten Lumajang. Malang. Jurnal Tata Kota dan Daerah, Volume 5.
- Masliani. 2014. Penentuan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit pada Pasar Persaingan Tidak Sempurna di Kalimantan Tengah. Disertasi (S-3). Universitas Brawijaya. Malang.
- Mishra, Antaryami. 2007. Land Suitability Classification for Different Crops. Orissa. OUAT
- Nusantoro, Jawoto. 2011. Model Pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui Pendekatan Klaster di Provinsi Lampung. Metro. UNIMUS.



- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016. Pangkalan Bun. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.
- Perbatakusuma, A Erwin; Damanik, H Abdul; Azmi, Khairul. 2009. Prospek dan Tantangan Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Sumber Bahan Bakar Nabati dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim. Medan. Conservation International.
- Presiden Republik Indonesia. 2015. Perpres Nomor 131 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Jakarta. BAPPENAS.
- Ritung, Sofyan; Wahyunto; Agus, Fahmuddin; Hidayat, Hapid. 2007. Evaluasi Kesesuaian Lahan dengan Contoh Peta Arah Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat. Bogor. Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Setyanto, Adi; Irawan, Bambang. 2016. pembangunan berbasis wilayah : dasar teori, konsep operasional dan implementasinya di sektor pertanian. Jakarta. LITBANG Pertanian.
- United Nations. 2015. Transforming Our World – The 2030 Agenda for Sustainable Development. Washington DC. UNHQ.
<https://sustainabledevelopment.un.org/>
- Widjaja, E. dan Utomo, B. N. 2015. Pertanian Bioindustri Berkelanjutan Berbasis Kelapa Sawit-Ternak: “Kisah sukses di Kalimantan Tengah”. Jakarta. IAARD Press.